

A fisherman in a blue boat is shown in silhouette, pulling a large, shimmering fishing net. The net is draped over the boat and extends into the air, catching the golden light of the setting sun. The background features a calm sea and distant hills under a bright, hazy sky. The overall scene is peaceful and evokes a sense of traditional maritime labor.

**DITJEN
PENGUATAN
DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN
PERIKANAN**

Triwulan II

**LAPORAN
KINERJA
2025**

KATA PENGANTAR



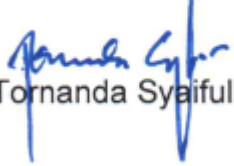
Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Triwulan II Tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk implementasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam rangka mendukung pelaksanaan lima kebijakan ekonomi biru Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Ditjen PDSPKP berkomitmen untuk memperkuat daya saing hasil kelautan dan perikanan sebagai upaya meningkatkan nilai tambah produk yang berdaya saing tinggi, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen PDSPKP.

Upaya peningkatan daya saing tersebut telah dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja Ditjen PDSPKP, yang sekaligus menjadi tolok ukur keberhasilan maupun kendala dalam pencapaian sasaran program. Secara garis besar, kinerja Ditjen PDSPKP pada Triwulan II Tahun 2025 menunjukkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 93,62 dengan kategori Baik.

Akhir kata, semoga Laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kepada seluruh pemangku kepentingan atas mandat dan kinerja yang telah ditetapkan kepada kami. Dengan semangat internalisasi #KITAPDS yaitu Kompetensi, Inovasi-Integritas, Transparansi, Akuntabel dapat mendorong peningkatan kinerja organisasi Ditjen PDSPKP dalam mendukung kebijakan ekonomi biru KKP.

Jakarta, 29 Juli 2025


Tornanda Syaifullah

TIM PENYUSUN

PENGARAH

Tornanda Syafullah

PENYUSUN

Machmud

Budi Yuwono

Agustina Pujiastuti

Andika Adisukma

Ayu Wahdania

Muqaromah Fitra Hasanah

Devi Sari

KONTRIBUTOR

Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing
Produk Kelautan dan Perikanan

IKHTISAR EKSEKUTIF

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025. Berdasarkan PK tersebut, terdapat lima indikator kinerja yang terdiri atas dua indikator dengan periode pelaporan triwulanan, satu indikator dengan periode pelaporan semesteran, dan dua indikator dengan periode pelaporan tahunan.

Seluruh indikator kinerja tersebut telah dilakukan pengukuran pada Tahun 2025. Hasil pengukuran Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Ditjen PDSPKP periode Triwulan II Tahun 2025, sebagaimana ditampilkan pada Aplikasi Kinerjaku, adalah sebesar 93,62 dengan kategori Baik.

Perincian capaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1. Sasaran Program Meningkatnya Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dengan Indikator Kinerja Nilai Ekspor Rumput Laut (USD Miliar), Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya (USD Miliar), Nilai Pemasaran Produk Perikanan Dalam Negeri (Rp Triliun), Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)
2. Sasaran Program Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan Ditjen PDSPKP dengan Indikator Kinerja Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PDPSKP (Nilai)
3. Dua indikator kinerja yang periode pelaporannya bersifat triwulanan yaitu Nilai Ekspor Rumput Laut dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya; satu indikator kinerja yang periode pelaporannya bersifat semesteran yaitu Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan Naik Kelas; dan dua indikator kinerja yang periode pelaporannya bersifat tahunan yaitu Nilai Pemasaran Produk Perikanan Dalam Negeri, dan Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP.

4. Indikator kinerja yang belum mencapai target pada triwulan II tahun 2025 yaitu Nilai Ekspor Rumput Laut dengan capaian sebesar 0,15 USD Miliar (nilai prognosa Juni) atau setara dengan 55,56% dari target triwulan II sebesar 0,27 USD Miliar.
5. Indikator kinerja yang memiliki capaian melebihi target pada triwulan II Tahun 2025 adalah Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya dengan capaian sebesar 2,80 atau setara dengan 105,30% dari target triwulan II sebesar 2,66 USD Miliar, Indikator Kinerja Persentase UMKM Pengolahan Produk KP Naik Kelas dengan capaian 1,5% atau setara dengan 120% dari target triwulan II sebesar 1%.
6. Alokasi anggaran pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan adalah sebesar Rp255.259.620.000,- (*dua ratus lima puluh lima miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*) yang seluruhnya merupakan APBN rupiah murni dan PNBPN. Dari pagu anggaran tersebut, terdapat blokir dan efisiensi anggaran sebesar Rp134.622.418.000,- (*seratus tiga puluh empat miliar enam ratus dua puluh dua juta empat ratus delapan belas ribu rupiah*) sehingga pagu anggaran efektif menjadi sebesar Rp120.637.202.000,- (*seratus dua puluh miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus dua ribu rupiah*). Penyerapan anggaran Ditjen PDSPKP sampai dengan periode triwulan II tahun 2025 adalah sebesar Rp51.155.442.000,- (*lima puluh satu miliar seratus lima puluh lima juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah*) atau setara dengan 20,04% terhadap total pagu anggaran awal atau 42,40% terhadap pagu anggaran pagu efektif.

DAFTAR ISI

Table of Contents

.....	i
COVER	i
KATA PENGANTAR	i
TIM PENYUSUN	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Maksud dan Tujuan	2
3. Tugas dan Fungsi.....	2
4. Keragaan Sumber Daya Manusia Aparatur.....	5
5. Permasalahan Utama.....	5
6. Sistematika Penyajian	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
1. Rancangan Rencana Strategis.....	13
A. Visi.....	13
B. Misi	14
C. Tujuan.....	16
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
1. Capaian Kinerja	18
2. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	19
A. Nilai Ekspor Rumput Laut.....	19
B. Nilai Pemasaran Produk Perikanan Dalam Negeri	45
C. Persentase UMKM Pengolahan Produk KP Naik Kelas.....	82
D. Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PDSPKP.....	87

3. Realisasi Anggaran	105
BAB IV PENUTUP	107
1. Kesimpulan	107
2. Permasalahan dan Rekomendasi.....	107
3. Tindak Lanjut Rekomendasi pada Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025.....	108
LAMPIRAN	109

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2025	17
Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Ditjen PDSPKP Periode Triwulan II Tahun 2025	18
Tabel 3. Ikhtisar Pencapaian Nilai Ekspor Rumput Laut	20
Tabel 5. Ikhtisar Pencapaian Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya.....	24
Tabel 6. Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya Berdasarkan Negara Tujuan Ekspor	25
Tabel 7. Ikhtisar Pencapaian Nilai Pemasaran Produk Perikanan Dalam Negeri	45
Tabel 8. Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan Naik Kelas Tahun 2024	82
Tabel 9. Ikhtisar Pencapaian Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PDSPKP .	87
Tabel 10. Realisasi Penyerapan Anggaran Ditjen PDSPKP Menurut Kewenangan Tahun 2024 (Dalam Rp.000).....	106
Tabel 12. Realisasi Penyerapan Anggaran Ditjen PDSPKP Menurut Jenis Kegiatan Tahun 2024 (Dalam Rp.000).....	106
Tabel 13. Permasalahan dan Rekomendasi atas Indikator kinerja yang tidak mencapai target pada triwulan II Tahun 2025	107
Tabel 14. Tindak Lanjut Rekomendasi pada Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025.....	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen PDSPKP	3
Gambar 2. Struktur Organisasi Ditjen PDSPKP	4
Gambar 3. Keragaan Sumber Daya Manusia Aparatur	5
Gambar 4. Sistematika Penyajian	12
Gambar 5. NKO Ditjen PDSPKP triwulan II tahun 2025	18
Gambar 6. Fasilitas Kerjasama Pemasaran Rumput Laut	22
Gambar 7. Rapat Business Matching Penumbuhan Eksportir Rumput Laut.....	23
Gambar 8. Diseminasi Perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA)	27
Gambar 9. rapat pembahasan penyusunan instrumen hukum dalam kerangka IJEPA	28
Gambar 10. Intersesi AITIGA SC Rules of Origin (ROO) for the 6th AITIGA SCROO	28
Gambar 11. Koordinasi Penerapan Standar Nasional Indonesia Produk Perikanan	29
Gambar 12. Rapat Koordinasi Penerapan Standar Nasional Indonesia Produk Perikanan	30
Gambar 13. Rapat Teknis Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) 2025.....	31
Gambar 15. Rapat Koordinasi Pemantauan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Perikanan	33
Gambar 16. Sosialisasi Permen KP Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Penerapan Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan.....	34
Gambar 17. Rapat Persiapan Konsensus RSNI3 Produk Perikanan	35
Gambar 18. Rapat Konsensus RSNI Produk Perikanan	35
Gambar 19. Pembinaan Industri Pengolahan Produk KP	36
Gambar 20. Koordinasi Sistem Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan..	37
Gambar 21. Rapat Koordinasi Program Pembinaan HACCP	39
Gambar 23. Sosialisasi CDIB dan Bimtek CDIB	41
Gambar 24. Sosialisasi Sertifikasi SPDI dan Simulasi CDIB	42
Gambar 25. Kegiatan Day Zero Kick-off Event STELINA dan Bimtek	43
Gambar 26. Harmonisasi Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional.....	44
Gambar 27. Pelaksanaan Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan).....	47
Gambar 28. Pembahasan Penyaluran Peralatan Pemasaran 2025	47
Gambar 29. Penyusunan Profil Pasar Dalam Negeri Hasil Kelautan Perikanan	48
Gambar 30. Workshop Penghitungan AKI Tahun 2024	48
Gambar 32. Rapat Finalisasi Populasi UPI Menengah Besar.....	50
Gambar 34. Pembahasan Juknis Pendataan Subbab Volume Produk Olahan Skala Menengah Besar.....	51
Gambar 35. Diskusi Penyusunan Pedoman Penghitungan Volume Produk Olahan (VPO) dan Utilitas pada Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Menengah Besar (MB).....	52
Gambar 36. Penetapan Populasi VPO dan Cleansing Data.....	52
Gambar 39. Pelatihan Diversifikasi Olahan Hasil Kelautan dan Perikanan.....	60
Gambar 40. Factory Trial Produk HPI di UPI Nilai Tambah Kota Pekalongan	61
Gambar 41. Penyusunan Rancangan Permenko Bidang Pangan tentang Pedoman Pelaksanaan Neraca Komoditas Pangan	63
Gambar 42. Sinkronisasi Database dan Klarifikasi Data Profil Cold Storage (CS).....	64

Gambar 44. Rapat pembahasan bahan RSNI2 produk kelautan dan perikanan TA 2025	65
Gambar 45. Kegiatan Rapat Teknis RSNI Produk Perikanan	65
Gambar 48. Penyiapan penyusunan bahan RSNI3	66
Gambar 49. Rapat pembahasan bahan RSNI3.....	66
Gambar 50. Rapat pembahasan penulisan metode uji RSNI.....	66
Gambar 52. Produk tuna dalam kemasan kaleng merek SMS.....	67
Gambar 53. Evaluasi sertifikasi produk tuna dalam kemasan kaleng PT Samudra Mandiri Sentosa.....	67
Gambar 54. Rapat tinjauan hasil evaluasi sertifikasi PT Indo Warna Perkasa.....	68
Gambar 55. Monitoring dan Evaluasi (Monev) serta Bimbingan Teknis (Bimtek) penggunaan Modul Bantuan Pemerintah.....	88
Gambar 56. Rapat Update data pemanfaatan Bantuan Pemerintah Lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2024.....	89
Gambar 57. Update DATA Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2024	89
Gambar 58. Rapat Pemutakhiran Data Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Lingkup Ditjen PDSPKP	89
Gambar 59. Kegiatan Verifikasi Capaian Kinerja pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK)	90
Gambar 60. Kegiatan Pembahasan Penyusunan Laporan Kinerja Level I dan Laporan Kinerja Level 2 PDSPKP	91
Gambar 61. Review Laporan Kinerja (LKj) level I Ditjen PDSPKP Periode Triwulan I tahun 2025	91
Gambar 62. Pembahasan Laporan Kinerja Level I PDSPKP Periode Triwulan II Tahun	91
Gambar 64. Rapat Monitoring Pelaksanaan IKPA KKP pada Indikator Halaman III DIPA Periode Mei Tahun 2025	92
Gambar 65. Rapat Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025	93
Gambar 66. Rapat Pembahasan Koordinasi Perencanaan Program dan Anggaran lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2025	93
Gambar 68. Sosialisasi Permen KP No. 10 Tahun 2025	94
Gambar 69. Sosialisasi dan Workshop Instrumen Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI) Pengawasan Kearsipan	96
Gambar 70. Rapat Updating RUP Triwulan 2 Tahun Anggaran 2025 lingkup Ditjen PDSPKP ...	98
Gambar 71. Rapat Pleno Proposal Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2025 Tanggal 19 Mei 2025	98
Gambar 72. Focus Group Discussion (FGD) realisasi penyaluran kredit program.....	101
Gambar 73. Penandatnganan Perjanjian Kerja Sama antara Asprindo dan GQSP (UNIDO)	101
Gambar 74. Penandatnganan PKS antara Ditjen PDSPKP dengan AP2HI.....	102
Gambar 75. Penandatnganan BAST dan Perjanjian Hibah Kendaraan Berpendingin Dari Direktorat Jenderal PDSPKP kepada Pemda Kabupaten Kebumen.....	105

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kebijakan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan diarahkan untuk mewujudkan produk kelautan dan perikanan yang memiliki daya saing tinggi sehingga dapat bersaing baik di pasar domestik maupun internasional. Kebijakan dimaksud mengacu pada pendekatan *market driven* atau pasar yang menjadi acuan kebijakan, sehingga ketersediaan produk dapat diterima dan diminati oleh konsumen. Dengan demikian, produk yang dihasilkan harus merupakan produk kelautan dan perikanan yang memiliki sifat *high quality, safe, traceable, high value content* dan *competitive*. Kebijakan ini akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahunan dan lima tahunan.

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PDSPKP Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis Ditjen PDSPKP yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahunan. Mengacu pada dokumen Rancangan Renstra tersebut, setiap unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP membuat perencanaan tahunan guna mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan program yang termuat dalam Rancangan Renstra. Perencanaan tersebut dibuat dengan disertai indikator sasaran dan cara mencapai sasaran tersebut secara strategis.

Dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Ditjen PDSPKP sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja berkewajiban menyusun dokumen perencanaan kinerja, pengukuran capaian kinerja, pengelolaan data capaian kinerja, serta menyampaikan Laporan Kinerja yang merupakan wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban.

Dokumen Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan baik berdasarkan Rancangan Renstra maupun rencana kinerja tahunan yang dibuat sebelumnya. Dokumen ini menjadi sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini akan menginformasikan capaian kinerja

triwulan I tahun 2025 atas pelaksanaan sasaran program dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP Triwulan II Tahun 2025 adalah untuk mengomunikasikan pencapaian sasaran program pada Triwulan II Tahun 2025 kepada *stakeholders* guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah.

3. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, kedudukan Ditjen PDSPKP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Dalam kedudukannya, Ditjen PDSPKP mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.

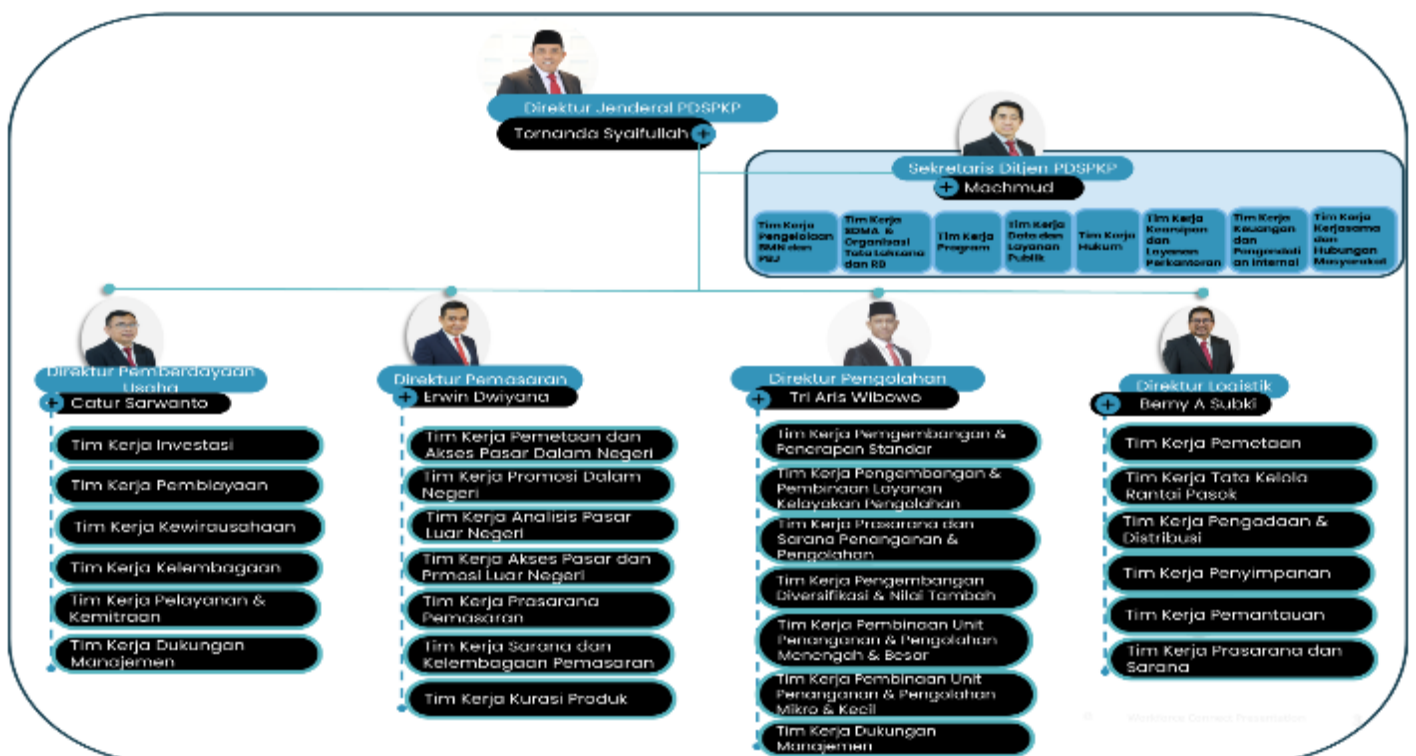
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen PDSPKP menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang standardisasi, peningkatan nilai tambah, dan pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan, pengelolaan logistik ikan nasional, fasilitasi pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan, serta pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi, peningkatan nilai tambah, dan pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan, pengelolaan logistik ikan nasional, fasilitasi pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan, serta pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang standardisasi, peningkatan nilai tambah, dan pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan, pengelolaan logistik ikan nasional, fasilitasi pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan, serta pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi, peningkatan nilai tambah, dan pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan, pengelolaan logistik ikan

- nasional, fasilitasi pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan, serta pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi, peningkatan nilai tambah, dan pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan, pengelolaan logistik ikan nasional, fasilitasi pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan, serta pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; dan
 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Ditjen PDSPKP dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal dan terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
2. Direktorat Logistik;
3. Direktorat Pemberdayaan Usaha;
4. Direktorat Pengolahan;
5. Direktorat Pemasaran;



Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen PDSPKP

Ditjen PDSPKP memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 68/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan, BBP3KP mempunyai tugas melaksanakan uji terap teknik pengolahan dan pemasaran, pengujian dan sertifikasi produk, serta pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan.

Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

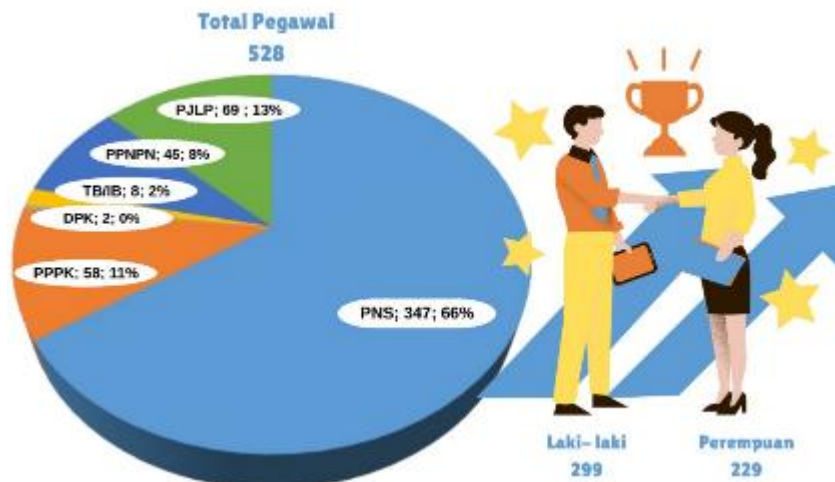
1. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pengujian penerapan produk kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan uji terap teknik pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan pengujian persyaratan kelayakan pengolahan dan penganekaragaman produk kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan penyiapan bahan standarisasi pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan;
5. Pelaksanaan sertifikasi produk penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) dan tanda kesesuaian produk kelautan dan perikanan;
6. Pelaksanaan pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan;
7. Pelaksanaan bimbingan teknis hasil uji terap, pengujian, dan sertifikasi produk kelautan dan perikanan; dan
8. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.



Gambar 2. Struktur Organisasi Ditjen PDSPKP

4. Keragaan Sumber Daya Manusia Aparatur

Jumlah pegawai Ditjen PDSPKP Tahun 2025 mencapai 518 orang yang terdiri dari 297 pegawai Laki-laki dan 229 pegawai perempuan, dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 3. Keragaan Sumber Daya Manusia Aparatur

5. Permasalahan Utama

A. Permasalahan dan Tantangan Dalam Negeri

Dalam pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi. Permasalahan dan tantangan tersebut berkaitan dengan produk perikanan yang mudah rusak (*perishable product*), produksi ikan bersifat musiman, disparitas wilayah produksi dan industri, logistik dan konektivitas antar wilayah, industri pengolahan yang didominasi skala mikro kecil, ketersediaan dan keterhubungan informasi produksi dan pasar, persyaratan, hambatan dan diplomasi perdagangan, serta SDM bidang pengolahan, mutu dan pemasaran ikan yang perlu ditingkatkan.

Terkait produk perikanan yang mudah rusak (*perishable product*), perlu dilakukan penanganan ekstra dalam penyajiannya. Kedepan, pembinaan terhadap Unit Pengolahan Ikan (UPI) dalam penyediaan produk perikanan yang berkualitas perlu diperkuat, sehingga terjadi diversifikasi produk terutama dalam penyajiannya, serta pengujian mutu perlu dilakukan bertingkat. Di samping itu, sebagai upaya untuk memastikan keamanan produk perikanan yang diperdagangkan, penilaian

sertifikasi perlu terus digenjut, terutama untuk UPI, pelaku pasar dan logistik perikanan yang berskala besar dan mempunyai jangkauan pasar yang luas. Hal ini penting, mengingat produk perikanan akan terus dibutuhkan masyarakat luas, selain karena bahan pangan ini rasanya enak dan ekonomis, juga mempunyai kandungan gizi yang tinggi.

Produksi ikan yang bersifat musiman juga menjadi permasalahan dan tantangan tersendiri dalam penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. Data statistik perikanan tangkap menunjukkan produksi ikan laut sangat fluktuatif sepanjang tahun dan mengalami musim puncak, musim, sedang, dan musim paceklik penangkapan ikan. Pada musim puncak produksi ikan sangat berlimpah, sementara di musim paceklik hasil tangkapan susah didapat. Pola musim tersebut juga bisa berbeda di setiap wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPP-RI). Hal ini kemudian menjadi pemicu terjadinya disparitas produksi ikan yang tinggi antar wilayah kepulauan Indonesia.

Disparitas yang menonjol berikutnya dan berpengaruh besar terhadap perekonomian nasional di bidang kelautan dan perikanan adalah disparitas wilayah produksi ikan dan industri pengolahan. Saat ini, sekitar 82% produksi perikanan tangkap berada di luar Jawa, sedangkan 45% sebaran UPI tersebar di Pulau Jawa. Dampaknya, banyak industri pengolahan ikan kekurangan bahan baku dalam waktu lama yang berakibat pada penghentian aktivitas industri bahkan PHK. Hal itu selalu terjadi setiap tahun, meskipun pada waktu yang sama produksi ikan di Wilayah Indonesia Timur tinggi. Ke depan, hal ini perlu dicari jalan keluar yang tepat, yang tidak merugikan pelaku UPI dan juga nelayan. UPI banyak dikembangkan di Pulau Jawa lebih karena kedekatan dengan pasar potensial yang sebagian besar berada di wilayah Jawa.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi disparitas wilayah produksi ikan dan industri pengolahan adalah dengan penguatan sistem logistik ikan. Sistem logistik ikan dapat membantu UPI mendapatkan bahan baku ikan secara kontinyu, sekaligus mendukung distribusi dan pemasaran ikan hasil tangkapan nelayan yang banyak tersebar di Kawasan Indonesia Timur. Namun ternyata sistem logistik ini juga masih menemui banyak kendala terutama terkait konektivitas antar wilayah. Dalam 5 tahun terakhir, kinerja logistik ikan nasional berada di angka 60-70 (skala 1-100). Hal perlu ditingkatkan antara lain melalui penyiapan ekosistem logistik yang baik dan efisien. Koordinasi, kerjasama, dan simbiosisitas aktivitas diantara pelaku logistik perlu ditingkatkan, begitu juga dukungan pemerintah melalui kebijakan taktis yang memicu berkembangnya aktivitas logistik

ikan perlu diupayakan. Hal ini akan mendorong tumbuhnya aktivitas logistik ikan di wilayah produksi, pengumpulan, dan pasar, yang sekaligus memperkuat konektivitas wilayah-wilayah tersebut.

Tantangan berikutnya terjadi pada industri pengolahan ikan, dimana saat ini masih didominasi UPI berskala mikro kecil. Jumlahnya mencapai 81.350 unit, sementara UPI skala menengah dan besar hanya 1.475 unit. Akibatnya mereka kurang bisa bersaing terutama dalam pemodalan dan ekspansi usaha, meskipun kebijakan berpihak kepada mereka. Ke depan, UPI skala mikro kecil tersebut perlu dibina dan difasilitasi sehingga lebih berkembang dan meningkat kelasnya. Hal ini perlu dilakukan antara lain dengan memperbanyak inkubator bisnis produk KP yang nantinya bisa melatih UPI dalam pengembangan produk dan memfasilitasi UPI untuk naik kelas. Upaya berikut perlu dilakukan adalah fasilitasi akses pembiayaan usaha dan fasilitasi kemitraan usaha, sehingga membantu perluasan usaha dan jaringan kerjasama UPI.

Untuk mendukung ekspansi bisnis dan pasar produk kelautan dan perikanan, terutama dalam memperluas jaringan ke pasar ekspor, maka ketersediaan dan keterhubungan informasi produksi dan pasar perlu ditingkatkan, serta persyaratan, penyelesaian hambatan dan diplomasi perdagangan perlu diperkuat. Saat ini, informasi produksi seperti musim ikan, jadwal tebar dan panen hanya terjalin antar nelayan, pemilik kapal, pembudidaya, penyedia pakan, dan penyedia perbekalan, sementara informasi pasar hanya terjadi diantara pedagang, pengumpul, dan pelaku ekspor. Ke depan jalur informasi tersebut perlu diperluas dan dikembangkan dari hulu ke hilir, sehingga semua pelaku usaha/bisnis perikanan dapat saling mendukung dan mengatasi permasalahan yang dihadapi bersama. Hal ini penting untuk peningkatan efisien dan pemanfaatan maksimal peluang pasar yang ada. Terkait persyaratan pasar dan hambatan pasar, akan selalu terjadi karena negara importir memiliki regulasi tersendiri atas produk impor dan berupaya melindungi pasar domestik produk mereka. Saat ini ekspor produk kelautan dan perikanan Indonesia masih bertumpu pada pasar tradisional negara tujuan (AS, Tiongkok, Jepang, dan Uni Eropa), sementara diversifikasi pasar dan produk ekspor belum optimal, dan UPI terutama yang berskala mikro kecil belum menerapkan prinsip mutu produk ekspor yang baik. Hal ini perlu dipecahkan secara komprehensif, dimana perundingan penyelesaian hambatan ekspor, harus dibarengi dengan upaya peningkatan mutu produk ekspor dan pengembangan intellegent pasar yang membantu diversifikasi pasar produk

perikanan dan kelautan. Perwakilan dagang RI di luar negeri (*Indonesia Trade Promotion Center*) dapat membantu dari segi diplomasi

Kualitas SDM bidang pengolahan, pengetahuan tentang mutu dan dinamika pasar menjadi permasalahan dan tantangan lain yang harus dipecahkan dalam rangka penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, terutama di pasar ekspor. Saat ini baru tersedia 190 Pembina Mutu dan 264 Analis Pasar Hasil Perikanan di seluruh Indonesia, padahal posisinya sangat vital sebagai pelopor mutu dan pengembangan pasar terutama di wilayah Indonesia yang aksesnya terbatas. Pembina Mutu dan Analis Pasar akan menjembatani penyediaan produk kelautan dan kelautan yang berkualitas dengan jaringan logistik dan pasar potensial di dalam dan luar negeri. Dalam konteks pengembangan SDM pengolahan, pelaku UPI perlu ditransfer *knowledge* berkaitan dengan standar mutu (GMP, SSOP, HACCP, *Traceability*) dan informasi pasar sehingga terjadi konsistensi dalam penyediaan produk KP berkualitas yang dibutuhkan pasar. Pembina Mutu dan Analis Pasar membantu hal tersebut di lapangan, sementara pada lingkup yang lebih luas Ditjen PDSKP dapat mengakomodasinya, melalui pengembangan sertifikasi kesesuaian mutu, fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran, fasilitasi promosi dan pameran produk KP, serta fasilitasi kesepakatan pemasaran produk KP di pasar potensial dalam dan luar negeri.

B. Permasalahan dan Tantangan Global

Permintaan global terhadap produk-produk *seafood* dipenuhi melalui jaringan perdagangan yang kompleks dan tersebar di berbagai belahan dunia. Seiring dengan meningkatnya populasi dan kesadaran konsumen terhadap pola makan sehat, permintaan ini terus tumbuh, menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi industri perikanan global. Pada tahun 2023, total nilai impor produk perikanan dunia mencapai USD 184,54 miliar, mengalami penurunan 5% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, rata-rata pertumbuhan impor perikanan dari 2017 hingga 2023 sebesar 3,16% menunjukkan potensi perkembangan yang berkelanjutan. Uni Eropa, Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang menjadi importir terbesar.

Tahun 2023 Uni Eropa mendominasi pasar global dengan nilai impor USD 61,85 miliar, meski pertumbuhannya hanya 0,05%. Amerika Serikat berada di posisi kedua dengan USD 27,38 miliar, meski turun 16,23%. Tiongkok dan Jepang juga berkontribusi signifikan dengan nilai impor masing-masing USD 23,32 miliar dan USD 14,37 miliar, keduanya mengalami penurunan masing-masing 0,59% dan 9,21% dari tahun sebelumnya (YoY). Pada tahun 2023, impor perikanan dunia

didominasi oleh komoditas trout dan salmon, dengan nilai mencapai USD 35,87 miliar, mencakup 19,4% dari total perdagangan perikanan global, dan tumbuh 1,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Komoditas udang berada di posisi kedua dengan nilai USD 27,00 miliar, menyumbang 14,6%, namun mengalami penurunan sebesar 13,9%. Tuna, tongkol, dan cakalang mencatat nilai impor USD 15,92 miliar (8,6% dari total), dengan penurunan 5,8%. Cumi-cumi, sotong, dan gurita mencatat impor USD 11,44 miliar (6,2% dari total), meskipun turun 2,7%. Tepung dan pakan ikan berkontribusi USD 6,50 miliar (3,5%), dengan penurunan 0,2%. Nilai impor kepiting atau rajungan sebesar USD 5,92 miliar (3,2%), turun 20,6%. Ikan cod mencatat impor USD 5,49 miliar (3,0%), dengan penurunan 9,5%.

Indonesia masih menjadi importir *seafood* untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tidak dapat dipenuhi oleh produksi lokal. Pada tahun 2023, Indonesia mengimpor produk perikanan sekitar 366.791,62 ton. Impor ini mencakup berbagai jenis *seafood*, termasuk ikan segar, beku, dan olahan mulai dari makarel hingga rumput laut. Nilai impor hasil perikanan Indonesia pun bervariasi dengan makarel menjadi komoditas impor terbesar sebesar USD 136,98 juta. Di sisi lain, ikan Cod dan Rumput Laut mencatat nilai impor yang lebih rendah, masing-masing sekitar USD 36,55 juta dan USD 33,96 juta. Udang dan Cumi-Sotong-Gurita memiliki nilai impor paling kecil, masing-masing USD 38,78 juta dan USD 19,93 juta. Komoditas lain seperti Tepung Ikan juga memiliki nilai impor tinggi hingga USD 64,59 juta.

Saat ini, negara-negara eksportir terbesar di dunia adalah Tiongkok, Norwegia, Ekuador, dan Chili. Tiongkok mendominasi dengan nilai ekspor sebesar USD 20,68 miliar, mencakup 11,18% dari total perdagangan dunia, meskipun turun 11,93% dibandingkan tahun sebelumnya. Norwegia berada di posisi kedua dengan nilai ekspor USD 16,05 miliar (8,68% dari total), dan mencatat pertumbuhan positif sebesar 2,80%. Ekuador dan Chili masing-masing mencatat nilai ekspor USD 9,04 miliar (4,89%) dan USD 8,89 miliar (4,81%), dengan Ekuador mengalami penurunan 10,72%, sementara Chili tumbuh 1,71%. Indonesia berada di peringkat ke-13 dengan nilai ekspor USD 5,6 miliar, berkontribusi 3,03% terhadap total perdagangan perikanan dunia.

Beberapa komoditas unggulan ekspor Indonesia masih menghadapi tantangan di pasar global, dengan pangsa pasar yang relatif kecil dan kalah bersaing dibandingkan negara-negara lain. Salah satu contoh adalah udang, yang menjadi andalan ekspor Indonesia dengan kontribusi sebesar 30,7% dari total ekspor produk perikanan Indonesia pada tahun 2023. Meskipun demikian,

Indonesia hanya berada di peringkat kelima sebagai eksportir udang utama dunia, di bawah Ekuador yang memiliki pangsa pasar 25,6%, India (17,3%), Vietnam (10,3%), dan Tiongkok (6,8%).

Ekspor udang Indonesia juga tengah menghadapi tantangan di pasar Amerika Serikat, yang merupakan importir udang terbesar di dunia. Berdasarkan hasil Preliminary Determination dari United States Department of Commerce (USDOC), Indonesia dinyatakan melakukan tindakan dumping pada periode investigasi 1 September 2022 hingga 31 Agustus 2023. Akibatnya, sejak 1 Juni 2024, ekspor udang beku Indonesia dikenakan tambahan tarif anti-dumping sementara sebesar 6,3%. Besaran tarif anti-dumping final akan ditetapkan setelah penerbitan *Final Determination* secara resmi oleh USDOC. Selain itu, Indonesia juga belum terdaftar sebagai negara yang dapat mengekspor udang hasil tangkapan (*certified nation*) ke Amerika Serikat, yang menyebabkan kendala tambahan bagi ekspor udang Indonesia.

Di sisi lain, Indonesia merupakan produsen utama tuna-cakalang-tongkol dunia, dengan produksi mencapai 1,35 juta ton pada tahun 2022, setara dengan 19,1% dari total produksi dunia menurut FAO 2024. Namun, kontribusi besar ini belum tercermin dalam pangsa pasar tuna-cakalang-tongkol Indonesia di dunia. Pada tahun 2023, Indonesia hanya menempati peringkat kelima eksportir utama tuna-cakalang-tongkol dengan pangsa pasar 6,2% atau setara dengan USD 1,73 miliar, masih di bawah Thailand (14,7%), Spanyol (9,8%), Ekuador (8,7%), dan Tiongkok (7,4%).

Tantangan lainnya datang dari pengenaan tarif tinggi untuk produk olahan (*tariff escalation*) oleh Uni Eropa dan Jepang, yang merupakan importir utama tuna-cakalang-tongkol dunia. KKP terus melakukan negosiasi untuk menurunkan tarif tersebut. Melalui forum *Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement* yang ditandatangani pada 8 Agustus 2024, disepakati penurunan tarif tuna-cakalang-tongkol kaleng dan olahan lainnya menjadi 0%, yang ditargetkan berlaku efektif pada awal tahun 2025. Negosiasi serupa berlangsung dalam forum *Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement*, yang bertujuan menurunkan tarif impor produk tuna olahan Indonesia dari 24% menjadi 0%.

Indonesia juga hanya menempati peringkat kelima dan keempat sebagai eksportir global untuk komoditas cumi-sotong-gurita dan rajungan-kepiting. Pada tahun 2023, ekspor cumi-sotong-gurita Indonesia mencapai USD 762,59 juta dengan pangsa pasar 5,9%, berada di bawah Tiongkok (30,6%), Spanyol (10,3%), Maroko (8,4%), dan Peru (6,5%). Sementara itu, ekspor rajungan-

kepiting Indonesia mencapai USD 447,65 juta dengan pangsa pasar 7,3%, di bawah Rusia (30,6%), Kanada (18,4%), dan Tiongkok (10,5%).

Namun, Indonesia memiliki posisi yang lebih baik sebagai eksportir rumput laut. Pada tahun 2023, Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai eksportir rumput laut dunia dengan nilai ekspor sebesar USD 433,72 juta dan pangsa pasar 13,8%, hanya kalah dari Tiongkok yang memiliki pangsa pasar 22,0%. Potensi peningkatan ekspor rumput laut Indonesia sangat besar, terutama karena ekspor saat ini didominasi oleh rumput laut kering dengan kontribusi 65,7%, yang sebagian besar diekspor ke Tiongkok. Produksi karaginan Tiongkok sangat bergantung pada bahan baku impor dari Indonesia, khususnya *Kappaphycus alvarezii* (Cottonii) dan *Eucheuma denticulatum* (Spinusum), dengan volume impor sebesar 117.004 ton atau setara dengan 92,8% dari total impor Dried *Eucheuma* oleh Tiongkok (Zhang, J., et.al, 2023). Posisi komoditas utama Indonesia di pasar global tahun 2023

Tantangan lainnya pada industri perikanan Indonesia adalah masalah keamanan pangan, dimana kontaminasi oleh bakteri patogen seperti *Salmonella*, *Listeria*, dan *Vibrio* dapat menimbulkan risiko kesehatan yang serius bagi konsumen. Kontaminasi ini bisa terjadi sepanjang rantai pasok, mulai dari lingkungan alam, selama proses penangkapan, hingga tahap pengolahan dan distribusi. Di samping itu, munculnya produk substitusi berbasis sel dan tumbuhan juga menjadi tantangan baru bagi industri perikanan tradisional. Produk-produk ini semakin dilirik karena dianggap lebih berkelanjutan dan etis, mengingat proses produksinya tidak melibatkan penangkapan ikan dan dapat dirancang untuk memiliki profil nutrisi yang lebih baik. Walaupun saat ini produk substitusi tersebut masih dalam tahap pengembangan, potensi pertumbuhannya sangat besar dan bisa menjadi pesaing serius bagi produk perikanan konvensional di masa depan.

Menghadapi tantangan-tantangan ini, sektor kelautan dan perikanan Indonesia perlu terus berinovasi dan meningkatkan standar kualitas, sekaligus memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki. Dengan pendekatan yang tepat, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam industri perikanan global, sekaligus mendorong keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat pesisir yang bergantung pada sektor ini. Potensi besar yang dimiliki Indonesia dalam produksi rumput laut, tuna, dan komoditas perikanan lainnya harus dioptimalkan untuk memenuhi permintaan pasar global yang terus berkembang, sambil tetap menjaga kelestarian sumber daya laut yang ada.

6. Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP Triwulan II Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja Ditjen PDSPKP pada Triwulan II Tahun 2025. Capaian Kinerja (*Performance Results*) Triwulan II Tahun 2025 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.



Gambar 4. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

1. Rancangan Rencana Strategis

A. Visi

Visi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029 ditujukan untuk mendukung Visi Indonesia Emas 2045 dan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029. Pada rancangan RPJPN, Visi Indonesia Emas 2045 dibagi dalam beberapa tahapan yang dilakukan secara terukur dan konsisten. Tahap pertama (tahun 2025-2029), difokuskan pada penguatan fondasi transformasi. Tahap kedua (tahun 2030-2034), melakukan akselerasi untuk mewujudkan transformasi yang sudah diperkuat fondasinya. Selanjutnya pada tahap ketiga (tahun 2035-2039), Indonesia memulai langkah untuk melakukan ekspansi global. Kemudian pada tahap terakhir RPJPN (tahun 2040-2045), Indonesia diharapkan dapat mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yaitu “Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”.

Visi Indonesia Emas 2045 didasari oleh landasan pemikiran tentang visi abadi Indonesia yang tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur. Visi Presiden dan Wakil Presiden ini juga didukung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk tahap penguatan fondasi transformasi tahun 2025-2029, Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rancangan rencana strategis tahun 2025-2029 menetapkan visi: “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Sebagai organisasi yang berada di bawah Presiden dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), maka Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden serta Visi KKP. Pada tahap penguatan transformasi tahun 2025-2029, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mendukung dua dari lima agenda transformasi yang didukung KKP, yaitu: (a) transformasi ekonomi, dan (b) ketahanan sosial budaya dan ekologi.

Untuk mendukung agenda pembangunan/penguatan transformasi, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mendukung 2 arah kebijakan KKP yaitu sebagai berikut :

a. Arah Kebijakan :

- 1) Penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota dan zona penangkapan
- 2) Pengembangan Perikanan Budi Daya di Laut, Pesisir dan Darat yang Berkelanjutan

b. Strategi

- 1) Hilirisasi penangkapan ikan berbasis komoditas unggulan
- 2) Meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha
- 3) Peningkatan tata kelola dan kinerja sistem logistik ikan nasional termasuk pengembangan sistem telusur logistik ikan nasional
- 4) Pengembangan industri pengolahan dan pemasaran untuk mendukung hilirisasi dan peningkatan nilai tambah
- 5) Meningkatkan mutu, nilai tambah, dan daya saing produk kelautan dan perikanan
- 6) Penguatan pasar dalam negeri melalui peningkatan akses kemudahan Masyarakat
- 7) Penguatan pasar luar negeri

Selanjutnya upaya transformasi super prioritas (*Game Changers*) yang dilakukan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029 adalah:

- Industrialisasi yang berorientasi pada hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor
- Ketahanan energi dan air, serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (*Food, Energy, Water*)

B. Misi

Dalam rangka mencapai visi dan dua agenda pembangunan/penguatan transformasi yang didukung, maka Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) perlu menentukan misi yang akan dilakukan untuk tahun 2025-2029. Misi Ditjen PDSPKP akan mendukung Misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden serta Misi KKP.

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan untuk melaksanakan misi Presiden dan wakil Presiden dalam rancangan RPJMN tahun 2025-2029, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan 7 dari 8 Misi/Asta Cita yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. “Meningkatkan kualitas lingkungan dan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan” yang menjabarkan Misi Asta Cita 8, Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis

dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur;

- b. “Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan untuk mendukung swasembada pangan yang merata di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan” yang menjabarkan Misi Asta Cita 2, Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru dan Misi Asta Cita 6, Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
- c. “Meningkatkan nilai tambah, hilirisasi dan penjaminan kualitas Produk Kelautan dan Perikanan” yang menjabarkan Misi Asta Cita 3, Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi dan Misi Asta Cita 5, Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- d. “Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” yang menjabarkan Misi Asta Cita 4, Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas; dan
- e. “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berkualitas” yang menjabarkan Misi Asta Cita 7, Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan

Dari lima misi KKP tersebut, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mendukung tiga misi, yaitu:

- a. Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan untuk mendukung swasembada pangan yang merata di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan,
- b. Meningkatkan nilai tambah, hilirisasi dan penjaminan kualitas Produk Kelautan dan Perikanan, dan
- c. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berkualitas

C. Tujuan

Guna mendukung visi dan misi yang telah ditetapkan, maka perlu dirumuskan tujuan pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan untuk tahun 2025-2029. Mengacu rancangan Renstra KKP tahun 2025-2029, ada lima tujuan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2025-2029, yaitu:

- a. Meningkatnya kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan serta terwujudnya wilayah pesisir dan laut yang adaptif terhadap perubahan iklim dan bencana;
- b. Meningkatnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan yang didukung dengan pengawasan yang tangguh dan efektif;
- c. Meningkatnya daya saing dan mutu hasil produk kelautan dan perikanan;
- d. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan; dan
- e. Birokrasi yang efektif dan efisien yang berorientasi pada kualitas pelayanan publik

Dari lima tujuan tersebut yang menjadi tujuan dari pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan adalah “meningkatkan mutu dan daya saing hasil produk kelautan dan perikanan”. Tujuan pembangunan tersebut akan dicapai melalui program-program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan selama tahun 2025-2029.

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sebagai upaya perbaikan perencanaan, Ditjen PDSPKP melakukan reviu terhadap Sasaran Program dan Indikator Kinerja Ditjen PDSPKP dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pada tahun 2024, masukan dari Sekretariat Jenderal KKP, serta rekomendasi dari Inspektorat Jenderal KKP.

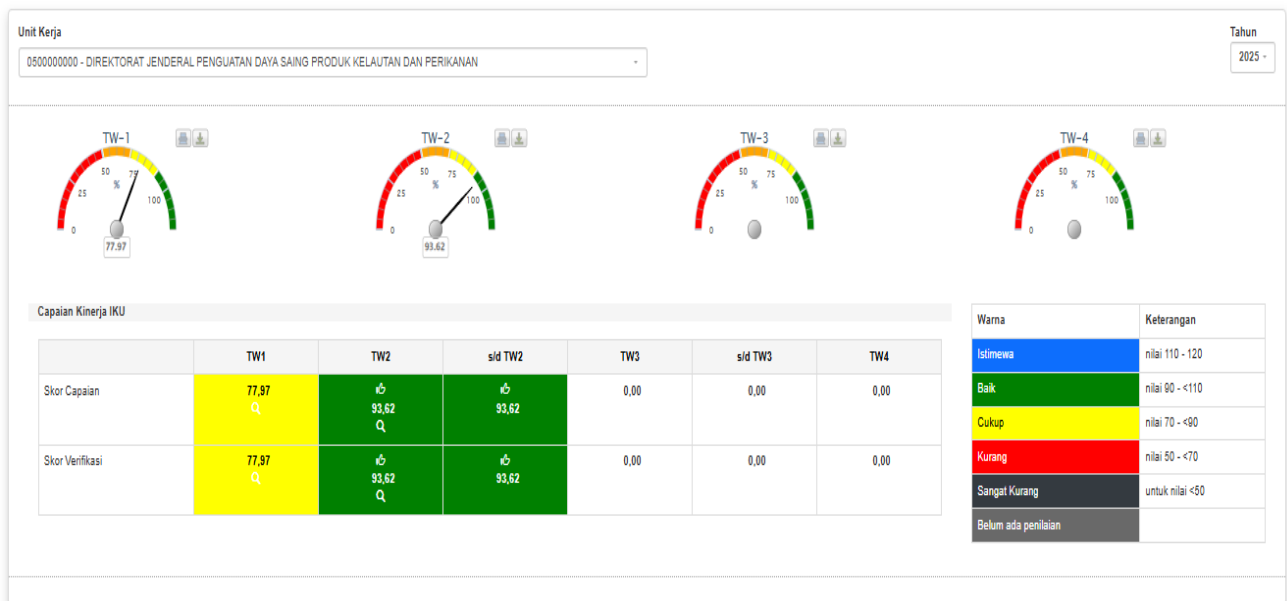
Tabel 1. Perjanjian Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2025

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
1	Meningkatnya Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing	1.	Nilai Ekspor Rumput Laut (USD Miliar)	0,57
		2.	Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya (USD Miliar)	5,68
		3.	Nilai Pemasaran Produk Perikanan Dalam Negeri (Rp Triliun)	310,51
		4.	Persentase UMKM Pengolahan Produk KP Naik Kelas (%)	5
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen PDSPKP	5.	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	86

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja

Capaian kinerja triwulan II tahun 2025 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Ditjen PDSPKP dari Januari sampai dengan Juni 2025. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara terukur keseluruhan yang bisa diperoleh dari Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK). NKO Ditjen PDSPKP triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 93,62. Capaian NKO pada triwulan II tahun 2025 sebagaimana terdapat pada Gambar 5.



Gambar 5. NKO Ditjen PDSPKP triwulan II tahun 2025

Target Sasaran Program dan Indikator Kinerja Ditjen PDSPKP pada Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Ditjen PDSPKP Periode Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja		Target		Realisasi TW II 2025	Persentase terhadap Target (%)	
		Tahun 2025	TW II 2025		Tahun 2025	TW II 2025
1	Nilai Ekspor Rumput Laut (USD miliar)	0,57	0,27	0,15	26,32	55,56

Indikator Kinerja		Target		Realisasi TW II 2025	Persentase terhadap Target (%)	
		Tahun 2025	TW II 2025		Tahun 2025	TW II 2025
2	Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya (USD Miliar)	5,68	2,66	2,80	49,30	105,30
3	Nilai Pemasaran Produk Perikanan Dalam Negeri (Rp Triliun)	310,51	-	-	-	-
4	Persentase UMKM Pengolahan Produk KP Naik Kelas (%)	5	1	1,50	30	120
5	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	86	-	-	-	-

2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja menjelaskan realisasi indikator kinerja, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta upaya perbaikan yang dilakukan ke depan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja Ditjen PDSPKP. Analisis untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerja utama dijelaskan sebagai berikut:

[Sasaran Program 1. Meningkatkan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing](#)

A. Nilai Ekspor Rumput Laut

Ekspor rumput laut adalah kegiatan mengeluarkan komoditas rumput laut dari wilayah pabean (*the custom frontier*) Republik Indonesia, baik bersifat komersial maupun bukan komersial (baran hibah, sumbangan, hadiah), serta komoditas rumput laut yang akan diolah di luar negeri dan hasilnya dimasukkan kembali ke negara tersebut. Nilai ekspor rumput laut adalah nilai komoditas rumput laut yang dikeluarkan dari wilayah pabean (*the custom frontier*) Republik Indonesia, baik bersifat komersial maupun bukan komersial (baran hibah, sumbangan, hadiah), serta komoditas rumput laut yang akan diolah di luar negeri dan hasilnya dimasukkan kembali ke negara tersebut yang dihitung dalam satuan US Dollar (USD).

Tabel 3. Ikhtisar Pencapaian Nilai Ekspor Rumput Laut

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	Tahun 2025	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	S.d TW II 2025			TW I 2025	TW II 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nilai Ekspor Rumput Laut (USD Miliar)	0,27	0,14	-	0,57	0,15*	0,07	-	0,15	55,56	26,32	114,29	-

*Prognosa sampai dengan Juni 2025

Sumber Data: BPS, Diolah Ditjen PDSPKP

Ditjen PDSPKP melakukan perhitungan prognosa capaian sampai dengan Juni 2025 dengan menggunakan data historis (*time series*) tahun sebelumnya. Hal tersebut dilakukan karena adanya *lag* data ekspor selama satu bulan yang dikeluarkan oleh BPS sebagai sumber data ekspor. Berdasarkan nilai prognosa tersebut, nilai ekspor rumput laut Triwulan II tahun 2025 mencapai USD 0,15 miliar. Capaian tersebut setara dengan 55,56% terhadap target triwulan II tahun 2025 sebesar USD 0,27 miliar, dan 26,32% terhadap target tahun 2025 yaitu sebesar USD 0,57 miliar. Capaian triwulan II tahun 2025 meningkat sebesar 114,29% jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan I tahun 2025 sebesar 0,07. Indikator ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 yang merupakan tahun pertama periode Renstra 2025-2029, sehingga belum dapat dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Data yang tersedia sampai dengan pelaporan Triwulan II tahun 2025 adalah data ekspor sampai dengan Bulan Mei 2025. Berdasarkan data BPS periode Januari-Mei, capaian ekspor rumput laut pada triwulan II tahun 2025 adalah sebesar USD 121,82 Juta. Capaian Nilai Ekspor Rumput Laut diperkirakan tidak mencapai target yang ditetapkan pada Triwulan II tahun 2025 sebesar USD 0,27 Miliar akibat adanya penurunan volume dan nilai ekspor rumput laut nasional.

Penurunan nilai ekspor rumput laut terutama terjadi pada ekspor rumput laut kering dan karaginan dengan tujuan pasar Tiongkok dimana nilai ekspor rumput laut kering turun 11,6% yaitu dari USD 69,32 juta menjadi USD 61,28 juta dan nilai ekspor karaginan turun 23,1% yaitu dari USD 21,8 juta menjadi 16,76 juta. Penurunan ini dapat dipengaruhi salahsatunya oleh menurunnya permintaan industri yang menggunakan produk turunan rumput laut di Tiongkok. Beberapa industri di Tiongkok mengganti bahan baku rumput laut (seperti *Eucheuma cottonii* yang diolah menjadi

karagenan) dengan bahan pengental lain (gum substitutes) yang lebih murah. Sampai saat ini Tiongkok merupakan pasar utama tujuan ekspor rumput laut Indonesia dengan kontribusi lebih dari 65%.

Selain itu, faktor eksternal berupa perlambatan ekonomi global juga turut memengaruhi permintaan pasar, termasuk dari negara-negara tujuan ekspor utama lainnya. Kondisi ini mengakibatkan penurunan aktivitas industri hilir di luar negeri dan berujung pada menurunnya permintaan terhadap bahan baku seperti rumput laut dari Indonesia. Faktor tekanan harga internasional juga berpengaruh signifikan, dimana harga rata-rata agar mengalami penurunan 16,2% dari USD 15,68 per kg (2023) menjadi USD 13,14 per kg (2025). Meskipun permintaan dari Tiongkok untuk komoditas perikanan secara umum stabil, khusus untuk rumput laut terjadi penyesuaian yang mempengaruhi daya serap pasar.

Jika dilihat dari provinsi asalnya, penurunan nilai ekspor rumput laut nasional ini juga dipengaruhi penurunan nilai ekspor rumput laut asal Sulawesi Selatan dan Jawa Timur dimana kontribusi nilai ekspor dari kedua provinsi ini mencapai 83,6% dari total nilai ekspor rumput laut nasional. Tercatat nilai ekspor rumput laut asal Sulawesi Selatan menurun 13,8% dan asal Jawa Timur menurun 11,0% dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Penurunan juga terjadi pada tiga provinsi yang mempunyai produksi yang tinggi yaitu Kalimantan Timur yang mengalami penurunan volume ekspor sebesar 71,7% dari 2,14 juta kg (2024) menjadi 604.800 kg (2025), Sulawesi Tenggara yang turun 100% dari 51.800 kg menjadi 0 kg, dan Sulawesi Utara yang juga turun 100% dari 61.200 kg menjadi 0 kg.

Atas permasalahan tersebut akan dilakukan upaya perbaikan dengan upaya promosi/sosialisasi terkait potensi produk turunan rumput laut, seperti *biostimulant* dan produk non-konsumsi, dalam rangka memperluas basis pemanfaatan dan pasar rumput laut.

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini dan sebagai tindaklanjut rekomendasi pada triwulan sebelumnya antara lain:

- a. Pelaksanaan Kerjasama Pemasaran Rumput Laut. Dalam upaya perumusan kerjasama pemasaran rumput laut, Ditjen PDSPKP telah melaksanakan fasilitasi kerjasama antar pelaku melalui penandatanganan Nota Kesepahaman pada tanggal 25 Januari 2025 antara:

- 1) Koperasi Produsen Mina Agar Makmur dengan PT. Agarindo Bogatama dengan nomor 01/PKS/KMAM-ABT.1/2025 dan 01/PKS/ABT-KMAM.1/2025 tentang Pemasaran Rumput Laut *Gracilaria* spp.
- 2) Koperasi Produsen Mina Agar Makmur dengan Kelompok Pembudidaya Tunas Makmur dengan nomor 02/PKS/KMAM-ABT.I/2025 dan 01/PKS/KTMKMAM.I/2025 tentang Pemasaran Rumput Laut



Gambar 6. Fasilitas Kerjasama Pemasaran Rumput Laut

- b. Penumbuhan Eksportir Produk Rumput Laut. Pemerintah menekankan pentingnya untuk terus meningkatkan ekspor dan investasi dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ekspor dan investasi harus dijaga agar terus meningkat karena basis pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berdasarkan konsumsi, baik konsumsi pemerintah maupun konsumsi swasta. Ditjen PDSPKP telah melaksanakan rapat persiapan *virtual business matching* dalam kerangka kerja sama *Indonesia-Singapore Agribusiness Working Group (ISAWG)* pada tanggal 24 Juni 2025. Rapat bertujuan untuk menjaring peserta serta menyiapkan rencana kegiatan *Business Matching* antara Indonesia dan Singapura yang akan diselenggarakan pada 7 Agustus 2025
- c. *Focus Group Discussion* tanggal 23 April 2025 yang membahas isu-isu strategis pengembangan rumput laut dari hulu hingga hilir, sekaligus menjaring masukan untuk penyusunan *Roadmap* Rumput Laut Nasional



Gambar 7. Rapat Business Matching Penumbuhan Eksportir Rumput Laut

- d. Ditjen PDSPKP telah melaksanakan rapat persiapan pameran rumput laut skala internasional *Food Ingredients Europe 2025* pada tanggal 18 Juni 2025. Pameran *Food Ingredients Europe 2025* akan dilaksanakan pada tanggal 2-4 Desember 2025 di Paris, Prancis. Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Akses Pasar dan Promosi Luar Negeri dan dihadiri oleh Eselon II Lingkup PDSPKP dan eksportir rumput laut. Rapat bertujuan untuk menjaring peserta pameran serta membahas skema pembiayaan pameran

Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja Nilai Ekspor Rumput Laut sebesar Rp832.890.000,- sampai dengan periode triwulan II tahun 2025 telah direalisasikan sebesar Rp 23.484.000,- atau setara dengan 2,82%.

A. Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya

Komoditas produk perikanan lainnya adalah komoditas hasil perikanan yang ditangani, diolah, dan atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan segar, ikan beku, dan olahan diluar komoditas rumput laut. Ekspor produk perikanan lainnya adalah kegiatan mengeluarkan komoditas produk perikanan lainnya dari wilayah pabean (*the custom frontier*) Republik Indonesia, baik bersifat komersial maupun bukan komersial (barang hibah, sumbangan, hadiah), serta komoditas produk perikanan lainnya yang akan diolah di luar negeri dan hasilnya dimasukkan kembali ke negara tersebut. Nilai ekspor produk perikanan lainnya adalah nilai komoditas produk perikanan lainnya yang dikeluarkan dari wilayah pabean (*the custom forntier*) Republik Indonesia, baik bersifat komersial maupun bukan komersial (barang hibah, sumbangan, hadiah), serta komoditas produk perikanan lainnya yang akan diolah di luar negeri dan hasilnya dimasukkan kembali ke negara tersebut yang dihitung dalam satuan US Dollar (USD).

Tabel 4. Ikhtisar Pencapaian Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	Tahun 2025	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	S.d TW II 2025			TW I 2025	TW II 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya (USD Miliar)	2,66	1,35	-	5,68	2,80*	1,43	-	2,80	105,30	49,30	95,80	-

* Prognosa sampai dengan Juni 2025

Sumber Data: BPS, diolah Ditjen PDSPKP

Sehubungan dengan adanya *lag* data ekspor selama satu bulan yang dikeluarkan oleh BPS sebagai sumber data ekspor produk perikanan lainnya, maka Ditjen PDSPKP melakukan perhitungan prognosa capaian sampai dengan Juni 2025 dengan menggunakan data historis (*time series*) tahun sebelumnya. Berdasarkan nilai prognosa tersebut, nilai produk perikanan lainnya pada triwulan II tahun 2025 mencapai USD 2,80 miliar. Capaian tersebut setara dengan 105,30% terhadap target triwulan II tahun 2025 sebesar USD 2,66 miliar, dan 49,30% terhadap target tahun 2025 yaitu sebesar USD 5,68 miliar. Capaian triwulan II tahun 2025 meningkat sebesar 95,80% jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan I tahun 2025 sebesar 1,43. Indikator ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 yang merupakan tahun pertama periode Renstra 2025-2029, sehingga belum dapat dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Data yang tersedia adalah data ekspor sampai dengan Bulan Mei 2025. Berdasarkan data BPS periode Januari-Mei, capaian nilai ekspor produk perikanan lainnya (diluar rumput laut) pada triwulan II 2025 diperkirakan mencapai target yang ditetapkan. Secara keseluruhan, volume ekspor perikanan lainnya (tidak termasuk rumput laut) meningkat 7,5% dari 428,83 ribu ton pada 2024 menjadi 461,16 ribu ton pada 2025, sementara nilai ekspornya meningkat 9,4% dari USD 2,16 miliar menjadi USD 2,37 miliar.

Peningkatan nilai ekspor produk perikanan lainnya terutama terjadi pada ekspor udang (meningkat 16,8% dalam volume dan 25,8% dalam nilai) dan ekspor tuna-cakalang-tongkol

(meningkat 21,2% dalam volume dan 9,1% dalam nilai). Udang dan tuna-cakalang-tongkol merupakan komoditas utama ekspor perikanan Indonesia dengan kontribusi mencapai 50,8% dari total nilai ekspor produk perikanan lainnya. Negara utama tujuan ekspor produk perikanan lainnya adalah Amerika Serikat (pangsa 35,7%), ASEAN (17,0%), Tiongkok (14,3%), Jepang (10,1%) dan Uni Eropa (6,8%).

Nilai ekspor produk perikanan lainnya berdasarkan negara tujuan ekspor dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya Berdasarkan Negara Tujuan Ekspor

Negara	2024	2025
Amerika Serikat	746.304.310	845.809.179
ASEAN	292.975.325	403.582.612
Tiongkok	389.902.719	338.801.393
Jepang	234.788.604	238.683.791
Uni Eropa	150.538.190	160.424.371
Lainnya	67.422.997	90.777.238
Timur Tengah	57.738.888	60.414.932
Hong Kong	41.143.391	47.856.632
Taiwan	52.363.191	45.826.469
Australia & Selandia Baru	47.021.196	41.453.263
Kanada	26.985.270	39.020.372
Korea Selatan	29.177.463	30.861.323
United Kingdom	20.930.553	15.758.092
Rusia	6.771.158	9.239.437
EFTA	722.833	584.364
Eurasia	45.903	47.554
Total Ekspor Perikanan	2.164.831.991	2.369.141.022

Ket. Pencapaian Nilai Ekspor Perikanan Sampai Dengan Mei 2025

Berdasarkan negara utama tujuan ekspor produk perikanan lainnya yaitu Amerika Serikat sebesar USD 845,81 juta (35,70%), ASEAN sebesar USD 403,58 juta (17,04%), Tiongkok sebesar USD 338,80 juta (14,30%), Jepang sebesar USD 238,68 juta (10,08%), dan Uni Eropa sebesar USD 160,42 juta (6,77%).

Nilai ekspor berdasarkan pasar negara utama ekspor dan komoditas perikanan Indonesia periode triwulan II tahun 2025 (*Mei 2025) yaitu sebagai berikut:

- a. Komoditas Udang (USD 792,845 Juta)
 - 1) Amerika Serikat USD 512,18 juta (56,15%)
 - 2) Jepang USD 126,43 juta (13,86%)
 - 3) Tiongkok USD 39,57 juta (4,34%)
 - 4) Uni Eropa USD 29,98 juta (3,29%)
 - 5) Australia dan Selandia Baru USD 18,45 juta (2,02%)
- b. Komoditas Tuna-Cakalang (USD 410,158 juta)
 - 1) Amerika Serikat USD 171,598 juta (41,85%)
 - 2) ASEAN USD 104,477 juta (25,47%)
 - 3) Jepang USD 65,72 juta (16,02%)
 - 4) Uni Eropa USD 52,41 juta (12,78%)
 - 5) Timur Tengah USD 51,506 juta (12,56%)
- c. Komoditas Cumi-Sotong-Gurita USD 314,622 juta
 - 1) ASEAN USD 125,294 juta (39,8%)
 - 2) Tiongkok USD 103,673 juta (32,95%)
 - 3) Uni Eropa USD 30,23 juta (9,61%)
 - 4) Amerika Serikat USD 14,16 juta (4,6%)
 - 5) Taiwan USD 12,97 juta (4,12%)
- d. Komoditas Rajungan-Kepiting USD 216,01 juta
 - 1) Amerika Serikat USD 132,861 juta (61,52%)
 - 2) Tiongkok USD 46,34 juta (21,45%)
 - 3) Jepang USD 25,54 juta (11,82%)
 - 4) Taiwan USD 1,28 juta (0,59%)
 - 5) Kanada USD 1,21 juta (0,56%)

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

a. Penyelesaian Hambatan Ekspor dan Perluasan Akses Pasar Luar Negeri melalui Kertas Posisi Runding. Dalam rangka penguatan ekspor produk perikanan Indonesia Ditjen PDSPKP telah melaksanakan rapat, antara lain:

1) Perkembangan perundingan IEU-CEPA

Pada tanggal tanggal 13 Juni 2025, Ditjen PDSPKP yang diwakili Direktur Pemasaran Ditjen PDSPKP mengikuti Diseminasi Perundingan *Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA)* yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital, Kemenko Bidang Perekonomian. Tujuan pertemuan adalah menyampaikan perkembangan hasil perundingan IEU-CEPA yang secara substansif sudah disepakati oleh Indonesia dan European Union (EU). KKP akan terus mengawal penghapusan tarif produk perikanan dari EU terutama untuk 15 pos tarif tuna olahan yang pada perundingan intersesi terakhir masih belum mendapatkan preferensi tarif dari EU



Gambar 8. Diseminasi Perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA)

2) Perkembangan perundingan perubahan protokol IJEPA

Sehubungan Penyusunan Peraturan Menteri KP atau Instrumen Lainnya dalam rangka Implementasi Protokol Perubahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (IJEPA), Ditjen PDSPKP melalui Direktorat Pemasaran telah menyelenggarakan serangkaian rapat pembahasan penyusunan instrumen hukum dalam kerangka IJEPA pada tanggal 14 dan 21 Mei 2025. Rapat ini membahas mengenai rancangan Surat Edaran dalam rangka implementasi Protokol Perubahan IJEPA. Ditjen PDSPKP melalui juga telah menyampaikan Rancangan Surat Edaran (SE) MKP tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan Dalam Rangka

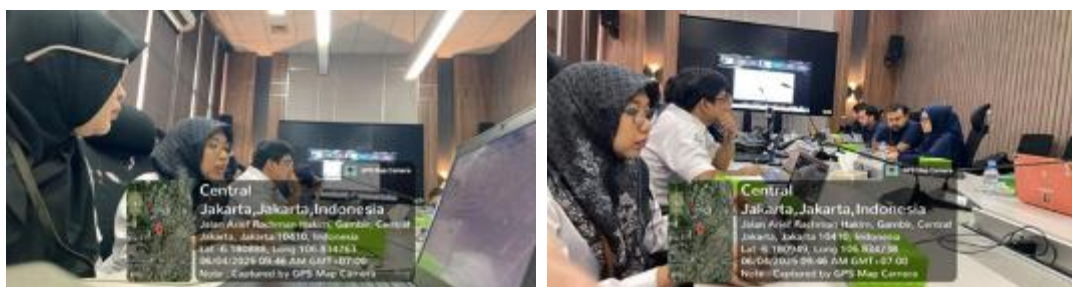
Implementasi Protokol Perubahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Kemitraan Ekonomi (*Indonesia Japan Economic Partnership Agreement*) kepada Setditjen PDSKPK pada tanggal 11 Juni 2025.



Gambar 9. rapat pembahasan penyusunan instrumen hukum dalam kerangka IJEPA

3) Perkembangan perundingan AITIGA SCROO

Ditjen PDSKPK yang diwakili Direktorat Pemasaran telah mengikuti pertemuan Intersesi *AITIGA SC Rules of Origin (ROO) for the 6th AITIGA SCROO* pada tanggal 4-5 Juni 2025 sebagai upaya peningkatan akses pasar di ASEAN dan India. Pertemuan *ASEAN India Free Trade Agreement (AIFTA)* telah diimplementasikan sejak Januari 2010. Saat ini ASEAN dan India sedang melakukan review pembahasan akses pasar dalam *Joint Committee ASEAN India Trade in Goods Agreement (JC AITIGA)*. Pertemuan membahas draft text proposal ASEAN tentang *Draft Operational Certification Procedure Text for AITIGA Review*, diantaranya terkait *article: Proof of origin; Certificate of origin; Back-to-back Proof of Origin; dll.*



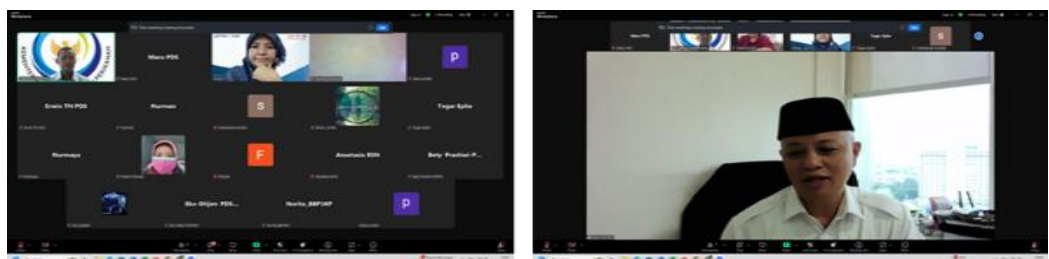
Gambar 10. Intersesi *AITIGA SC Rules of Origin (ROO) for the 6th AITIGA SCROO*

- b. Perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Hasil KP. Persentase rancangan SNI produk perikanan yang memenuhi tahapan perumusan SNI adalah capaian perumusan SNI dibandingkan dengan keseluruhan tahapan perumusan SNI pada tahun berjalan. Tahapan

perumusan Rancangan SNI produk perikanan meliputi RSNI1, RSNI2, RSNI3, penyampaian RSNI ke BSN. Perumusan rancangan SNI dilakukan oleh Komite teknis yang dikelola oleh Direktorat Pengolahan, Ditjen PDSPKP. Tahap penyusunan SNI dimulai dengan Penyusunan Konsep (Perumusan RSNI1), Rapat Teknis (Perumusan RSNI2) dan Rapat Konsensus (Perumusan RSNI3), kemudian tahap jajak pendapat (*e-balloting*) dan jajak pendapat ulang (apabila diperlukan) yang dilakukan di *website* SISPK BSN, dan penetapan SNI oleh BSN. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan II, yaitu:

1) Rapat Koordinasi Penerapan Standar Nasional Indonesia Produk Perikanan

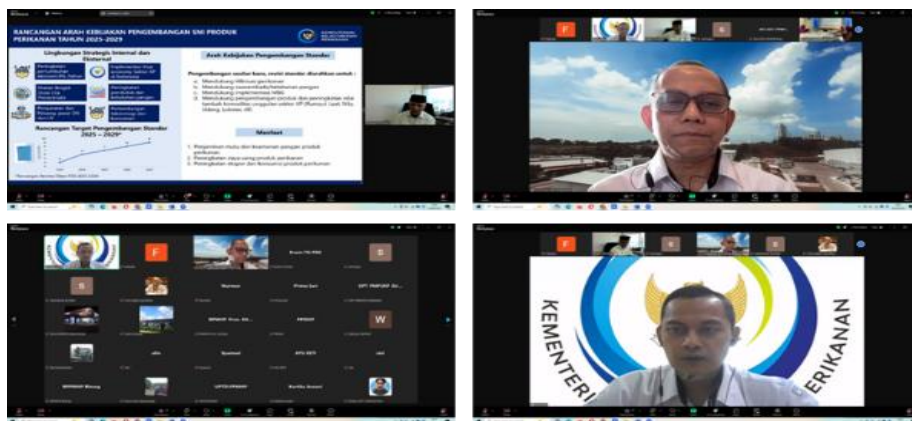
Rapat dilaksanakan pada tanggal 22 April 2025, di ruang rapat Sekretariat Ditjen PDSPKP Lantai 14 GMB III. Rapat dihadiri perwakilan Setditjen PDSPKP, Direktorat Pemasaran, Direktorat Logistik, Direktorat Pemberdayaan Usaha, BBP3KP, Direktur BSN, perwakilan Tim Kerja lingkup Direktorat Pengolahan serta pelaksana Tim Kerja Pengembangan dan Penerapan Standar Direktorat Pengolahan. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah melakukan koordinasi terkait Penerapan Standar Nasional Indonesia dalam upaya mengakselerasi penerapan SNI. Direktorat Pengolahan mempunyai tugas dan fungsi dalam pengembangan dan penerapan standar, terkait tugas tersebut Direktorat Pengolahan mendorong penerapan SNI melalui pembinaan, pendampingan dan fasilitasi penerapan SNI. Diskusi mencakup pentingnya penerapan SNI untuk daya saing dan hilirisasi, keluhan terkait kualitas bahan baku, dan kebutuhan untuk sosialisasi serta biaya pengujian. Direktorat Pengolahan akan meningkatkan kerjasama untuk sertifikasi SNI bagi pelaku usaha mikro dan kecil.



Gambar 11. Koordinasi Penerapan Standar Nasional Indonesia Produk Perikanan

2) Rapat Koordinasi Penerapan Standar Nasional Indonesia Produk Perikanan

Rapat dilaksanakan tanggal 24 April 2025 melalui *zoom meeting*. Rapat dihadiri oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro), perwakilan Pusat Mutu Pasca Panen-BBMHKP, perwakilan Unit Kerja Lingkup Ditjen PDSPKP dan Tim Kerja Lingkup Direktorat Pengolahan. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah melakukan koordinasi dengan LSPro dalam rangka Penerapan Standar Nasional Indonesia khususnya terkait sertifikasi SNI wajib. Rapat ini merupakan tindak lanjut atas masukan dari pelaku penerapan SNI Wajib terkait, Sertifikat Kesesuaian dan SPPT SNI agar tidak perlu dicantumkan ukuran dari produk yang disertifikasi dan penambahan varian ukuran (berat bersih). Pertimbangan dari Direktorat Pengolahan mencakup beberapa poin penting. Sertifikasi SNI adalah untuk produk, dan tanda SNI harus dapat dipertanggungjawabkan. Ukuran berat bersih dicantumkan untuk mengklarifikasi produk yang disertifikasi.

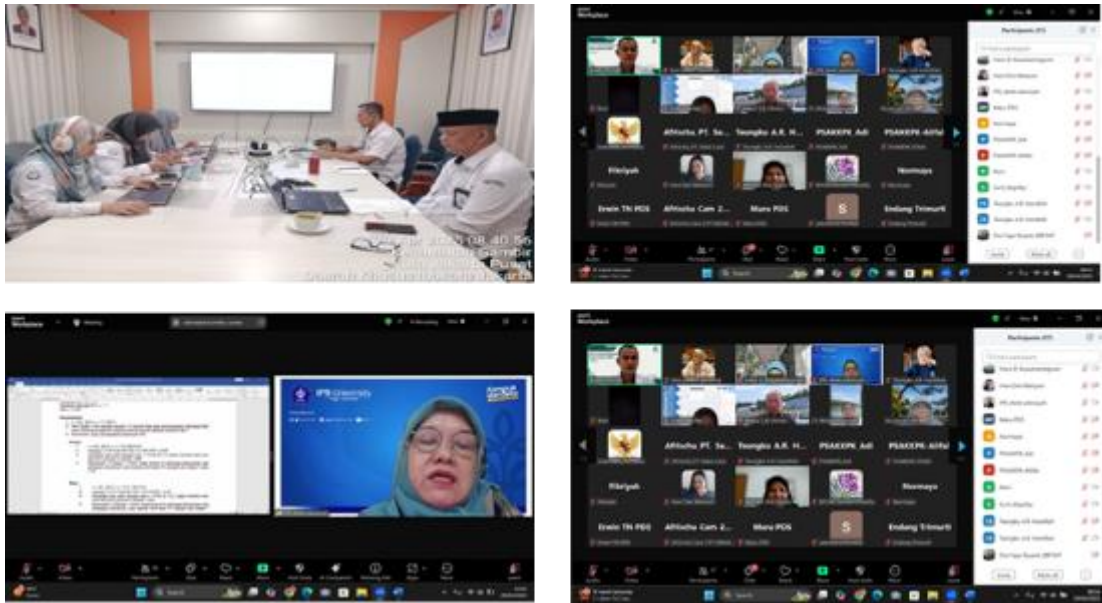


Gambar 12. Rapat Koordinasi Penerapan Standar Nasional Indonesia Produk Perikanan

3) Rapat Teknis Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) 2025

Rapat dilaksanakan secara *hybrid* pada tanggal 29-30 April 2025. Rapat dihadiri sebanyak 26 orang, terdiri dari 10 anggota Komtek 65-05, Konseptor sebanyak 8 orang, Tim Sekretariat Komtek 65-05 sekaligus editor RSNI produk perikanan sebanyak 8 orang dan perwakilan dari Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Penilaian Kesesuaian – BSN, serta Tim Ahli dari GQSP UNIDO. Rapat teknis adalah untuk membahas substansi 4 RSNI Produk Perikanan yaitu, RSNI Pedoman pengujian organoleptik atau sensori pada produk perikanan, RSNI Kerupuk ikan, krustasea, dan

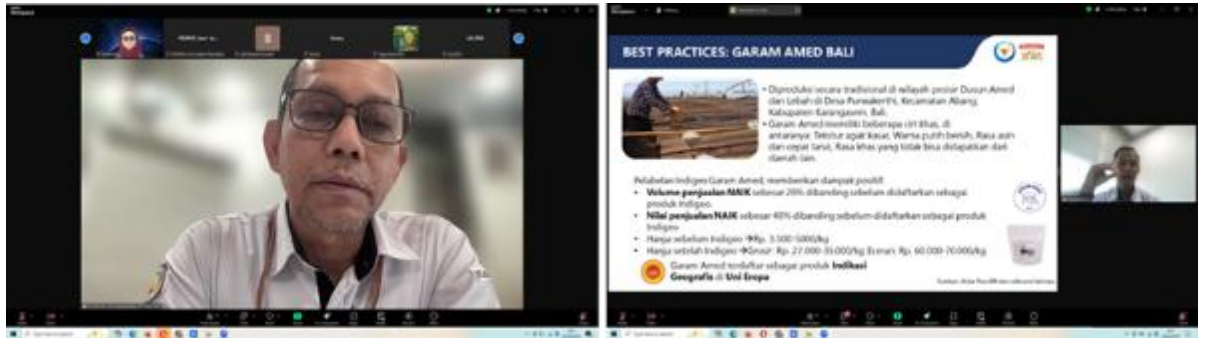
moluska siap makan, RSNI Pempek, dan RSNI Agar-agar kertas. Pada rapat teknis 65-05, membahas konsep RSNI2 berdasarkan data dan literatur.



Gambar 13. Rapat Teknis Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) 2025

4) Rapat Identifikasi Potensi Indikasi Geografis Hasil Kelautan dan Perikanan

Rapat dilaksanakan secara daring pada tanggal 6 Juni 2025. Dihadiri oleh perwakilan Setditjen PDSPKP, Timja Lingkup Dit. Pengolahan, DKP Prov. Maluku Utara, dan DKP Kab. Jayawijaya. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk mengidentifikasi potensi Indikasi Geografis Hasil Kelautan dan Perikanan dan menyampaikan informasi tentang indikasi geografis. Potensi produk indikasi geografis meliputi cacing laut dan cakalang asap dari Maluku Utara serta garam Wamena dari Jayawijaya. Pemerintah daerah diajak untuk mendaftar produk unik. KKP akan mengirim surat ke DKP Daerah untuk proses pendaftaran.



Gambar 14. Rapat Identifikasi Potensi Indikasi Geografis Hasil Kelautan dan Perikanan

5) Rapat Koordinasi Pemantauan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Perikanan

Rapat dilaksanakan secara daring dengan menggunakan aplikasi *zoom* pada tanggal 10 Juni 2025. Dihadiri perwakilan *National Chief Technical Advisor (NCTA) GQSP Indonesia*, *BBP3KP*, Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan (*BPMHP*) Semarang, Tim Kerja Lingkup Direktorat Pengolahan, serta Anggota Tim Kerja Pengembangan dan Penerapan Standr Direktorat Pengolahan. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk memperoleh informasi progres sertifikasi SNI produk Bandeng UMK dari *LSPro* Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Semarang serta langkah tindak lanjut penyelesaiannya. Dalam rangka penerapan SNI produk perikanan, Direktorat Pengolahan bekerjasama dengan *GQSP Indonesia* untuk sertifikasi *UKM*. Pada tahun 2024, ada 5 *UKM* yang difasilitasi sertifikasinya, antara lain:

- a) *UMK Qina Bandeng* mengalami kendala izin edar, batas waktu hingga Oktober 2025.
- b) *Duri Lunak Kharisma* masih dalam proses pendaftaran merek dan banding, batas waktu hingga Oktober 2025.
- c) *Lima Bintang* sudah sertifikasi, tetapi hasil uji ALT tidak memenuhi syarat, batas waktu hingga Oktober 2025.
- d) *CV. New Citra* mengalami kendala hasil uji air dan menunggu hasil uji ulang.
- e) *UD. Putri Laut* sudah selesai sertifikasi dan menunggu penerbitan sertifikat.

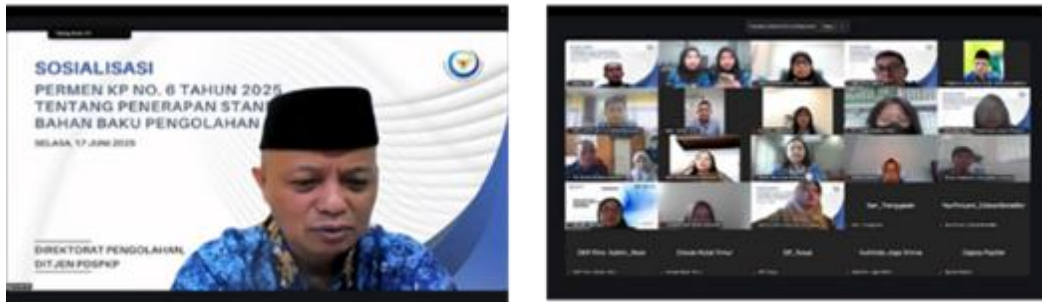


Gambar 15. Rapat Koordinasi Pemantauan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Perikanan

6) Sosialisasi Permen KP Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Penerapan Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan

Kegiatan dilakukan secara daring melalui *zoom meeting* pada tanggal 17 Juni 2025. Kegiatan dihadiri oleh 100 orang peserta *zoom* dan 196 orang peserta *live streaming youtube* yang berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan (AP5I), Asosiasi Pengusaha Pengalengan Ikan Indonesia (APIKI), Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI), Asosiasi Industri Rumput Laut Indonesia (ASTRULI), Asosiasi Pengusaha Bandeng Indonesia (ASPUBI), Asosiasi Pengusaha Catfish Indonesia (APCI), Setditjen Perikanan Budidaya, Setditjen Perikanan Tangkap, Setditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Setditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Direktorat Pemasaran Ditjen PDSPKP, Direktorat Pemberdayaan Usaha Ditjen PDSPKP, Direktorat Logistik Ditjen PDSPKP, Ketua Tim Kerja lingkup Direktorat Pengolahan Ditjen PDSPKP, serta pelaksana Tim Kerja Pengembangan dan Penerapan Standar Direktorat Pengolahan. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk menyebarkan informasi kepada para pemangku kepentingan sektor kelautan dan perikanan atas ditetapkannya Permen KP Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Penerapan Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan. Sosialisasi dibuka oleh Direktur Pengolahan yang menjelaskan peran Ditjen PDSPKP dalam memastikan produk kelautan dan perikanan memenuhi jaminan mutu dan keamanan. Pelaku usaha diharapkan berkomitmen

menggunakan bahan baku yang sesuai dengan standar yang diatur dalam Pasal 85 dan 87 PP 27 Tahun 2021.

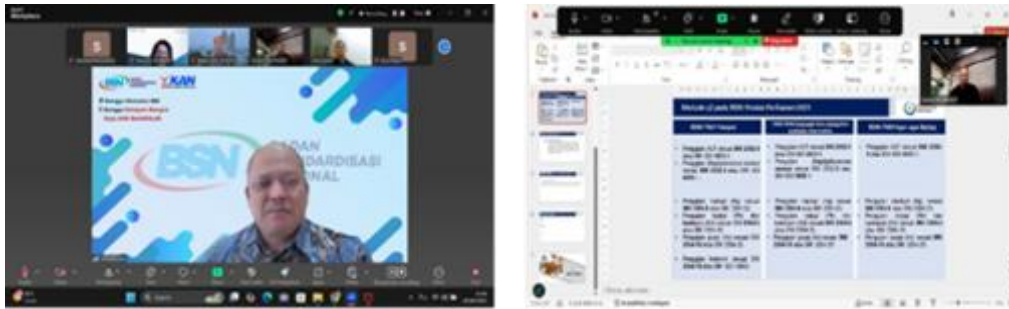


Gambar 16. Sosialisasi Permen KP Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Penerapan Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan

7) Rapat Persiapan Konsensus RSNI3 Produk Perikanan

Rapat dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2025, secara daring menggunakan aplikasi *zoom meeting*. Rapat dihadiri oleh Direktur Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Penilaian Kesesuaian, BSN, perwakilan anggota komtek 65:05 produk perikanan, perwakilan tim konseptor RSNI 65-05 Produk Perikanan, dan Pelaksana pada Tim Kerja Pengembangan dan Penerapan Standar. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk membahas penulisan Metode Uji pada SNI. Pada rapat teknis pada tanggal 29-30 April 2025, dibahas penulisan SNI untuk produk perikanan yang memiliki lebih dari satu metode uji. Sesuai pedoman SNI no 4 Tahun 2023, satu metode acuan harus ditetapkan untuk mengatasi keraguan dalam pengujian. Beberapa pengujian dengan dua metode uji di RSNI produk perikanan 2025 termasuk pempek, kerupuk ikan, dan agar-agar. Beberapa pengujian yang disebutkan adalah pengujian *Staphylococcus aureus*, merkuri, timbal, kadmium, arsen, dan histamin. BSN menyatakan bahwa metode uji alternatif diperbolehkan, namun salah satu harus ditetapkan sebagai acuan, berdasarkan data perbandingan dan kesesuaian dengan standar internasional. Contoh penulisan metode uji yang disepakati adalah pengujian residu pestisida dengan dua metode: EN 15662 atau AOAC 2007. 01. Rapat juga memutuskan bahwa SNI produk dengan beberapa metode akan tetap dituliskan. Usulan untuk menggunakan SNI metode uji khusus sebagai acuan akan dibahas dalam rapat konsensus. Penyusunan RSNI tahun depan akan mempertimbangkan perbandingan hasil uji dengan metode yang akan digunakan. Tindak

lanjutnya, komite teknis akan membahas metode yang dipilih sebagai acuan pada rapat konsensus 24-25 Juni 2025.



Gambar 17. Rapat Persiapan Konsensus RSNI3 Produk Perikanan

8) Rapat Konsensus RSNI Produk Perikanan

Rapat dilaksanakan pada tanggal 24-25 Juni 2025, secara daring menggunakan aplikasi *zoom meeting*. Rapat dihadiri oleh 26 orang terdiri dari 10 anggota Komtek 65-05, sebanyak 8 orang Konseptor dan sebanyak 8 orang sekretariat komtek 65-05 sekaligus editor RSNI produk perikanan serta perwakilan dari Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Penilaian Kesesuaian – BSN. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah membahas dokumen RSNI2 yang telah disusun dan dibahas pada rapat teknis untuk disepakati/konsensus menjadi RSNI3. RSNI Produk Perikanan yang dibahas adalah:

- a) Pedoman pengujian sensori pada hasil perikanan
- b) Kerupuk ikan, krustasea, dan moluska siap makan
- c) Pempek; dan
- d) Agar-agar kertas



Gambar 18. Rapat Konsensus RSNI Produk Perikanan

c. Pembinaan Industri Pengolahan Produk KP. Pembinaan Unit Pengolahan Produk KP menuju penerapan kelayakan pengolahan dan/atau HACCP dilakukan melalui sosialisasi, bimtek, dan atau pembinaan lapangan yang dibuktikan dengan rekomendasi dan/atau manual HACCP dan/atau laporan pembinaan. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan II, yaitu:

1) Penyusunan Kriteria Pembina Mutu HACCP

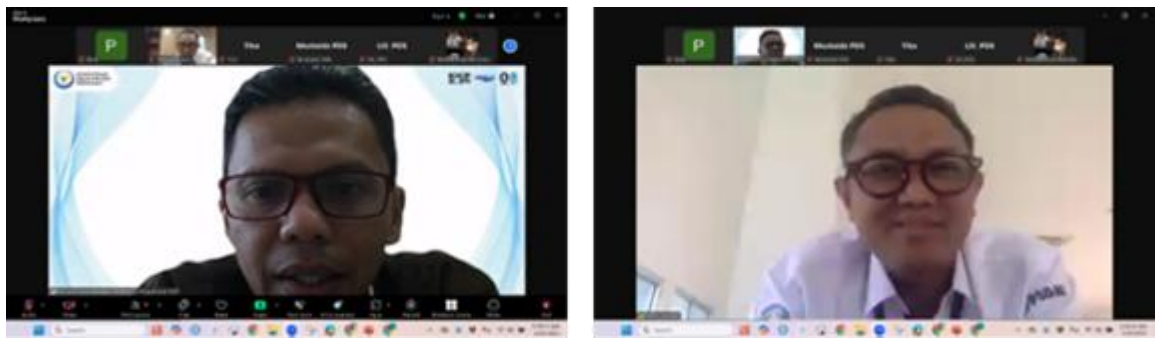
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 22 April 2025, secara daring menggunakan aplikasi *zoom meeting*. Kegiatan dihadiri oleh Tenaga Ahli GQSP UNIDO, perwakilan Setditjen PDSPKP, Pusat Mutu Pascapanen, Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Utama dan perwakilan Timja lingkup Direktorat Pengolahan. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah koordinasi kriteria penetapan Pembina Mutu HACCP sesuai dengan tugas dan fungsi dalam pembinaan HACCP. Direktur Pengolahan menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pembinaan HACCP untuk memfasilitasi ekspor. Saat ini, terdapat 1.065 Pengawasan Makanan (PM) terdaftar di seluruh Indonesia yang memerlukan informasi tentang teknis pembinaan HACCP. Peserta pelatihan yang lulus akan mendapat pelatihan lanjutan untuk menjadi inspektur mutu bersertifikat. Materi pelatihan mencakup program dasar HACCP, keamanan pangan, teknik etika inspektur mutu, dan tata cara audit. Praktek lapangan juga dilakukan, dan peserta yang lulus akan menerima sertifikat kelulusan. Langkah-langkah tindak lanjut termasuk pendataan ulang PM terdaftar, pertemuan berkala dengan Badan Mutu, pelatihan lanjutan, dan pendetailan modul materi pelatihan sudah direncanakan. Peningkatan kapasitas SDM dalam HACCP menjadi fokus untuk mendukung ekspor.



Gambar 19. Pembinaan Industri Pengolahan Produk KP

2) Koordinasi Sistem Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2025, secara secara daring menggunakan aplikasi *zoom meeting*. Kegiatan dihadiri oleh Kepala Balai Diklat Aparatur Sukamandi-BPPSDMKP, perwakilan SDMAO, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi-Setditjen PDSPKP serta perwakilan Timja lingkup Direktorat Pengolahan. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk mendapatkan masukan terkait SOP untuk mendapatkan sertifikasi pelatihan dari BPPSDMKP bagi peserta pelatihan yang dilaksanakan oleh Ditjen PDSPKP. Pelatihan HACCP bagi pembina mutu Direktorat Pengolahan akan dilaksanakan setelah rapat koordinasi mengenai materi, teknis, dan sertifikat pelatihan. Peserta pelatihan non klasik seperti bimtek dan workshop dapat memperoleh sertifikat dari BPPSDMKP jika narasumbernya adalah fasilitator yang sudah mengikuti pelatihan TOT metodologi mengajar dari BDA. Sertifikat pelatihan akan dikeluarkan setelah divalidasi oleh BDA.



Gambar 20. Koordinasi Sistem Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan

3) Training Pembina Mutu *Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)*

Pelaksanaan *training* dilaksanakan selama dua hari, pada tanggal 11-12 Juni 2025 di R.R. Branding, GMB 3, KKP dan secara secara daring menggunakan aplikasi *zoom meeting*. Kegiatan dihadiri oleh Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan lingkup Direktorat Pengolahan, Ditjen PDSPKP. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah meningkatkan kompetensi pengetahuan Pembina Mutu dalam hal pembinaan HACCP pada UPI. Pelatihan berlangsung pada tanggal 11 dan 12 Juni 2025, dihadiri oleh 36 peserta dan perwakilan dari UNIDO serta GQSP Indonesia. Pelatihan ini dibuka oleh Kepala Tim Kerja Pengembangan dan Pembinaan Layanan Kelayakan Pengolahan dan ditujukan untuk membantu pelaku usaha memenuhi standar pasar agar siap untuk sertifikasi. Pada pembukaan, Kepala Mutu Pascapanen menyampaikan pentingnya pembinaan HACCP

yang sesuai dengan inspeksi Badan Mutu, dan kerjasama yang baik antara pembina mutu pusat dan daerah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas ekspor. Direktur Pengolahan menekankan bahwa pelatihan merupakan langkah awal mengikuti struktur organisasi baru dan mendukung program ekonomi biru. Materi pelatihan disampaikan oleh UNIDO dan GQSP Indonesia, yang membahas penerapan HACCP.

4) Rapat Koordinasi Program Pembinaan HACCP

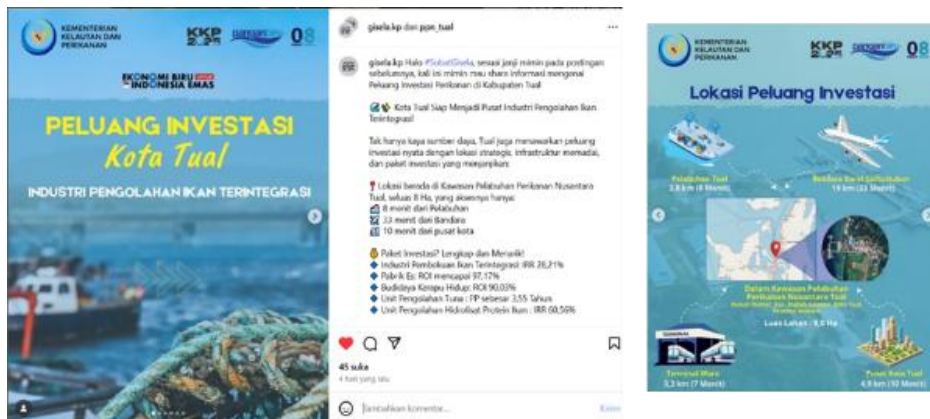
Rapat dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2025 secara daring menggunakan aplikasi *zoom meeting*. Rapat dihadiri oleh perwakilan Setditjen PDSPKP, perwakilan seluruh Direktorat lingkup Ditjen PDSPKP dan seluruh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Tujuan pelaksanaan kegiatan melakukan koordinasi dengan Dinas KP Daerah terkait program pembinaan usaha dalam rangka penerbitan sertifikat HACCP, serta masukan mengenai kendala pembinaan yang terjadi di daerah. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 membagikan kewenangan pelaksanaan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Ditjen Teknis bertanggung jawab atas pembinaan, sedangkan BPPMHKP melakukan kontrol dan pengawasan. Dalam Permen KP No 16 tahun 2024, pembinaan penerbitan sertifikat jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dilakukan oleh Ditjen PDSPKP. Pada 15 Juni 2025, tercatat 3.942 UPI bersertifikasi SKP dan 1.194 UPI bersertifikasi HACCP. Pembina Mutu Daerah perlu memahami lebih dalam tentang pembinaan HACCP. Ditjen PDSPKP telah meminta data pembina mutu pusat dan daerah untuk pemetaan kompetensi PM dalam pembinaan HACCP. Diskusi menunjukkan banyak peserta dari daerah kekurangan PM yang kompeten untuk pembinaan HACCP, sehingga perlu pelatihan. Dinas diharapkan segera mengajukan data PM secara resmi untuk pemetaan dan menentukan metode pelatihan yang tepat. Tidak ada kendala dalam kegiatan pada triwulan II, tetapi kompetensi PM dalam pembinaan HACCP masih terbatas. Rekomendasi dibuat untuk pengusulan data PM agar dapat segera dipetakan.



Gambar 21. Rapat Koordinasi Program Pembinaan HACCP

d. Pelaksanaan Promosi Usaha dan Investasi KP

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai investasi kelautan dan perikanan. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada periode triwulan II antara lain Promosi Potensi dan Peluang Investasi Kota Tual melalui media sosial.



Gambar 14. Promosi Peluang Investasi Pengolahan Tuna Kota Tual

Kota Tual dikenal memiliki berbagai jenis ikan, seperti ikan tuna, cakalang, tongkol, dan ikan-ikan karang lainnya. Selain itu, sumber daya perikanan seperti udang, kepiting, dan rumput laut juga menjadi potensi ekonomi yang menjanjikan. Potensi tersebut tentunya menjadi peluang untuk berinvestasi pada industri pengolahan yang terintegrasi dengan usaha penangkapan sehingga menghasilkan produk perikanan yang bermutu dan bernilai tambah tinggi, serta mampu menembus pasar global. Promosi Potensi dan Peluang Investasi Kota Tual ini merupakan kegiatan mendukung kebijakan KKP dalam program Penangkapan Ikan Terukur di Zona 3. Peluang investasi yang ditawarkan tersebut meliputi industri pembekuan ikan, tuna loin, pengalengan, hidrolisat protein ikan (HPI), kerapu hidup, dan pabrik es.

e. Pembangunan Kawasan Hilirisasi KP

Kawasan Hilirisasi Kelautan dan Perikanan merupakan kawasan pemusatan dan pengelolaan usaha kelautan dan perikanan yang terintegrasi secara sistem bisnis perikanan meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran dalam rangka hilirisasi hasil kelautan dan perikanan. Pada triwulan II tahun 2025, Ditjen PDSPKP melalui Direktorat Pemberdayaan Usaha melanjutkan penyusunan rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kawasan Hilirisasi Hasil Kelautan dan Perikanan. Judul rancangan Rancangan peraturan tersebut yang disepakati yaitu Kawasan Industri Hilirisasi Hasil Kelautan dan Perikanan.

Mengacu pada PP 20 Tahun 2024 tentang perwilayahan industri, Kawasan Industri Hilirisasi Hasil Kelautan dan Perikanan diharuskan menjadi kawasan industri dimana pelaku usaha KP didalamnya memiliki izin usaha industri yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian dan berlokasi di kawasan peruntukan industri. Saat ini, Kementerian Perindustrian sedang menyusun Rancangan Peraturan Menteri tentang Kawasan Industri Tematik Tertentu yang terdiri dari kawasan industri tematik hasil tembakau, hasil kelautan dan perikanan, tekstil dan pakain jadi serta digital.

Direktorat Pemberdayaan Usaha tengah melakukan reformulasi ulang rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kawasan Industri Hilirisasi Hasil Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi KKP dalam pengelolaan kawasan industri tematik tertentu. Selain itu Direktorat Pemberdayaan Usaha juga melakukan koordinasi dan sinergi kegiatan dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam rencana program Kawasan Industri Hilirisasi Hasil Kelautan dan Perikanan serta sinergitas kegiatan hilirisasi.

- f. Pembinaan Pelaku Usaha dalam rangka Penguatan Sistem Logistik dilaksanakan melalui kegiatan Sosialisasi Pembinaan Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB) dan Bimtek Penyusunan Panduan (CDIB) yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2025 dan 20 Mei 2025 melalui *zoom meeting* dengan peserta bimtek adalah supplier yang memasok bahan baku ke UPI yang akan ekspor ke UE yaitu PT. Jaring Aruna Dagang Indonesia Cabang Kotabaru, Rusdiana, Norahman, Hilma Amalia, UD Optimis, Pelaku Usaha Perikanan (Pengadaan Ikan/Supplier) yang berada di Kab./Kota Surabaya, Banyuwangi dan Sragen. Pelaku usaha yang menerapkan CDIB adalah Pelaku Usaha Pengadaan, sortasi & grading dan penyimpanan ikan yang tidak terintegrasi dengan UPI, serta Pelaku Jasa Logistik (Pengangkutan ikan segar, beku, hidup dan kering) kecuali pengangkutan ikan menggunakan Kapal Pengangkut Ikan.



Gambar 22. Sosialisasi CDIB dan Bimtek CDIB

Selain itu dilaksanakan juga sosialisasi Sertifikasi SPDI dan Pendampingan Penyusunan Panduan Mutu dan SKP Bagi Supplier Yang Memasok Bahan Baku ke Unit Pengolahan Ikan Ekspor Tujuan Uni Eropa di Jakarta Utara tanggal 7 Mei 2025. Kegiatan dipimpin oleh Kepala Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen BPPMHKP dihadiri oleh Kepala Balai KIPM Jakarta II, Perwakilan Pusat Mutu Produksi Primer, Perwakilan Pusat Manajemen Mutu, perwakilan dari Ditjen PDSPKP, Perwakilan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Daerah Khusus Jakarta, Perwakilan dari Unit Pengolahan Ikan dan Supplier dengan tujuan ekspor ke Uni Eropa (UE). Bertujuan melakukan Sosialisasi Sertifikasi SPDI dan Pendampingan Penyusunan Panduan Mutu CDIB dan SKP bagi Supplier yang memasok Bahan Baku ke Unit Pengolahan Ikan dengan tujuan Ekspor ke Uni Eropa. Pentingnya pemenuhan standar mutu hasil perikanan oleh KKP sebagai Otoritas Kompeten Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKHP) guna pemenuhan persyaratan internasional dan keberterimaan hasil perikanan di pasar internasional Untuk SPDI sertifikasi diberikan pada pelaku usaha pengadaan ikan, sortasi dan grading ikan, penyimpanan ikan, pelaku jasa logistic (pengangkutan ikan segar, pengangkutan ikan beku, pengangkutan ikan hidup, pengangkutan ikan kering). dan juga dilaksanakan kegiatan Simulasi Penilaian Penerapan Cara Distribusi Ikan yang Baik (CDIB) di Wisma Glacillaria tanggal 9 Mei 2025. Dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan, sebagai upaya mempertahankan mutu dan keamanan hasil perikanan selama Distribusi Ikan. Dan dilatar belakang untuk menindaklanjuti surat permohonan penilaian penerapan CDIB dari CV. Nuraeni dan UD. Optimis tanggal 29 April 2025. Dalam kegiatan ini dilakukan pengamatan penerapan CDIB secara online (Remote Assesment) menggunakan video unit usaha distribusi ikan (supplier) yg telah dikirimkan oleh CV. Nuraeni Kab. Barru Provinsi Sulawesi Selatan, UD. Optimis di Kab. Tulang Bawang Provinsi Lampung, serta unit usaha distribusi ikan dari Provinsi Kalimantan Selatan (Supplier Rusdiana, Nurrohman dan

Hilma). Simulasi penilaian penerapan CDIB menggunakan checklist penilaian sesuai dengan permen KP no. 9 tahun 2024 tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan.



Gambar 23. Sosialisasi Sertifikasi SPDI dan Simulasi CDIB

- g. Implementasi Sistem Telusur Logistik Ikan Nasional (STELINA) melalui kegiatan diantaranya persiapan pertemuan *Kick-Off Event Stelina Gdst Project* yang didukung bersama AP2HI (Asosiasi Perikanan Pole and Line dan Handline Indonesia). Kegiatan dilaksanakan secara *online* pada tanggal 20 Mei 2025 dibuka oleh Sesditjen PDSPKP dan dipimpin oleh Direktur Logistik, Ketua AP2HI dan Tim, *Huw Thomas Executive Director* GDST, Katimja Pemantauan, Katimja Kerjasama dan Humas, perwakilan lintas eselon 2 lingkup Ditjen PDSPKP, Biro HKLN, Pusdatin, dan Timja Pemantauan. Pada kegiatan ini membahas *concept notes* untuk pelaksanaan kegiatan *kick off* dimulainya proses pemenuhan STELINA versi baru sebagai sistem yang akan kompatibel dengan standar internasional GDST (*Global Dialogue on Seafood Traceability*), serta menjajaki dukungan dan koordinasi lintas pemangku kepentingan. STELINA akan menjadi *platform* telusur resmi nasional yang harus mampu mengadopsi standar internasional, terutama GDST. Sistem ini akan mendukung ketelusuran dan transparansi produk Indonesia di pasar global. Koordinasi Internal KKP untuk memperkuat sinergi antar-unit di dalam KKP, khususnya Pusdatin dan BH-KLN, agar sistem ini dapat operasional secara menyeluruh serta penting untuk menyusun *roadmap* implementasi sistem agar dapat dilaporkan sebagai proyek strategis.

Day Zero Kick-off Event STELINA Pada Shrimp Summit Bali dilaksanakan tanggal 22 Juni 2025 di Bali berkolaborasi dengan *Global Dialogue on Seafood Traceability* (GDST) dengan tujuan memperkuat interoperabilitas sistem ketertelusuran nasional dengan standar

internasional GDST dalam mewujudkan sistem pelacakan hulu-hilir ikan secara digital di Indonesia. Penerapan dan adopsi standar GDST pada STELINA adalah langkah tindak lanjut amanah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.32 Tahun 2024 tentang Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional, bertujuan untuk memastikan kompatibilitas dan kredibilitas sistem ketertelusuran ikan nasional dan meningkatkan efisiensi logistik pada rantai pasok. Beberapa manfaat strategis yang diperoleh untuk KKP dan industri perikanan Indonesia, antara lain:

- 1) Mewujudkan integrasi sistem ketertelusuran secara sistemik, akurat, terbuka dan efisien sehingga data dari berbagai platform (swasta dan publik) dapat saling terhubung
- 2) Meningkatkan kepercayaan (trust) pasar global, khususnya negara-negara yang mensyaratkan pelacakan berbasis digital dan auditabilitas data (AS,UE, Jepang).
- 3) Memperkuat sistem pelaporan untuk memastikan produk bebas IUU Fishing dan mematuhi prinsip keberlanjutan.
- 4) Memfasilitasi pemasaran hasil perikanan Indonesia di tingkat internasional dengan mengurangi risiko hambatan teknis (non-tariff barrier) dengan kesesuaian traceability standar global.
- 5) Mendukung efisiensi operasional logistik ikan dengan pengurangan beban verifikasi manual dan audit di setiap titik rantai pasok.

Hasil diskusi panel dalam Kick-off Event digunakan untuk memperkuat STELINA dalam menjembatani digitalisasi industri perikanan dan memberikan solusi interoperabilitas yang kompatibel.

selain itu dilaksanakan bimbingan dan pendampingan teknis pengisian STELINA bersama group PT Bumi Menara Internusa (BMI) sebagai tindak lanjut dari permintaan pelaku usaha kepada admin STELINA tanggal 30 Juni 2025 melalui *online*. Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam menginput dan mengelola data STELINA secara mandiri.



Gambar 24. Kegiatan Day Zero Kick-off Event STELINA dan Bimtek

h. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Rantai Pasok melalui kegiatan harmonisasi Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Pangan. Dilaksanakan secara daring pada tanggal 4 Juni 2025 Pertemuan dipandu oleh Bapak Manzila Falah Zizil dari Direktorat Perundang-undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia, dengan narasumber utama yaitu Direktur Distribusi Cadangan Pangan. Dihadiri Perwakilan Kementerian Hukum RI, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kepala Biro Hukum KKP, Setditjen PDSPKP dan Direktorat Logistik) dan Badan Pangan Nasional. Tujuan rapat dalam rangka harmonisasi rancangan peraturan Badan Pangan Nasional tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Pangan, yang merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2015. Dalam kegiatan ini dibahas antara lain : isi dan struktur peraturan, terutama terkait dengan klasifikasi pelaku usaha (mengganti istilah penyalur pertama, penyalur kedua, penyalur pengecer menjadi produsen, distributor dan pengecer), penjelasan tentang pengelolaan sistem distribusi pangan yang meliputi pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, dan pemberian insentif. Dan mengidentifikasi dan mengumpulkan NSPK yang sudah ada dan menjadi lampiran Peraturan yang berisi rincian terkait pengelolaan distribusi.

Selain itu dilaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Pangan Nasional Tahun 2025-2029 dilaksanakan di Ruang Rapat Biro Hukum, GMB IV lantai 3B pada tanggal 16 Juni 2025. Dipimpin oleh Kepala Biro Hukum dan dihadiri oleh perwakilan Eselon I lingkup KKP dan merupakan tindak lanjut dari hasil rapat panitia antar kementerian dan/atau antar non kementerian penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Pangan Nasional Tahun 2025-2029 dengan agenda pembahasan masukan lingkup KKP.



Gambar 25. Harmonisasi Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional

Penyusunan Perpres merupakan amanat dari Undang-undang Pangan nomor 18 tahun 2012 khususnya di Pasal 8 -10

Tercapainya target ekspor produk perikanan pada triwulan-II 2025, salah satunya didukung dengan peningkatan *demand* produk perikanan Indonesia pasar internasional, khususnya pada komoditas unggulan seperti udang dan Tuna-Cakalang-Tongkol (TCT). Bertambahnya jumlah *buyer* juga semakin memperluas jangkauan distribusi global produk perikanan Indonesia, dan membuka peluang pasar baru untuk produk *value-added* yang beragam.

Selain itu, berbagai upaya promosi untuk produk perikanan komoditas unggulan juga terus dilakukan, antara lain melalui diseminasi profil dan booklet informasi produk, serta partisipasi aktif KKKP bersama pelaku usaha dalam berbagai pameran dagang di dalam dan luar negeri.

Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya sebesar Rp2.062.995.000,- sampai dengan periode triwulan I tahun 2025 telah direalisasikan sebesar Rp610.206.000,- atau setara dengan 29,58%.

B. Nilai Pemasaran Produk Perikanan Dalam Negeri

Nilai pemasaran produk perikanan dalam negeri merupakan total nilai yang dihasilkan dari serapan produk perikanan dalam rumah tangga nasional. Penghitungan nilai pemasaran produk perikanan dalam negeri menggunakan basis data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik yang diperoleh 1 (satu) tahun setelah tahun berjalan, sehingga capaian yang dihasilkan merupakan angka prognosa.

Tabel 6. Ikhtisar Pencapaian Nilai Pemasaran Produk Perikanan Dalam Negeri

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	Tahun 2025	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	S.d TW II 2025			TW I 2025	TW II 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nilai Pemasaran Produk Perikanan Dalam Negeri (Rp Triliun)	-	-	-	310,51	-	-	-	-	-	-	-	-

Nilai pemasaran produk perikanan dalam negeri tahun 2025 ditargetkan mencapai Rp310,51 triliun. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang bersifat tahunan, dan capaiannya akan diukur pada akhir tahun 2025. Indikator ini juga merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 yang merupakan tahun pertama periode Renstra 2025-2029. Oleh karena itu capaiannya belum dapat dibandingkan baik dengan capaian pada triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maupun dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

- a. Pelaksanaan Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan). Perluasan Safari Gemarikan adalah Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kandungan gizi ikan bagi kesehatan, meningkatkan minat masyarakat untuk mengkonsumsi ikan, mendukung program prioritas nasional percepatan penurunan stunting dan gizi buruk, mempromosikan produk perikanan sebagai makanan kaya gizi dan protein serta menyerap produksi ikan/olahan ikan pada UMKM setempat serta pemenuhan gizi masyarakat. Pada kegiatan ini juga dilakukan distribusi Paket Gemarikan dengan tujuan untuk mengenalkan ragam produk olahan ikan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat dalam tingkatan semua usia dan mengenalkan produk UMKM dan menjadi sumber pendapatan untuk UMKM setempat. Telah dilaksanakannya kegiatan promosi kampanye Gemarikan di beberapa daerah pada Triwulan II Tahun 2025, meliputi Kabupaten Banyuasin, Kota Palembang, serta Kota Sorong Barat yang mencakup Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi, Kelurahan Klabala Distrik Sorong Kota, dan Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat



Gambar 26. Pelaksanaan Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)

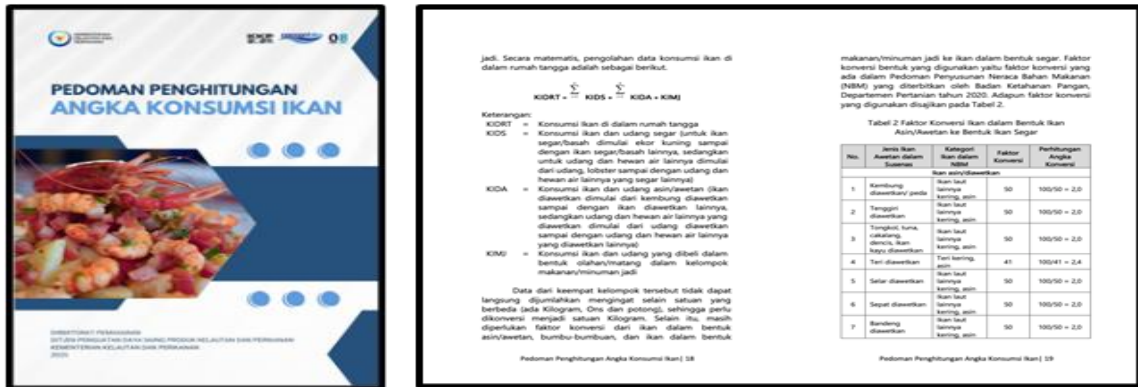
- b. Penyediaan Peralatan Pemasaran. Peralatan pemasaran merupakan Bantuan Pemerintah langsung kepada masyarakat dalam hal ini koperasi/keompok perikanan berupa *cool box* guna mendukung distribusi dan pemasaran hasil perikanan. Adapun Kegiatan yang telah dilakukan di Triwulan II yaitu telah dilaksanakan pembahasan Penyaluran Peralatan Pemasaran Coolbox Tahun 2025 pada tanggal 10 Juni 2025 untuk mempercepat koordinasi proposal yang akan di serahkan dan menetapkan lokasi distribusi yang beririsan pada sasaran kebijakan Pemerintah Pusat terkait Program Kampung Desa Merah Putih



Gambar 27. Pembahasan Penyaluran Peralatan Pemasaran 2025

- c. Penyusunan Profil Pasar Dalam Negeri Hasil Kelautan Perikanan. Penyusunan profil pasar dalam negeri hasil kelautan perikanan dalam rangka mendukung kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdiri dari kegiatan penghitungan angka konsumsi ikan, penghitungan nilai pemasaran produk perikanan dalam negeri, serta penghitungan data dan informasi lainnya. Kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan II tahun 2025, yaitu:

- 1) Penyusunan buku Pedoman Penghitungan Angka Konsumsi Ikan. Pedoman ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam memilih sumber data dan metode penghitungan angka konsumsi ikan (AKI) tahun 2024.



Gambar 28. Penyusunan Profil Pasar Dalam Negeri Hasil Kelautan Perikanan

- 2) Pelaksanaan *Workshop* Penghitungan AKI Tahun 2024 pada tanggal 22-24 April 2025 secara *hybrid*. *Workshop* dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Pemetaan dan Akses Pasar Dalam Negeri, serta dihadiri oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) di 38 Provinsi, perwakilan dinas kabupaten/kota yang membidangi perikanan, perwakilan eselon II lingkup PDS, serta perwakilan tim kerja lingkup Direktorat Pemasaran. *Workshop* ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan metode penghitungan AKI Tahun 2024, serta sosialisasi metode penghitungan AKI Tertimbang yang akan diterapkan dalam penghitungan AKI Tahun 2025. Pada kegiatan *workshop* dilakukan penghitungan konsumsi ikan di dalam rumah tangga berdasarkan data Susenas BPS. Selanjutnya, DKP Provinsi melakukan penghitungan konsumsi ikan di luar rumah tangga dan konsumsi ikan tidak tercatat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta dientri pada *Tools Neng Geulis* sehingga diperoleh nilai angka konsumsi ikan total di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Entri data tersebut dilaksanakan paling lambat pada tanggal 9 Mei 2025 dengan menyertakan surat resmi



Gambar 29. Workshop Penghitungan AKI Tahun 2024

- d. Kurasi Produk Kelautan Perikanan. Kegiatan Kurasi Produk Perikanan TW II Tahun 2025 dilaksanakan pada wilayah Kota Jakarta Utara, Kota Mojokerto, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Karawang, Kota Tangerang Selatan, Kota Sabang, Kota Jakarta Selatan, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Pematang Jaya. Jumlah UMKM yang telah dikurasi pada TW II Tahun 2025 yaitu sebanyak 58 UMKM. Sebagai gambaran pelaksanaan kurasi, UMKM dan Dinas mendengarkan paparan terkait Kurasi Produk Kelautan dan Perikanan dalam bentuk Sosialisasi. Kurasi Produk UMKM adalah proses menjaga nilai serta mengelola produk UMKM untuk dapat dikembangkan atau dilestarikan dikemudian hari. Dalam mengolah produk UMKM agar memiliki sebuah nilai, diperlukan sebuah standar yang sama satu dengan yang lainnya. Hal ini memudahkan dalam menyeleksi sebuah produk.
- e. Penyusunan Profil Industri Pengolahan Hasil Perikanan. Produksi Olahan KP adalah volume produk olahan hasil perikanan yang dihasilkan oleh unit pengolahan ikan skala mikro, kecil (MK) dan skala menengah besar (MB). Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan II tahun 2025, yaitu:
- 1) Finalisasi Populasi UPI Menengah Besar dalam rangka Penghitungan VPO Tahun 2025
 - a) Rapat Finalisasi Populasi UPI Menengah Besar

Rapat dilaksanakan pada tanggal 30 April 2025, dipimpin oleh Katimja PUP2MB dan dihadiri oleh perwakilan Pusdatin, Direktorat Pemberdayaan Usaha, Timja Data dan Layanan Publik Sekretariat Ditjen PDSPKP serta perwakilan Timja lingkup Direktorat Pengolahan. Rapat ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang Unit Pengolahan Ikan (UPI) sesuai data dari rapat sebelumnya dengan Kementerian Perindustrian dan BPS. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2025 terdapat 1.527 UPI MB, meningkat 47 dari tahun sebelumnya. Perwakilan Pusdatin menjelaskan bahwa mereka tidak melakukan pendataan untuk UPI MB, data berasal dari Ditjen PDSPKP. Saat ini terdapat 433.518 pelaku usaha perikanan, namun masih ada yang belum teridentifikasi. Informasi dari BPS terkait Sensus Ekonomi 2026 akan diinformasikan kemudian. Data UPI dipetakan berdasarkan skala usaha.



Gambar 30. Rapat Finalisasi Populasi UPI Menengah Besar

b) Rapat Lanjutan Dalam Rangka Finalisasi Populasi UPI Menengah Besar

Rapat dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2025. Rapat dipimpin oleh Penanggungjawab Output Menengah Besar dan dihadiri oleh perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat, perwakilan Timja Data dan Layanan Publik Sekretariat Ditjen PDSPKP, dan perwakilan Timja lingkup Direktorat Pengolahan. Tujuan dilaksanakannya rapat adalah memperoleh informasi UPI yang belum dapat diidentifikasi apakah masuk dalam kategori UPI skala menengah besar, sehingga jumlah populasi dalam rangka pendataan volume produk olahan dan tingkat utilitas Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala menengah besar tahun 2025 dapat ditentukan. Informasi yang diperoleh dari diskusi tersebut antara lain:

- CV Arafura Fishing Industries adalah perusahaan skala menengah dengan 32 tenaga kerja dan kapasitas 40 ton.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tenggara tidak memiliki informasi tentang PT. Dwi Satya Sejahtera Kendari, tetapi ditemukan bahwa mereka bermitra dengan PT. Bersatu Untuk Maju.
- PT. Chamin dikategorikan sebagai UPI skala kecil dan CV Agarsari Jaya memproduksi tepung ikan.
- Phonix Food termasuk usaha skala kecil dan memiliki bidang usaha lain di luar perikanan.

2) Pembahasan Juknis Pendataan Subbab Volume Produk Olahan Skala Menengah Besar

Rapat pembahasan dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2025 secara daring sebagai lanjutan dari rapat Timja Data dan Layanan Publik pada 12 Juni 2025. Masing-masing unit diminta memberikan masukan terhadap *draft* pedoman pendataan sebelum diserahkan ke Bagian Hukum. Pedoman Pendataan Satudata bidang PDSPKP mencakup pendataan Volume Produk Olahan, Gudang Beku dan Stok Ikan, Harga Ikan eceran, dan UPHPN. Pendataan VPO dibagi menjadi skala mikro kecil dan menengah besar. Pengumpulan data dilakukan dengan data primer dan sekunder. Responden yang dipilih adalah UPI MB yang memenuhi kriteria tertentu, seperti aktivitas ekspor rutin. Sebagai tindak lanjut, perlu disiapkan pedoman penghitungan volume produk olahan UPI Menengah Besar.



Gambar 31. Pembahasan Juknis Pendataan Subbab Volume Produk Olahan Skala Menengah Besar

3) Diskusi Penyusunan Pedoman Penghitungan Volume Produk Olahan (VPO) dan Utilitas pada Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Menengah Besar (MB)

Diskusi penyusunan Pedoman Penghitungan VPO UPI MB dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2024 setelah rapat tentang Juknis pendataan VPO UPI MB pada 13 Juni 2024. Tujuan penyusunan pedoman adalah untuk memandu petugas data dan tim analisa data dalam penghitungan produktivitas unit pengolahan ikan skala menengah besar. Dasar hukum pelaksanaan Penghitungan Utilitas dan Volume Produk Olahan mencakup beberapa peraturan pemerintah serta keputusan menteri terkait pengolahan ikan. Penghitungan ini dilakukan setiap tahun di seluruh provinsi di Indonesia yang memiliki UPI MB melalui pendataan utilitas dan volume produk olahan. Data diperoleh dari badan terkait dan petugas data di unit pengolahan menggunakan kuesioner tertentu. VPO UPI MB adalah total volume produk dari setiap UPI dalam satu tahun. Metode pengolahan data utilitas mencakup

penghitungan kapasitas terpasang, volume produksi, utilitas setiap UPI, dan rata-rata utilitas dari aktivitas pengolahan. Rumus tertentu digunakan dalam penghitungan utilitas.



Gambar 32. Diskusi Penyusunan Pedoman Penghitungan Volume Produk Olahan (VPO) dan Utilitas pada Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Menengah Besar (MB)

4) Penetapan Populasi VPO dan *Cleansing Data*

Rapat tentang penetapan populasi VPO UPI MB dan pembersihan data dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2025. Rapat ini melibatkan perwakilan dari Bagian Data dan Layanan Publik Ditjen PDSPKP serta Timja dari Direktorat Pengolahan. Tujuan rapat adalah untuk menentukan kerangka sampel untuk penghitungan VPO UPI MB dan menetapkan populasi UPI MB Tahun 2025 sebanyak 1.520 UPI. *Cleansing data* dilakukan pada 30.000 data lalu lintas domestik untuk mengklasifikasikan komoditas ke dalam 13 jenis kegiatan pengolahan ikan. Sekitar 2.000 data tidak dapat diidentifikasi karena kurang dukungan informasi. Dalam rapat ini, beberapa kesepakatan dicapai, termasuk cara mengelompokkan jenis olahan berdasarkan moda transportasi dan jenis produk. Kesimpulan rapat menyatakan bahwa populasi UPI MB adalah 1.520 UPI dan pembersihan data lanjutan diperlukan.



Gambar 33. Penetapan Populasi VPO dan Cleansing Data

5) Validasi Nasional Data PDSPKP Semester II 2024

Pelaksanaan Validasi Nasional Data PDSPKP Semester II 2024 dilaksanakan pada tanggal 15-17 April 2025 di R.R Branding GMB III Lt.15 Gambir Jakarta Pusat. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan Validator Pusat, Validator Provinsi, Validator Kab/kota, Enumerator, Dit. Logistik, Dit. Pengolahan, Dit.Pemasaran, dan Dit. Pemberdayaan Usaha dan BBP3KP, serta pelaksana lingkup Tim Kerja Data dan Layanan Publik. Kegiatan dilaksanakan secara *hybrid* dengan peserta *offline* dari Validator Pusat dan Pusdatin. Peserta *online* terdiri dari validator provinsi dan validator kab/kota. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah Verifikasi dan validasi data statistik kelautan dan perikanan bidang PDSPKP tahun 2024. Narasumber dari Universitas Padjajaran menjelaskan tata cara pengolahan data volume produk olahan untuk skala mikro dan kecil. Rekomendasi termasuk memisahkan sampel berdasarkan skala dan melengkapi database UPI sesuai omset atau kapasitas. Pada Tahun 2024, Semester 1 tercatat 446 Lembar Kerja (LK), dengan 401 LK valid, dan pada Semester 2 turun menjadi 423 LK. Provinsi dengan jumlah LK valid tertinggi di Semester 1 adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, namun terjadi penurunan di Jawa Timur dan Jawa Barat pada Semester II. Konsistensi dan kualitas data menjadi tantangan utama. Kegiatan validasi nasional direncanakan di akhir April atau awal Mei 2025.

6) Pembahasan Finalisasi Penghitungan VPO Tahun 2024

Kegiatan pembahasan finalisasi penghitungan VPO Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2025 pukul 13.00 WIB hingga selesai secara luring di Ruang Rapat Lounge, Gedung Mina Bahari 3 Lantai 13 dan secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan setditjen PDSPKP, Pusat Data Statistik dan Informasi KKP, Tim Kerja Data dan Layanan Publik Setditjen PDSPKP, Tim Kerja Lingkup Direktorat Pengolahan, Koordinator Data Direktorat Pengolahan, Tenaga Ahli Universitas Padjadjaran, dan Anggota Tim Kerja PUP2MK Direktorat Pengolahan. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah finalisasi penghitungan VPO Tahun 2024 dan koordinasi pendataan Tahun 2025. Perkembangan pendataan 2025 menunjukkan populasi UPI MK sebesar 76.318. Beberapa daerah belum mengirimkan usulan petugas pendataan. Pedoman pendataan untuk PDSPKP 2025 sedang difinalisasi, bersama dengan kerangka sampling, kecuali untuk DKI Jakarta dan D. I. Yogyakarta. *Workshop* PortalData direncanakan pada minggu kedua Juli 2025 untuk menyelesaikan proses pendataan. Penghitungan VPO 2024 mencapai prognosa 5,014

juta, tetapi perlu pembaruan data. Data pencilan harus dikoreksi, dan koordinasi untuk kerangka sampling harus dilakukan sebelum rapat berikutnya.

f. Penyediaan Sarana Sistem Rantai Dingin Hasil KP.

Dalam rangka mengoptimalkan penerapan sistem rantai dingin, meningkatkan nilai tambah produk perikanan, serta mendukung pencapaian produksi olahan hasil kelautan dan perikanan, khususnya bagi pelaku UMK Pengolahan, pada tahun 2025 Direktorat Pengolahan memfasilitasi pemberian Bantuan Pemerintah berupa chest freezer. Pada Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana triwulan I, kegiatan masih berfokus pada tahap persiapan pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah seperti kegiatan penyusunan dokumen pendukung dan koordinasi lintas unit kerja.

Sebagai upaya penyiapan pelaksanaan kegiatan pengadaan Bantuan Pemerintah (BP) berupa Chest Freezer (CF) Tahun Anggaran 2025, Dit. Pengolahan telah melaksanakan serangkaian kegiatan pendukung selama Triwulan II, yaitu :

1) Sosialisasi Bantuan Pemerintah.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2025 secara hybrid bertempat di R. Rapat Tuna GMB IV dan melalui aplikasi *zoom* melalui kegiatan sosialisasi Bantuan Pemerintah KKP. Peserta kegiatan adalah dari semua unit kerja KKP yang akan melaksanakan BP dan para *stakeholders*/mitra. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan untuk menyampaikan kebijakan, mekanisme, dan ketentuan teknis pelaksanaan kegiatan pengadaan chest freezer. Sosialisasi ini penting untuk memastikan seluruh pihak memahami persyaratan, prosedur, dan tahapan yang harus dipenuhi, khususnya terkait usulan calon penerima bantuan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan *stakeholder*/mitra dapat lebih proaktif dalam menyiapkan dokumen dan usulan kelompok penerima yang sesuai kriteria. Selain itu, sosialisasi juga menjadi upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pelaksanaan program di lapangan.

2) Pencermatan pada e-Katalog Versi 6

Sebagai tindak lanjut penyusunan spesifikasi teknis, Dit. Pengolahan juga melakukan pencermatan atau penelusuran pada e-Katalog versi 6 untuk memastikan ketersediaan produk CF yang sesuai. Kegiatan ini dilakukan untuk memetakan variasi produk, harga, penyedia, dan spesifikasi yang tersedia di e-Katalog. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal

20 Juni 2025 secara daring dan dihadiri oleh Tim Teknis dan pelaksana di lingkup Timja Prasarana dan Sarana Penanganan dan Pengolahan.

Pencermatan ini penting untuk mengantisipasi potensi kendala teknis, seperti ketidaktersediaan produk atau ketidaksesuaian spesifikasi, sehingga proses pengadaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Dari hasil pencermatan, per tanggal 20 Juni 2025 di e katalog versi 6 sudah terdapat 16 penyedia yang menawarkan spek CF sesuai dengan kebutuhan Chest Freezer Dit. Pengolahan.

3) Rapat Pelaksanaan Pengadaan Chest Freezer melalui Mekanisme E Katalog versi 6

Rapat dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2025 secara luring di R. Rapat Lounge Ditjen PDSPKP, dihadiri oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dit. Pengolahan, Auditor Itjen 4 KKP, perwakilan dari Biro PBJ KKP, Setditjen PDSPKP dan Timja lingkup Dit. Pengolahan. Rapat bertujuan untuk mempersiapkan penggunaan E-Katalog Versi 6. Dari hasil diskusi diperoleh informasi sebagai berikut :

- mengacu pada Perpres PBJ Nomor 46/2025, mekanisme pengadaan B/J diutamakan melalui e-purchasing, baru mekanisme lainnya, mekanisme tender digunakan sebagai alternatif pilihan terakhir dalam pengadaan B/J;
- pada tahun 2025 mulai digunakan e-katalog versi 6. Versi 5 sudah tidak bisa diakses;
- secara umum, Versi 6 lebih *user friendly*;
- Proses pembayaran sudah masuk di aplikasi versi 6, karenanya PPK dan bendahara pengeluaran harus membuat akun pada laman katalog.inaproc.id, dimana untuk hal ini harus memakai alamat email pribadi;
- mini Kompetisi (Mini Competition / Mi-Con) dan pemilihan langsung penyedia dalam e-katalog dimungkinkan dan merupakan sama-sama opsi yang bisa dipilih oleh PPK/Pejabat pengadaan dengan didasari oleh justifikasi. Meskipun demikian, mi-con lebih disarankan untuk dipilih karena berdasarkan pengalaman, harga yang didapatkan biasanya lebih murah dan lebih transparan;

Memperhatikan hasil rapat tersebut, tindak lanjut yang akan dilakukan adalah Koordinasi dengan Setditjen PDSPKP terkait hasil revisi RKAK dan Koordinasi dengan para mitra kerja untuk segera mengusulkan calon penerima BP CF.

Pada pelaksanaan kegiatan di Triwulan II, terdapat beberapa kendala yang perlu diantisipasi agar tidak berdampak signifikan terhadap capaian kinerja Dit. Pengolahan,

antara lain: Proses Revisi Anggaran yang Masih Berjalan dan Usulan Kelompok Penerima yang masih berproses di mitra. Untuk Faktor Keberhasilan Pelaksanaan Pengadaan BP CF dan PP pada Triwulan II Tahun 2025 antara lain adalah : Ketersediaan Produk di e-Katalog yang Sesuai Spesifikasi, dan koordinasi antar unit di internal Dit. Pengolahan, dengan mitra, serta pihak terkait lainnya berjalan lancar untuk menyelesaikan kendala yang muncul.

Sebagai tindak lanjut untuk Triwulan III, Direktorat Pengolahan akan melaksanakan langkah-langkah diantaranya proses pengadaan barang melalui e-Katalog versi terbaru, penetapan penerima manfaat dan jadwal distribusi bantuan; dan koordinasi lanjutan dengan unit terkait untuk percepatan realisasi

g. Penyediaan Sarana Pengolahan Hasil KP. Pada Triwulan II tahun 2025

Sebagaimana kegiatan penyediaan sarana sistem rantai dingin, kegiatan penyediaan sarana pengolahan masih dalam tahap perencanaan dan persiapan awal serta belum ada pelaksanaan fisik pengadaan maupun penyaluran bantuan. Untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan, serta mendukung pencapaian produksi olahan hasil kelautan dan perikanan, khususnya bagi pelaku UMK Pengolahan, pada tahun 2025 Direktorat Pengolahan memfasilitasi pemberian Bantuan Pemerintah berupa peralatan pengolahan. Pemberian bantuan ini sejalan dengan upaya untuk memperkuat kapasitas produksi dan menjaga mutu produk olahan, yang pada akhirnya bertujuan meningkatkan daya saing pelaku usaha pengolahan di tingkat lokal maupun nasional. Melalui dukungan sarana tersebut, diharapkan para pelaku pengolahan, utamanya UPI pengolahan skala mikro dan kecil dapat lebih optimal dalam menerapkan standar kualitas, memperpanjang masa simpan produk, serta meningkatkan efisiensi proses produksi.

Pada Triwulan II Tahun 2025 kegiatannya berupa kegiatan penyusunan dokumen pendukung dan koordinasi lintas unit kerja. Sebagai upaya percepatan dan penyiapan pelaksanaan kegiatan pengadaan Bantuan Pemerintah (BP) berupa Peralatan Pengolahan (PP) Tahun Anggaran 2025, Dit. Pengolahan telah melaksanakan serangkaian kegiatan pendukung selama Triwulan II, antara lain:

1) Sosialisasi Bantuan Pemerintah.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2025 secara *hybrid* bertempat di R. Rapat Tuna GMB IV dan melalui aplikasi *zoom* melalui kegiatan sosialisasi BP KKP.

Peserta kegiatan adalah dari semua unit kerja KKP yang akan melaksanakan BP dan para *stakeholders/mitra*. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan untuk menyampaikan kebijakan, mekanisme, dan ketentuan teknis pelaksanaan kegiatan pengadaan BP PP. Sosialisasi ini penting untuk memastikan seluruh pihak memahami persyaratan, prosedur, dan tahapan yang harus dipenuhi, khususnya terkait usulan calon penerima bantuan. Melalui kegiatan ini, diharapkan stakeholder/mitra dapat lebih proaktif dalam menyiapkan dokumen dan usulan kelompok penerima yang sesuai kriteria. Selain itu, sosialisasi juga menjadi upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pelaksanaan program di lapangan.

2) Penyusunan Spesifikasi Teknis

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2025 secara daring. Kegiatan dipimpin oleh Katimja Prasarana dan Sarana Penanganan dan Pengolahan dengan dihadiri antara lain oleh Tenaga Ahli, dan perwakilan timja lingkup Dit. Pengolahan. Sebagai langkah penting sebelum proses pengadaan dilaksanakan, Dit. Pengolahan telah menyusun spesifikasi teknis untuk PP yang akan diadakan. Penyusunan spesifikasi ini bertujuan untuk memastikan peralatan yang diadakan sesuai dengan kebutuhan lapangan, standar mutu, aspek keamanan, serta efisiensi penggunaannya. Spesifikasi teknis yang disusun juga menjadi acuan utama dalam proses pengadaan, sehingga mencegah terjadinya ketidaksesuaian produk serta menjaga akuntabilitas proses pengadaan.

3) Rapat Penyusunan Dokumen Pembukaan Blokir Anggaran

Sebagian alokasi anggaran kegiatan pengadaan bantuan pemerintah chest freezer dan peralatan pengolahan masih dalam kondisi terblokir dan memerlukan kelengkapan dokumen administratif untuk proses pembukaannya. Oleh karena itu, Dit. Pengolahan telah melaksanakan rapat penyusunan dokumen pendukung untuk keperluan tersebut. Kegiatan dilaksanakan berkolaborasi dengan Timja Program Ditjen PDSPKP pada tanggal 18 Juni 2025 bertempat di Ruang Rapat Hijau Ditjen PDSPKP dan diikuti oleh semua perwakilan eselon 2 lingkup Ditjen PDSPKP, Inspektorat 4 Itjen KKP, dan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan.

Dalam rapat ini dibahas dan disusun dokumen seperti spesifikasi teknis, surat pernyataan kesiapan pelaksanaan kegiatan, data dukung kebutuhan penerima bantuan, serta dokumen perencanaan dan jadwal kegiatan. Diharapkan melalui kegiatan ini, proses

pembukaan blokir anggaran dapat segera dipenuhi, sehingga kegiatan pengadaan dapat segera dilaksanakan sesuai rencana dan target kinerja Dit. Pengolahan dapat tercapai.

Direktorat Pengolahan akan melaksanakan langkah-langkah percepatan diantaranya finalisasi spesifikasi teknis barang, penetapan penerima manfaat dan jadwal distribusi bantuan, dan koordinasi lanjutan dengan unit terkait untuk percepatan realisasi. Dengan demikian, diharapkan pada Triwulan III, proses penyaluran bantuan sudah mulai berjalan dan dapat berkontribusi pada peningkatan pemanfaatan bantuan pemerintah di lingkungan Direktorat Pengolahan.

h. Pembinaan Pelaku Usaha Diversifikasi Produk Bernilai Tambah. Diversifikasi produk merupakan salah satu upaya untuk menambah nilai hasil perikanan sesuai yang diamanahkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 59 tahun 2021 tentang Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan II tahun 2025, yaitu:

1) Workshop Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan

a) Workshop Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan. Kegiatan ini bertujuan edisi *Corndog* Ikan Nila dilaksanakan pada 17 April 2025 secara *hybrid*, offline di BBP3KP Satker Palabuhanratu dan online melalui *Zoom Meeting*. Peserta terdiri dari 460 orang melalui Zoom dan 65 orang melalui livestream YouTube, berasal dari berbagai provinsi. Tujuan kegiatan adalah mendukung agenda nasional dan meningkatkan pengetahuan tentang diversifikasi produk perikanan. Materi mencakup strategi pemasaran olahan ikan nila dan praktek pengolahan *corndog*.

b) Workshop Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan:

- Workshop Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan edisi *Pizza* Udang dilaksanakan pada 30 April 2025 secara *hybrid*, dengan 307 peserta melalui Zoom dan 57 melalui *livestream* YouTube dari berbagai daerah. Tujuan acara ini adalah mendukung agenda nasional dan penguatan ekonomi biru melalui pangan biru yang sehat dan berkelanjutan.
- Workshop Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan edisi *Burger* Ikan Cakalang diadakan pada 20 Mei 2025 secara online melalui Zoom dan YouTube, diikuti oleh 941 peserta dari berbagai provinsi di Indonesia. Tujuan

kegiatan ini adalah untuk mendukung hilirisasi dan industrialisasi produk perikanan, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan UMKM dalam diversifikasi produk. Materi yang dibahas meliputi strategi pemasaran, pengemasan, dan praktik pengolahan burger cakalang.

- Workshop Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan edisi Dimsum Udang Rumput Laut dilaksanakan pada 28 Mei 2025 secara *hybrid*, dengan 490 peserta, terdiri dari 438 online dan 52 melalui YouTube. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung agenda nasional dan mendorong perekonomian masyarakat pesisir melalui inovasi produk kelautan. Materi yang dibahas meliputi strategi pengembangan rumput laut dan praktek pengolahan dimsum udang rumput laut.
- Workshop Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan edisi Es Cream Rumput Laut dilaksanakan pada 18 Juni 2025, secara *hybrid* di BBP3KP Palabuhanratu dan online melalui Zoom. Peserta mencapai 522, terdiri dari 478 peserta lewat Zoom dan 46 lewat livestream YouTube, berasal dari 38 provinsi di Indonesia. Tujuan kegiatan adalah memberikan pemahaman tentang diversifikasi produk rumput laut, khususnya es krim, untuk meningkatkan kreativitas masyarakat dan pelaku usaha. Materi mencakup inovasi produk dan akses pemasaran. Praktek pengolahan es krim rumput laut diikuti oleh tujuh kelompok dari berbagai dinas dan lembaga.
- Workshop Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan Edisi Mantao Ikan Nila diadakan pada 25 Juni 2025 secara hibrid di BBP3KP Palabuhanratu dan secara online melalui Zoom. Kegiatan ini dihadiri oleh 362 peserta, termasuk 478 orang melalui Zoom dan 22 orang melalui YouTube, dari berbagai provinsi dan lembaga pendidikan terkait perikanan. Tujuan workshop adalah memberikan pemahaman teknis tentang diversifikasi produk ikan nila, terutama pengolahan menjadi produk mantau yang inovatif. Materi yang dibahas mencakup penerapan standar pengolahan ikan dan inovasi dalam pengolahan. Peserta juga mengikuti praktek pengolahan es krim rumput laut secara kelompok dari lokasi masing-masing.

2) Sosialisasi Pengolahan Hasil Laut

Sosialisasi Pengolahan Hasil Laut diadakan pada 19 Juni 2025 di Klenteng Tjoe Soe Kong, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang. Kegiatan ini diikuti oleh 572 peserta dari berbagai kelompok, termasuk TNI AL dan masyarakat lokal. Tujuan sosialisasi adalah memberikan pemahaman tentang pengembangan produk olahan hasil laut yang berkualitas. Dalam acara ini, peserta belajar pengolahan ekado ikan tenggiri. Diharapkan sosialisasi ini dapat membuka peluang usaha dan meningkatkan gizi anak, untuk membangun generasi yang sehat dan cerdas.

3) Pelatihan Diversifikasi Olahan Hasil Kelautan dan Perikanan

Pelatihan Diversifikasi Olahan Hasil Kelautan dan Perikanan dilaksanakan pada 12 Juni 2025 di Aula Ds. Ciantra, Cikarang Selatan, diikuti oleh 35 peserta dari TP PKK dan kader posyandu. Tujuan pelatihan adalah memperkenalkan diversifikasi produk perikanan. Materi yang disampaikan mencakup pentingnya menjaga mutu produk perikanan dan praktik diversifikasi. Direktorat Pengolahan akan terus mendukung pemerintah daerah agar pelatihan ini diterapkan dalam program pemberian makanan tambahan dan usaha kelompok.



Gambar 34. Pelatihan Diversifikasi Olahan Hasil Kelautan dan Perikanan

4) *Factory Trial* Produk HPI di UPI Nilai Tambah Kota Pekalongan

Kegiatan *Factory Trial* Produk HPI dilakukan di UPI Nilai Tambah Kota Pekalongan dari tanggal 22-25 April 2025. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menguji skala pabrik. Pada tanggal 23 April, diadakan audiensi dengan Walikota Pekalongan dan Dinas Kelautan dan Perikanan, dan disepakati Pemerintah Kota Pekalongan berkomitmen untuk mengoperasikan UPI Nilai Tambah dan mencari mitra swasta untuk optimalisasi

operasional. Pada 24 April, dilakukan *factory trial* pembuatan Hidrolisat Protein Ikan (HPI) dengan bahan baku ikan selar yang mudah diperoleh dan terjangkau. Metode pembuatan diambil dari hasil uji coba sebelumnya, dengan target memenuhi standar SNI 9295:2025. Hasil pengujian menunjukkan parameter sensori serta kadar protein dan lemak sudah sesuai dengan persyaratan.



Gambar 35. Factory Trial Produk HPI di UPI Nilai Tambah Kota Pekalongan

- i. Pelaksanaan Kemitraan Dalam Rangka Pengadaan, Distribusi dan Penyimpanan dengan dilaksanakannya kesepakatan Bersama antara Kemitraan penyimpanan antara KUD Mina Fajar Sidik dengan Casrudin, Kemitraan antara KUD Mina Fajar Sidik dengan Rian Ifanka, Kemitraan antara KUD Mina Fajar Sidik dengan Rasmani. Tujuan kesepakatan ini adalah menjamin ketersediaan ruang penyimpanan dan hasil perikanan berdasarkan prinsip saling menguntungkan, menjamin tercatatnya data keluar masuk stock ikan yang ada di dalam cold storage dalam system informasi pengelolaan cold storage serta penerapan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Serta kesepakatan Bersama tentang Distribusi dan Transportasi Hasil Perikanan dalam rangka Mendukung Logistik Ikan antara PT. Winson Singa Logistik Ekspedien dengan CV. Tuna dan Gurita. Tujuan kesepakatan ini menjamin keberlangsungan distribusi dan transportasi hasil perikanan berdasarkan prinsip saling percaya, keterbukaan, keberlanjutan, adil dan saling menguntungkan. Meningkatkan efisiensi distribusi dan transportasi hasil perikanan serta menerapkan system rantai dingin dalam rangka menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan
- j. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pemasukan Hasil Perikanan Berbasis Mekanisme Neraca Komoditas melalui kegiatan :
 - 1) Penyusunan *dashboard* kinerja impor hasil perikanan melalui mekanisme Neraca Komoditas dilaksanakan secara daring pada tanggal 9 April 2025 membahas

pengembangan sistem dasbor untuk pelacakan data impor, dengan fokus pada dua komponen utama: data realisasi dan data persetujuan. Tim meninjau proses pembersihan data dan membahas cara menangani pengenal unik untuk melacak perubahan dalam izin dan realisasi impor, dengan perhatian khusus untuk menghindari duplikasi data dan membahas pengembangan sistem dasbor untuk memantau realisasi dan persetujuan impor, terutama yang berfokus pada produk perikanan. Tim berencana untuk membuat dua dasbor utama - satu untuk pemantauan impor waktu nyata yang diperbarui setiap hari dan satu lagi untuk pelacakan alokasi/persetujuan yang diperbarui secara berkala;

- 2) Koordinasi Aliran Data SINAS NK dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2025. bertujuan untuk memastikan kesesuaian dan kelancaran aliran data dari SINAS NK ke inhouse NK KKP dan STELINA, mencakup aliran data realisasi impor, data jenis perusahaan, serta pengembangan aplikasi *inhouse* NK KKP terkait *upload* surat kuasa perusahaan secara otomatis. Kegiatan ini membahas antara lain : pengaliran modul data realisasi impor dengan satuan yang seragam sebagaimana yang dilaporkan pelaku usaha (self-declaration), penyesuaian data jenis perusahaan akan ditarik pada tahun ini, upload surat kuasa juga dapat dilakukan mulai Bulan Mei serta kelengkapan data realisasi impor yang dibutuhkan pada aplikasi STELINA (seperti nama jasa logistik, harga produk, asal penangkapan atau asal lahan budidaya) akan dikoordinasikan dengan Ditjen Bea dan Cukai sebagai pemilik data
- 3) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Pedoman Pelaksanaan Neraca Komoditas Pangan dilaksanakan tanggal 13 Juni 2025 secara luring dan daring di Hotel Novotel Golf Resort and Convention Center Bogor. Dipimpin oleh Asdep Tata Niaga Perdagangan Luar Negeri dan diikuti oleh peserta yang berasal dari Kemenko Bidang Pangan, KemenSesneg, Kemenkum, Kementan, KKP, Kemendag, Kemenperin, Kemenkeu, Bapanas dan BPS. Kegiatan bertujuan untuk penyampaian usulan K/L untuk penyusunan R-Permenko Pangan tentang Pedoman Pelaksanaan Neraca Komoditas Pangan (NK pangan) dan Pembahasan draft R-Permenko Pangan tentang Pedoman Pelaksanaan NK Pangan. Dilatarbelakangi dengan diterbitkannya Perpres nomor 7 tahun 2025 yang membagi kewenangan pelaksanaan Neraca Komoditas khusus untuk bidang pangan. Pedoman Pelaksanaan Neraca Komoditas saat ini mengacu ke Permenko Bidang Ekonomi nomor 16 tahun 2022, dan melalui Draft Pemenko Bidang Pangan, pelaksanaan Neraca Komoditas Pangan akan diatur secara khusus karena pangan memiliki

peran penting dan termasuk ke dalam Asta Cita Presiden terkait dengan swasembada pangan



Gambar 36. Penyusunan Rancangan Permenko Bidang Pangan tentang Pedoman Pelaksanaan Neraca Komoditas Pangan

- k. Penyusunan profil Ketersediaan dan Kebutuhan Hasil KP melalui Sinkronisasi Database Cold Storage (CS) dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2025. Tujuan kegiatan ini yaitu untuk melakukan sinkronisasi database CS dengan database perusahaan unit pengolahan ikan (UPI) Direktorat Pengolahan PDSPKP. Dengan sinkronisasi dari populasi UPI 1.480 unit menunjukkan bahwa 949 UPI memiliki gudang beku, 710 UPI memiliki kesamaan dengan database gudang beku, dan 239 UPI belum ada di database gudang beku. Dalam kegiatan ini disepakati terkait data profil gudang beku yang akan digunakan untuk memperbarui database dan sebaran gudang beku pada portal data KKP dan dashboard PDSPKP, terdapat total 48 CS yang perlu dibahas dengan database UPI dan didapatkan informasi diperlukan adanya konfirmasi.

Selain itu dilaksanakan Klarifikasi Data Profil Gudang Beku Ikan/Cold Storage dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2025. Tujuan rapat ini yaitu untuk mendapatkan klarifikasi dan melalui verifikasi database sebaran gudang beku ikan sehingga mendapatkan informasi valid mengenai profil Cold Storage di Kab/Kota dan Provinsi. Data gudang beku ikan per 31 Desember 2024 adalah 2.110 unit dengan kapasitas 813.966 ton terdiri dari 1.882 unit (98%) adalah gudang beku swasta dan 228 unit (2%) adalah gudang beku alokasi dana pemerintah. Update data per 17 April 2025, data menunjukkan jumlah gudang beku ikan sebanyak 2.190



Gambar 37. Sinkronisasi Database dan Klarifikasi Data Profil Cold Storage (CS)

unit dengan total kapasitas 847.785 ton. Validasi data dilakukan melalui berbagai sumber, termasuk Google Form dan SIP CS, validasi nasional oleh enumerator daerah, serta kunjungan lapangan. Hasil validasi nasional menunjukkan bahwa dari data yang masuk, terdapat status "Open" (belum diinput/submit), "Invalid" (perlu perbaikan), dan "Valid" (sesuai/terkonfirmasi).

1. Persentase bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil kelautan dan perikanan yang diusulkan untuk dirumuskan oleh Komite Teknis telah tercapai 75% pada periode triwulan 2. Terdapat 4 (empat) judul Bahan RSNI sudah sampai pada tahapan proses RSNI0, diantaranya (1) Revisi SNI 8646:2018 Kerupuk ikan, udang dan moluska Siap Makan, (2) Revisi SNI 7661:2019 Pempek, (3) Revisi SNI 7689: 2013 Agar-agar Kertas dan (4) Revisi SNI 2346:2015 Pedoman pengujian sensori pada produk perikanan. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan selama triwulan II diantaranya:
 - 1) Pengumpulan data primer dan sekunder dari pengujian sampel produk, basis data laboratorium BBP3KP, dan berbagai macam sumber literatur, yang dapat dipergunakan oleh konseptor untuk dijadikan referensi tambahan dalam proses penyusunan RSNI.
 - 2) Penyusunan bahan RSNI3 dalam rangka memperbaiki hasil pembahasan Komite Teknis 65-05 tanggal 29 – 30 April Tahun 2025.
 - 3) Pengambilan sampel agar-agar kertas yang dikirimkan oleh Pak Suraji pengolah agar-agar kertas di Wonosari, Yogyakarta. Sampel tersebut dikirimkan ke Laboratorium BBP3KP

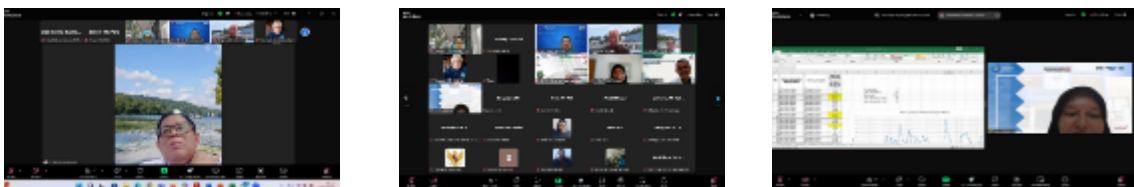
untuk diuji sesuai parameter persyaratan mutu yang disusun dalam bahan RSNI agar-agar kertas.

- 4) Rapat pembahasan bahan RSNI2 produk kelautan dan perikanan TA 2025 tanggal 23 April 2025 di Ruang Rapat Batari BBP3KP Jakarta yang dilakukan secara hybrid menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Pada kegiatan ini konseptor menyampaikan draf Bahan RSNI yang telah disusun untuk dibahas dan mendapatkan masukan serta saran dari peserta rapat. Bahan RSNI tersebut antara lain Revisi SNI 8646:2018 Kerupuk Ikan Udang dan Moluska Siap Makan, Revisi SNI 7661:2019 Pempek, Revisi SNI 7689: 2013 Agar-agar Kertas, Revisi SNI 2346:2015 Pedoman pengujian sensori pada produk perikanan, Revisi SNI 7761:2013 Dodol Rumput Laut, Revisi SNI 7530:2018 Tuna Loin Segar, dan Revisi SNI 4104:2015 Tuna Loin Beku.



Gambar 38. Rapat pembahasan bahan RSNI2 produk kelautan dan perikanan TA 2025

- 5) Rapat teknis RSNI produk perikanan TA 2025 yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengolahan pada hari Selasa dan Rabu tanggal 29 – 30 April 2025 secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Pada kegiatan ini konseptor menyampaikan draf RSNI2 yang telah disusun untuk dibahas dan mendapatkan masukan serta saran dari Komite Teknis.



Gambar 39. Kegiatan Rapat Teknis RSNI Produk Perikanan

- 6) Uji coba pengolahan agar agar kertas yang dilaksanakan tanggal 5 Mei 2025 dengan menggunakan bahan baku rumput laut *Gracillaria* sp.
- 7) Pengiriman sampel dari *e-commerce* dan hasil uji coba ke Laboratorium BBP3KP untuk diuji sesuai parameter persyaratan mutu yang disusun dalam bahan RSNI agar-agar kertas yaitu uji sensori, kadar air, uji mikroba (*ALT*, *Escherichia coli*, kapang dan khamir), uji

logam berat (merkuri, timbal, kadmium, arsen), ketebalan, kekuatan gel (1,5%; suhu 10°C) dan viskositas.

- 8) Penyusunan bahan RSNI3 dalam rangka memperbaiki dari hasil pembahasan RSNI2 bersama dengan Komite Teknis 65-05 yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 – 30 April Tahun 2025 dan akan dilakukan pembahasan internal pada bulan Juni 2025.



Gambar 40. Penyiapan penyusunan bahan RSNI3

- 9) Rapat pembahasan bahan RSNI3 tanggal 3 Juni 2025 secara *hybrid* di Ruang Rapat Surimi BBP3KP Jakarta melalui aplikasi *zoom*. Rapat dipimpin oleh Kepala BBP3KP. Konseptor menyampaikan draf Bahan RSNI3 yang merupakan hasil perbaikan dari Bahan RSNI2 yang telah dibahas dengan Komtek pada bulan April lalu.



Gambar 41. Rapat pembahasan bahan RSNI3

- 10) Rapat pembahasan penulisan metode uji pada RSNI yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengolahan selaku Sekretariat Komite Teknis 65-05 tanggal 20 Juni 2025 secara daring melalui aplikasi *zoom meeting*. Kegiatan ini membahas penulisan metode uji logam (merkuri, timbal, kadmium dan arsen), histamin dan mikrobiologi (*ALT* dan *Staphylococcus aureus*) pada draft RSNI pempek, RSNI kerupuk ikan udang dan molusca siap makan, dan RSNI agar-agar kertas.



Gambar 42. Rapat pembahasan penulisan metode uji RSNI

- 11) Rapat konsensus RSNI produk perikanan TA 2025 yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengolahan selaku Sekretariat Komite teknis 65-05: Produk Perikanan tanggal 24-25 Juni 2025 secara daring melalui aplikasi *zoom meeting*. Judul RSNI yang dibahas adalah Revisi SNI 2346:2015 Pedoman pengujian sensori pada produk perikanan; SNI 8646:2018 Kerupuk ikan, udang dan moluska Siap Makan; revisi SNI 7661:2019 Pempek dan Revisi SNI 7689: 2013 Agar-agar Kertas.
- m. Produk kelautan dan perikanan yang mendapatkan SPPT SNI dan/ atau Sertifikat Kesesuaian sampai dengan triwulan II telah tercapai 10 produk. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian diatas, diantaranya:
- 1) Evaluasi sertifikasi awal produk sarden dan makarel dalam kemasan kaleng PT Indo Warna Perkasa yang diproduksi oleh Yonghua Foods, Co., Ltd dilaksanakan tanggal 22 – 25 April 2025.



Gambar 43. Produk tuna dalam kemasan kaleng merek SMS

- 2) Evaluasi sertifikasi produk tuna dalam kemasan kaleng PT Samudra Mandiri Sentosa yang diproduksi PT Samudra Mandiri Sentosa dilaksanakan tanggal 20 April – 2 Mei 2025.



Gambar 44. Evaluasi sertifikasi produk tuna dalam kemasan kaleng PT Samudra Mandiri Sentosa

- 3) Pembahasan sertifikasi, surveilan, re-sertifikasi dan penerbitan SPPT SNI yang dilakukan melalui rapat keputusan sertifikasi tanggal 28 April 2025. Rapat ini menghasilkan rekomendasi diberikan sertifikat kesesuaian dan SPPT SNI untuk permohonan sertifikasi

PT Indo Warna Perkasa untuk produk sarden dan makerel dalam kemasan kaleng dengan merek Ayam Holland, Winsor, Nagoya, Sayangku, Moonstar, Ayam Belanda, Nagos, J&Y, TSC yang diproduksi oleh Yonghua Foods, Co., Ltd di China sesuai SNI 8222:2022 Sarden dan makerel dalam kemasan kaleng.



Gambar 45. Rapat tinjauan hasil evaluasi sertifikasi PT Indo Warna Perkasa

- 4) Rapat koordinasi pelaksanaan surveilan pertama SNI wajib tanggal 21 Mei 2025 dipimpin oleh Kepala BBP3KP selaku Manager Eksekutif. Klien importir yang akan disurveilan selama tahun 2025 yaitu PT Koin Bumi, PT Sumber Karya Sejati, dan PT Multi Alam Prima Rasa.
- 5) Rapat keputusan sertifikasi tanggal 7 Mei 2025 menghasilkan rekomendasi diberikan sertifikat kesesuaian kepada UD Putri Laut untuk produk bandeng isi merek Putri Laut yang diproduksi oleh UD Putri Laut sesuai SNI 8375:2017 Bandeng isi.
- 6) Rapat internal koordinasi kegiatan dalam rangka pemeliharaan sistem manajemen mutu LSPro-HP sesuai SNI ISO/IEC 17065: 2012. Adapun pembahasan rapat yaitu penyusunan SK Tim Manajemen LSPro-HP, penyusunan jadwal kegiatan layanan sertifikasi dan pemeliharaan sistem manajemen mutu, konstruksi layanan sertifikasi online, review dokumen mutu level 1 dan 2 terkait panduan mutu dan prosedur, mempersiapkan persuratan untuk kegiatan layanan sertifikasi, serta koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur tentang permohonan pendampingan fasilitasi penerbitan SNI untuk 3 UMKM, diantaranya a) CV. Azra Sentosa di Kota Balikpapan, produk yang diajukan sertifikasi abon kepiting, b) Shifoji Mandiri Food di Kota Balikpapan, produk yang diajukan sertifikasi abon kepiting, dan c) Pempek Fam354 di Kota Bontang, produk yang disertifikasi pempek ikan.
- 7) Evaluasi sertifikasi awal PT Rejeki Inthi Abadi untuk produk tuna dalam kemasan kaleng merek Wilmond yang diproduksi oleh PT Toba Surimi Industries dilaksanakan tanggal 5-10 Juni 2025.

- 8) Rapat tinjauan hasil evaluasi sertifikasi tanggal 10 Juni 2025 di ruang rapat laboratorium dengan Komite Teknis dipimpin oleh Prihastini Ngudi Lestari. Klien yang dibahas dalam rapat tinjauan evaluasi, antara lain: a) PT Samudra Mandiri Sentosa dengan produk Tuna dalam Kemasan Kaleng, b) PT Rejeki Inthi Abadi untuk produk Tuna dalam Kemasan Kaleng, dan c) UKM Citra Snack dengan produk kerupuk ikan Bawis (Kruwis).
- 9) Rapat koordinasi layanan sertifikasi online LSPro-HP dengan PT Pesat Aghni Solusi tanggal 5 Juni 2025. Rapat ini membahas terkait penyempurnaan sistem layanan sertifikasi online LSPro-HP BBP3KP diantaranya: a) tampilan halaman utama pada layanan online BBP3KP yang disesuaikan dengan contoh tampilan layanan SINDI BBSPJPPI Semarang dan SIPANDU Kementerian Pertanian, dan b) menyesuaikan tampilan atau fitur-fitur pada layanan online sesuai dengan alur proses layanan SNI wajib dan sukarela serta kemudahan akses para pengguna.
- 10) *Refreshment Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)* bagi evaluator LSPro-HP BBP3KP tanggal 13 Juni 2025 secara Hybrid di Ruang Rapat Laboratorium BBP3KP. Materi yang disampaikan yaitu: a) Kebijakan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, dan b) Prinsip kemunduran mutu dan Teknologi Pengolahan.
- 11) Koordinasi layanan penilaian kesesuaian produk kelautan perikanan yang dilaksanakan terkait pelatihan auditor SNI untuk produk Amplang Ikan, Abon Ikan, dan Pempek Ikan. Kegiatan dilaksanakan tanggal 17–18 Juni 2025 di Samarinda oleh UPTD BPSMB Disperindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan ini diikuti oleh 25 peserta dan menghadirkan narasumber dari BBP3KP, yaitu Dr. Rahmadi Sunoko, Saifullah, dan Norita, yang menyampaikan materi seputar kebijakan, skema sertifikasi, serta analisis SNI produk olahan perikanan.



Gambar 39. Pelatihan Auditor SNI untuk produk Amplang Ikan, Abon Ikan, dan Pempek Ikan, Samarinda

n. Inkubasi Bisnis bagi UMKM Kelautan Perikanan (BBP3KP)

- 1) Penetapan tenant inkubasi bisnis inovasi produk kelautan dan perikanan melalui surat nomor B.342/BBP3KP/PDS.440/IV/2025 tanggal 11 April 2025, dengan jumlah tenant yang ditetapkan 9 (sembilan) UMKM.
- 2) Rapat pembahasan penyusunan data awal bagi tenant inkubasi bisnis invapro kelautan dan perikanan sebagai informasi atas profil dan kondisi usaha eksisting pada saat UMKM bergabung menjadi tenant binaan dan selanjutnya akan digunakan sebagai dasar monitoring dan evaluasi perkembangan usaha masing – masing tenant selama masa inkubasi.
- 3) Rapat pembahasan rencana kerjasama pelatihan digital marketing bagi tenant inbis invapro KP. Rapat dilaksanakan dengan *start up* Our Donnut tanggal 25 April 2025 secara daring.
- 4) Bimbingan teknis (Bimtek) inkubasi bisnis invapro kelautan dan perikanan tanggal 29 – 30 April 2025 secara daring dan luring. Topik pemaparan bimtek diantaranya a) pengenalan program inkubasi bisnis inovasi produk kelautan dan perikanan tahun 2025, b) persyaratan izin edar bagi pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, c) program peningkatan kapasitas usaha pengolahan hasil perikanan melalui bantuan pemerintah dan pembinaan mutu, d) peningkatan jangkauan pemasaran bagi umkm pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, e) peningkatan kapasitas usaha pengolahan hasil perikanan melalui program pemberdayaan usaha (kelembagaan, perizinan berusaha, dan pembiayaan); f) dukungan distribusi dan pemenuhan bahan baku bagi pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dan g) kriteria dan tata cara sertifikasi SNI produk olahan perikanan.
- 5) Uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2024/2025, Satker BBP3KP Palabuhanratu menjadi penguji dan melakukan uji kompetensi untuk peserta didik SMKN 1 Palabuhanratu pada tanggal 15-16 April 2025 di Ruang Praktek SMKN 1 Palabuhanratu. Uji kompetensi pada hari pertama diberikan materi uji kompetensi mengenai proses pembuatan surimi dan pada hari kedua mengenai pembuatan bakso ikan tuna yang diolah dari surimi.



Gambar 95. Uji kompetensi untuk peserta didik SMKN 1 Palabuhanratu

- 6) Satker BBP3KP Ambon melakukan pendampingan / fasilitasi perpanjangan Sertifikat Kelayakan Produk (SKP) pada produk Abon Ikan milik UMKM Nacha yang merupakan Tenant Inbis Invapro KP tahun 2018 tanggal 9 April 2025.
- 7) Satker BBP3KP Ambon membantu UMKM dan Poklhasar binaan untuk mendaftarkan dalam kegiatan Coaching Klinik sertifikasi Halal gratis yang diadakan oleh Bank Negara Indonesia (BNI) bekerja sama dengan PKH Unpatti yang akan dilaksanakan tanggal 6 Mei 2025 di Hotel Swiis-Bell Ambon. Adapun beberapa UMKM dan Poklhasar dengan produknya yang sudah di daftarkan oleh Satker BBP3KP antara lain a) UMKM Kaisar Arkana – Abon Ikan, b) UMKM Mahina Solemata – Abon Ikan, c) UMKM IASI – Abon Ikan, d) Poklhasar Mutiara Laut – Abon Ikan, e) UMKM Pamona – Bakso Ikan, f) UMKM Jess Corner – Pempek, dan g) UMKM Besthi – Abon Ikan.
- 8) Satker BBP3KP Ambon melakukan koordinasi dengan BPOM terkait pembuatan MD (makanan dalam negeri) di Kantor Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Karang Panjang, Ambon tanggal 16 April 2025.
- 9) Penyusunan kelengkapan dokumen INVAPRO KAPE pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2025 tanggal 14-16 Mei 2025 yang diantaranya proposal, surat pernyataan dan media publikasi (Video).
- 10) Kelas manajemen usaha inkubasi bisnis inovasi produk kelautan dan perikanan (INVAPRO KAPE): Pelatihan Analisa Usaha tanggal 15 Mei 2025 dengan peserta kegiatan sebanyak 9 tenant. Tujuan kegiatan adalah untuk meningkatkan sikap, pengetahuan dan keterampilan tenant dalam hal penghitungan biaya tetap, biaya variabel, analisa kelayakan usaha, laba rugi, dan Break Event Point (BEP).
- 11) Rapat pembahasan rencana pendampingan materi pemasaran digital INVAPRO KAPE tanggal 16 Mei 2025 dengan peserta perwakilan our donnut, tim kerja PPU dan perwakilan tim kerja Diseminasi. Our Donnut bersedia memberikan support pelatihan dan

pendampingan pada topik: (1) Sosial Media, (2) Marketplace, (3) Desain Promosi, (4) Search Engine dan (5) Reseller dan Affiliate.

- 12) Pendampingan perhitungan analisa usaha tenant invapro kape tahun 2025 tanggal 19-21 Mei 2025. Sesi pertama: pendampingan UMKM Ameera dan UMKM Sari Rasa Snack pada tanggal 19 Mei 2025. Sesi kedua: pendampingan UMKM Bleszing Delifood Indonesia, UMKM Siomay Dimsum Mbah Uti, dan UMKM Dimsum Uwais 58 pada tanggal 20 Mei 2025. Sesi ketiga: pendampingan UMKM Srijuana Makmur, Munazi Jaya dan UMKM Se'Gi pada tanggal 21 Mei 2025.
- 13) Pendampingan Business Model Canvas (BMC) tenant invapro kape tahun 2025 tanggal 23 Mei 2025. Materi yang disampaikan diantaranya: a) Pemaparan BMC disertai langkah-langkah pembuatan Bisnis Model Canvas, b) Mensimulasikan pembuatan BMC kepada salah satu Tenant INVAPRO KAPE yaitu UMKM Sri Juana Makmur, dan c) Tenant INVAPRO KAPE diberikan tugas untuk membuat Bisnis Model Canvas (BMC) dan akan dilakukan review/pembahasan hasil pembuatan BMC pada pertemuan yang akan datang.
- 14) Pendampingan penyusunan BMC tenant invapro kape Tahun 2025 kepada masing-masing UMKM yang dibagi dalam dua sesi, diantaranya: a) Sesi pertama: pendampingan UMKM Ameera, UMKM Sari Rasa Snack, PT. Bleszing Delifood Indonesia dan Siomay Dinsum Mbah Utih pada tanggal 26 Mei 2025, dan b) Sesi kedua: pendampingan UMKM Dimsum Uwais 58, Muazi Jaya, Dapur Kasono dan Se/Gi pada tanggal 27 Mei 2025.
- 15) Pendampingan digital marketing tenant invapro kape tahun 2025 tanggal 28 Mei 2025 dengan narasumber Our Donuts dan Tim Kerja Pelayanan Pengembangan Usaha. Materi yang disampaikan meliputi: (1) Pengantar Bimbingan Teknis Digital Marketing yang disampaikan oleh Tim Pelayanan Pengembangan Usaha, dan (2) Pengenalan Strategi Pemasaran Bagi UMKM Produk Kelautan dan Perikanan Berbasis Digital Marketing yang disampaikan oleh Our Donuts.
- 16) Pendampingan fasilitasi sertifikasi halal kepada UMKM di Kota Ambon pada tanggal 6 Mei 2025 melalui kegiatan fasilitasi sertifikasi halal gratis yang diprakarsai oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku. Kegiatan ini juga salah satu bentuk dukungan Bank Indonesia terhadap pengembangan UMKM. Sebanyak 26 UMKM yang mengikuti kegiatan fasilitasi sertifikasi halal gratis ini diantaranya ada 8 UMKM yang merupakan UMKM binaan Satker BBP3KP Ambon, yakni UMKM Aseven (A7), UMKM Kaisar

Arkana, UMKM Mahina Solemata, UMKM IASI, UMKM Mutiara Laut, UMKM Pamona, UMKM Jess Corner, dan UMKM Besthi.



Gambar 110. Pendampingan fasilitasi sertifikasi halal kepada UMKM di Kota Ambon

- 17) Uji terap pengolahan dimsum udang rumput laut oleh Satker BBP3KP Mataram dalam rangka menjadi narasumber pengolahan dimsum udang rumput laut pada kegiatan Workshop Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan Edisi “Dimsum Udang Rumput Laut” tanggal 26 Mei 2025.
- 18) Pendampingan digital marketing yang terdiri dari:
 - a) Training Smartphone (foto dan videografi) tenant Inbis Invapro KP tahun 2025 tanggal 3 Juni 2025. Tujuan kegiatan adalah agar tenant mampu membuat foto produk dan editing video produk untuk promosi pada channel digital sebagai strategi dalam menjalankan bisnisnya.
 - b) Copywriting dan Formulanya untuk Tenant Inbis Invapro KP Tahun 2025 tanggal 05 Juni 2025 secara daring melalui zoom di Ruang Rapat Nori BBP3KP. Tujuan kegiatan adalah agar tenant mampu membuat copywriting pada produk untuk promosi pada channel digital sebagai strategi dalam menjalankan bisnisnya.
 - c) Desain promosi produk dan bisnis menggunakan Aplikasi Canva tenant Inbis Invapro KP tahun 2025 tanggal 10 Juni 2025. Tujuan kegiatan adalah agar tenant mampu membuat bahan materi promosi yang menarik menggunakan aplikasi Canva.
 - d) Optimasi sosial media untuk meningkatkan penjualan untuk tenant Inbis Invapro KP tahun 2025 tanggal 13 Juni 2025 secara daring melalui zoom di Ruang Rapat Nori BBP3KP
 - e) Strategi Optimalisasi Penjualan di Marketplace Tenant Inbis Invapro KP Tahun 2025 tanggal 17 Juni 2025.

- f) Pendampingan digital marketing Sesi 7: Strategi Optimalisasi Penjualan melalui Google My Business dan SEO untuk Tenant Inbis Invapro KP Tahun 2025 tanggal 20 Juni 2025 secara daring melalui zoom di Ruang Rapat Nori BBP3KP.
 - g) Optimalisasi whatsapp marketing untuk bisnis online tenant Inbis Invapro KP tahun 2025 tanggal 26 Juni 2025. Materi pelatihan disampaikan oleh narasumber dari Tim Kerja Diseminasi. Pelatihan dibagi dalam 2 sesi yaitu sesi paparan dan sesi diskusi terutama berkaitan dengan penggunaan WhatsApp Business dan manfaatnya dalam menjalankan strategi penjualan secara Online.
- 19) Pelayanan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) tanggal 02-05 Juni 2025 untuk pelaku usaha kelautan dan perikanan sebanyak 103 pelaku usaha yang terdiri dari berbagai subsektor yaitu usaha penangkapan ikan, pengolahan hasil perikanan, pemasaran produk kelautan dan perikanan serta warung/rumah makan.
- 20) Diskusi penguatan kelembagaan untuk peningkatan kuantitas dan kualitas produksi Poklhasar di Kabupaten Maluku Tengah yang diselenggarakan oleh Harmoni Alam Indonesia (HAI) tanggal 26 Juni 2025. Kegiatan ini turut mengundang Satker BBP3KP Ambon dan Penyuluh Perikanan. Agenda kegiatan diantaranya: a) diskusi dan tanya jawab, b) perhitungan analisa usaha untuk produk Pilus ikan Tuna, dendeng ikan Tuna, abon Lembaran dan ikan Cakalang Asap Air, dan c) pelatihan pemakaian alat vacuum sealer untuk kelompok Nusa Telu dan Nusa Telu 2.



Gambar 127. Diskusi penguatan kelembagaan di Kabupaten Maluku Tengah

- o. Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan Bernilai Tambah
 - 1) Workshop penerapan teknik pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan tahun 2025 yang dilaksanakan tanggal 15 April 2025 secara secara hybrid dari Ruang Rapat Batari.
 - 2) Pengolahan mantao ikan dan fish chips dalam rangka mempromosikan produk hasil inovasi BBP3KP. Uji coba pengolahan fish chips dan mantao ikan menggunakan 2 perlakuan yang

berbeda. Pengolahan fish chips menggunakan bahan baku lumatan ikan dan potongan ikan, sedangkan pengolahan mantao ikan menggunakan bahan baku ikan dan rumput laut.

- 3) Pelatihan diversifikasi hasil olahan perikanan pada kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil yang diselenggarakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi dengan Narasumber dari BBP3KP pada tanggal 16 April 2025 bertempat di Aula Desa Kertarahayu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Materi pelatihan adalah gohyong ikan dan sirup rumput laut yang diikuti oleh 20 peserta.



Gambar 63. Pelatihan gohyong ikan dan sirup rumput laut

- 4) Transfer teknologi pengolahan tempura udang kepada bagaian protokoler Menteri. Kegiatan ini bertujuan untuk mentransfer teknologi pengolahan tempura udang menggunakan resep dari BBP3KP untuk dapat disajikan kepada Menteri KKP oleh bagian Protokol Menteri. Kegiatan dilaksanakan di Lantai 7 GMB I Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 17 April 2025.
- 5) Transfer teknologi kepada 12 UMKM kepada enam UMKM, dengan target produk yang telah ditransfer teknologi yaitu: odeng, sempol ikan, dimsum ikan, krispi rumput laut, mie ikan, pilus ikan, stik ikan, permen jelly rumput laut, pizza ikan, fish chips, cilok ikan dan abon lembaran.



Gambar 77. Fasilitasi pendampingan UMKM Pempek Keboet

- 6) Pengembangan produk kelautan dan perikanan bernilai tambah, diantaranya:

- a. Pengolahan pizza udang, fish chips ikan, mantao ikan dan cookies ikan dalam rangka mempromosikan produk hasil inovasi BBP3KP.



Gambar 78. Pengolahan pizza udang, fish chips ikan, mantao ikan dan cookies ikan

- b. Pengolahan burger cakalang dalam rangka uji coba pengolahan patty burger guna mendukung pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis diversifikasi dan pengembangan produk nilai tambah produk perikanan series burger cakalang yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengolahan DJPDSPKP.
- c. Pengolahan produk odeng ikan, sempol ikan, dimsum ikan dan mie ikan dalam rangka persiapan pelaksanaan fasilitasi pendampingan UMKM.
- d. Pengolahan almond crispy crab, pizza ikan, mantao kari tuna dan beras rumput laut dalam rangka mempromosikan produk hasil inovasi BBP3KP.
- e. Pengolahan nori dari rumput laut *Ulva sp.* dalam rangka pengambilan video oleh Tim Kerja Diseminasi dan persiapan Webinar Series 2 yang diselenggarakan oleh BBP3KP.
- f. Kegiatan kerjasama teknologi pengolahan dan pemasaran dengan para akademisi, Dinas KP Provinsi Kabupaten/Kota, pelaku usaha perikanan dan stakeholder lainnya.
- g. Menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekolah Pimpinan Tinggi Perempuan Indonesia (PIMTI) bertajuk: Dapur Emas Nusantara “Mari Mengolah Ikan Bermutu Untuk Generasi Emas” yang digelar di Gedung Mina Bahari III, dalam kegiatan ini perwakilan tim uji terap teknik pengolahan dan pemasaran berkesempatan untuk berperan serta dalam demo olahan ikan dengan bahan baku ikan nila beserta tim kerja Diseminasi yaitu olahan mantao ikan, egg roll ikan dan churros ikan.



Gambar 83. Demo olahan mantao ikan di kegiatan Dapur Emas Nusantara “Mari Mengolah Ikan Bermutu Untuk Generasi Emas

- a. Menghadiri kegiatan Indonesia Cosmetic Ingredients Expo and Seminar 2025. ICI 2025 diselenggarakan oleh Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (Perkosmi) tanggal 14 – 16 Mei 2025 bertempat di Hall D1, D2 & A3 JIExpo Kemayoran Jakarta, dengan mengangkat tema "Beauty, Innovation and Technology for the Future Trends". BBP3KP memperkenalkan produk inovasi Sabun Rumput Laut yang telah diterapkan oleh CV Madu Apiari Mutiara dan Salt Bath Bomb.
- b. Melaksanakan kegiatan pengolahan beras rumput laut berbasis Hidrolisat Protein Ikan (HPI) dalam kegiatan Magang program Taruna Berprestasi (PTB) batch 2 tahun 2025 di workshop BBP3KP pada tanggal 4 Juni 2025. Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan (BBRP2BKP) melaksanakan kegiatan mengolah beras analog dengan meminjam alat pencetak beras rumput laut dan alat spray dryer.



Gambar 85. Pengolahan beras rumput laut berbasis Hidrolisat Protein Ikan (HPI)

- c. Rapat rencana pelaksanaan pengembangan potensi produk biofarmakologi tanggal 13 Juni 2025 secara daring via zoom meeting, sebagai tindak lanjut pertemuan antara Kepala BBP3KP dengan tim Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (PSPL) Serang pada tanggal 28 Mei 2025. Agenda yang dibahas yaitu pemanfaatan tulang ikan hiu, ikan pari dan teripang menjadi produk biofarmakologi.

- d. Rapat koordinasi peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat di Kabupaten Buton Selatan tanggal 17 Juni 2025 di Ruang Rapat Batari BBP3KP. BBP3KP menyampaikan informasi tentang tugas dan fungsi, hasil inovasi pangan dan non pangan serta pelayanan publik BBP3KP yang meliputi bimbingan teknis pengembangan produk bernilai tambah, fasilitasi pendampingan teknik pengolahan dan pemasaran, layanan pengujian dan sertifikasi produk, inkubasi bisnis inovasi produk KP, dan diseminasi produk KP. Direktorat P3K berharap dapat berkolaborasi dengan BBP3KP terkait peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada MHA Wapulaka di Kab. Buton Selatan.



Gambar 88. Rapat koordinasi peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat di Kabupaten Buton Selatan

- e. Webinar seri II inovasi Nori Ulva: peluang dan tantangan kolaborasi BBP3KP dengan UKM NORIbet tanggal 24 Juni 2025 melalui aplikasi zoom meeting dan YouTube BBP3KP. Kegiatan diikuti sebanyak 604 peserta yang terdiri dari 408 peserta melalui zoom meeting dan 197 peserta melalui livestream youtube yang berasal dari Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan provinsi/kab/kota di seluruh Indonesia, dan pelaku usaha Kelautan dan Perikanan seluruh Indonesia.



Gambar 89. Webinar seri II inovasi Nori Ulva

- p. Diseminasi Masyarakat pada Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP)

- 1) Peliputan atau pengambilan gambar dalam rangka penyusunan bahan informasi dilaksanakan pada tanggal 11 April 2025 di Workshop BBP3KP Jakarta. Adapun materi peliputan terkait cara penanganan/pembersihan udang dan praktek pengolahan tempura.



Gambar 50. Peliputan atau pengambilan gambar cara penanganan/pembersihan udang dan praktek pengolahan tempura dalam rangka penyusunan bahan informasi

- 2) Penyebarluasan informasi melalui bimbingan teknis inkubasi bisnis inovasi produk kelautan dan perikanan (Inbis Invapro KP) 2025 tanggal 30 April 2025 secara hybrid melalui aplikasi zoom meeting dan dari Ruang Rapat Batari BBP3KP.



Gambar 52. Penyebarluasan informasi melalui Bimbingan Teknis Inkubasi Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan (Inbis Invapro KP) 2025

- 3) Pelatihan videografi: teknik pengambilan dan editing video dokumentasi. Kegiatan dilaksanakan tanggal 22 Mei 2025. Pelatihan dibuka oleh Kepala BBP3KP Dr. Rahmadi Sunoko, S.Pi, M.Sc dengan diikuti 30 (tiga puluh) orang peserta baik dari BBP3KP Setu maupun Satker BBP3KP secara luring di Rr Surimi BBP3KP dan daring melalui aplikasi zoom meeting. Sebagai narasumber dari Biro Humas Kerjasama Luar Negeri (BHKLN) KKP dengan materi teknik dasar videografi (teknik pengambilan dan editing) dan alur cerita audiovisual (storytelling).



Gambar 53. Pelatihan Videografi: Teknik Pengambilan dan Editing Video

- 4) Penyebarluasan informasi melalui International Indonesia Seafood & Meat Expo (IISM) 2025 tanggal 7-10 Mei 2025 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta. BBP3KP turut berpartisipasi pada kegiatan ini dengan menyebarkan informasi terkait layanan publik seperti penerbitan sertifikat kesesuaian SNI, penerbitan SPPT SNI wajib, pengujian produk kelautan dan perikanan, serta penggunaan cold storage.



Gambar 55. Penyebarluasan informasi melalui International Indonesia Seafood & Meat Expo (IISM) 2025 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta

- 5) Penyebarluasan informasi melalui kegiatan Sekolah Pimpinan Tinggi Perempuan Indonesia (PIMTI) Dapur Emas Nusantara: “Mari Mengolah Ikan Bermutu untuk Generasi Emas” tanggal 14 Mei 2025 di Pelataran Parkir GMB III, KKP. Jakarta. BBP3KP turut berpartisipasi dengan menampilkan Mobil Alih Teknologi dan Informasi (ATI) yang menyebarkan informasi terkait tugas dan fungsi maupun layanan publik. BBP3KP juga melaksanakan demonstrasi pengolahan mantao, eggroll, dan churros yang semuanya berbahan baku ikan nila.



Gambar 56. Penyebarluasan informasi melalui Sekolah Pimpinan Tinggi Perempuan Indonesia (PIMTI) Dapur Emas Nusantara: Mari Mengolah Ikan Bermutu untuk Generasi Emas di Pelataran Parkir GMB III, KKP, Jakarta

- 6) Penyebarluasan informasi melalui Indonesia Cosmetic Ingredients (ICI) Expo and Seminar 2025 tanggal 14 – 16 Mei 2025 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta. BBP3KP turut berpartisipasi pada kegiatan ini dengan memperkenalkan produk inovasi Sabun Rumput Laut yang telah diterapkan oleh CV Madu Apiari Mutiara Depok dan Salt Bath Bomb. BBP3KP juga menyebarkan bahan tayang berupa leaflet Profil BBP3KP dan Layanan

Pengujian, serta video motion graphic berjudul (1) pengolahan serbuk rumput laut, (2) sabun transparan rumput laut, (3) body lotion rumput laut, (4) sabun cair rumput laut, dan (5) body scrub rumput laut.



Gambar 57. Penyebarluasan informasi melalui Indonesia Cosmetic Ingredients (ICI) Expo and Seminar 2025 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta

- 7) Penyebarluasan informasi melalui Sosialisasi Pengolahan Hasil Laut Tahun 2025 TNI Angkatan Laut tanggal 19 Juni 2025 di Klenteng Tjoe Soe Kong, Mauk, Kabupaten Tangerang dengan menggunakan sarana Mobil Alih Teknologi dan Informasi (ATI). BBP3KP menyebarluaskan informasi terkait tugas dan fungsi maupun layanan publik, serta demonstrasi pengolahan dimsum dengan bahan baku ikan tenggiri dan udang.



Gambar 58. Penyebarluasan informasi melalui kegiatan Sosialisasi Pengolahan Hasil Laut Tahun 2025 TNI Angkatan Laut

- 8) Tersusunnya 106 (seratus enam) bahan informasi bahan informasidan publikasi pengujian penerapan produk kelautan dan perikanan.
- 9) Menerima dan menjawab sebanyak 53 (lima puluh tiga) pengaduan berupa pertanyaan masyarakat melalui email bbp3kp@kkp.go.id dan direct message media sosial (Instagram) pada periode triwulan II.

Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp 17.849.887.000,- sampai dengan periode triwulan II tahun 2025 telah direalisasikan sebesar Rp 11.538.325.000,- atau setara dengan 64,64%.

C. Persentase UMKM Pengolahan Produk KP Naik Kelas

Usaha mikro dan usaha kecil bidang pengolahan produk KP yang meningkat skalanya dihitung berdasarkan 6 aspek usaha (legalitas, peningkatan omset, peningkatan aset, peningkatan produksi, perluasan pasar, peningkatan tenaga kerja). Berdasarkan Kepdirjen PDSPKP No 56 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Usaha Mikro Kecil dan Menengah Naik Kelas Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, penetapan kelas usaha dari pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan diperoleh dari total pembobotan, dengan rincian:

- Kelas Mikro, merupakan kelas terbawah dengan batas nilai skoring 0 sampai dengan 50;
- Kelas Kecil, dengan batas nilai skoring 51 sampai dengan 70;
- Kelas Menengah, dengan batas nilai skoring 71 sampai dengan 100.

Tabel 7. Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan Naik Kelas Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	Tahun 2025	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	S.d TW II 2025			TW I 2025	TW II 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan Naik Kelas (%)	1	-	-	5	1,5	-	-	1,5	120	30	-	-

Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan Naik Kelas pada Triwulan II tahun 2025 mencapai 1,5%. Capaian tersebut setara dengan 120% terhadap target triwulan II tahun 2025 sebesar 1%, dan 30% terhadap target tahun 2025 yaitu sebesar 5%. Indikator ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 yang merupakan tahun pertama periode Renstra 2025-2029, sehingga belum dapat dibandingkan baik dengan capaian pada triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maupun dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Indikator kinerja Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan Naik Kelas tahun 2025 ditargetkan mencapai 5%. Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan

Perikanan yang Meningkatkan Omsetnya merupakan persentase jumlah UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang meningkat omsetnya pasca pembinaan dan pendampingan menuju UMKM Naik Kelas dibandingkan dengan Jumlah UMKM yang dibina. Presentase UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan naik kelas sebesar 1,5% dari 661 UMKM terkurasi atau sejumlah 10 UMKM sesuai dengan target Triwulan II tahun 2025. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu 5% maka realisasi presentase UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan naik kelas mencapai 30%. Meningkatnya kelas UMKM tersebut dihitung berdasarkan 6 aspek usaha (legalitas, sumber daya manusia, produksi, keuangan, pemasaran, operasional) Indikator ini juga merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 yang merupakan tahun pertama periode Renstra 2025-2029. Oleh karena itu capaiannya belum dapat dibandingkan baik dengan capaian pada triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maupun dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

- a. Fasilitasi Pelaku Usaha pada Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengolahan dan Pemasaran. Dalam memfasilitasi Pelaku Usaha pada Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengolahan dan Pemasaran telah dilaksanakan kegiatan Rapat Verifikasi Kelengkapan Standar Usaha Pemasaran Ikan sebagai berikut :
 - 1) Rapat verifikasi kelengkapan standar berusaha pengolahan dan pemasaran selama periode Triwulan II 2025, telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) dimana selama periode tersebut telah diterbitkan 17 Sertifikat Standar Pengolahan dan Pemasaran Ikan kepada 14 pelaku usaha (PT. Seafodo Food International, PT. Samudra Mas Group, PT. Cahaya Laut Abadi, PT. Dunia Hijau, PT. Bumi Laut Pertiwi, PT. Nihon Novelica Food, PT. Nusavin Aquaculture International, Phillips Seafood Indonesia, PT. Plant Pasuruan, PT. Hasil Indo Sejahtera) yang bermohon dengan rincian 6 (enam) Sertifikat Standar Subsektor Pengolahan Ikan dan 11 (sebelas) Sertifikat Standar Subsektor Pemasaran Ikan yang sesuai dengan ketentuan Permen KP No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan, dimana pelaku usaha tersebut harus memenuhi standar usaha yang telah ditetapkan.

- b. Kegiatan pembinaan dan pendampingan wirausaha KP dilaksanakan pada tanggal 18 dan 19 Juni 2025 dengan tema Webinar Pemberdayaan Usaha Series. Kegiatan tersebut mengundang wirausaha sektor kp yang eksisting, wirausaha baru sektor kp, serta Dinas Kelautan dan Perikanan daerah secara daring. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengetahui proses bisnis wirausaha sektor kelautan dan perikanan baik yang sudah ekisting maupun wirausaha baru sehingga dapat ditentukan aspek yang akan dibina untuk meningkatkan omsetnya. Pada triwulan II tahun 2025 output dari kegiatan pembinaan dan pendampingan wirausaha hasil KP sebanyak 250 wirausaha sektor kp.
- c. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha pada Lembaga Usaha KP. Pada triwulan II, telah dilakukan beberapa kegiatan, antara lain:
- 1) Sosialisasi Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada tanggal 24 April 2025. Sosialisasi Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dipimpin oleh Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan dan dihadiri secara *hybrid* yaitu *offline* dihadiri oleh perwakilan eselon I dan II lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dan secara *online* sebanyak 3.415 peserta terdiri dari penyuluh perikanan dan pengurus koperasi kelautan dan perikanan.
 - 2) Peluncuran dan Dialog Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih di Kabupaten Pandeglang, Banten pada tanggal 7 Mei 2025, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 6 Mei 2025, Jawa Barat pada tanggal 15 Mei 2025, Kalimantan Tengah pada tanggal 21-22 Mei 2025, Sumatera Selatan dan Lampung pada tanggal 27-28 Mei 2025 dan Nusa Tenggara Barat pada tanggal 2-3 Juni 2025. Peluncuran dan dialog percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Agenda kegiatan adalah 1) Pencanaan Desa Ekspor Ikan Mas Koki Binaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Karya Bersama bekerjasama dengan PT. Limas Inti Makmur sebagai offtaker; 2) Pelaksanaan Program Gerakan Indonesia Menanam (Pengembangan Budidaya Padi); dan 3) Peluncuran Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus (musyawarah desa/kelurahan khusus) Pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih di Balai Desa Kertasana. Dalam kegiatan ini ditekankan bahwa kepala desa beserta BPD agar melaksanakan musyawarah desa/kelurahan khusus untuk

pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih. Koperasi desa/kelurahan merah putih diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi desa dan mendekatkan pelayanan pemerintah kepada warga desa. Koperasi desa/kelurahan merah putih akan diberikan fasilitas dana pinjaman dengan plafon sekitar lima milyar rupiah dan bunga rendah untuk modal menjalankan aktivitas usahanya.

d. Fasilitasi UMKM KP pada Akses Pembiayaan dan Kemitraan Usaha. Dalam memfasilitasi UMKM KP pada akses pembiayaan telah dilaksanakan kegiatan :

1) Kegiatan Fasilitasi Akses Pembiayaan Usaha Bagi Pelaku Umkm Di Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing Pada Tanggal 18 Juni 2025. Kegiatan dibuka oleh Katimja Pembiayaan dan dihadiri oleh pelaku usaha perikanan dari kawasan Kalibaru, Cilincing, perwakilan Bank Mandiri, Suku Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Jakarta Utara Timja Pelayanan dan Kemitraan Usaha, Timja Kewirausahaan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan literasi keuangan pelaku usaha perikanan, menyediakan informasi akses pembiayaan seperti KUR dan skema lainnya, mendorong pencatatan keuangan sederhana untuk keberlanjutan usahn serta pemberdayaan usaha. 1. Selain melakukan sosialisasi dan fasilitasi akses pembiayaan, Direktorat Pemberdayaan Usaha bersama Bank Mandiri cabang Semper juga memberikan layanan konsultasi dan pengecekan bagi pelaku usaha yang ingin mengajukan permohonan pinjaman KUR atau layanan perbankan lainnya, dengan hasil sebagai berikut:

- Sebanyak 10 pelaku usaha pengolah dan pemasok ikan asin menerima layanan konsultasi untuk akses pembiayaan, dengan kisaran pinjaman Rp25–100 juta. Mereka telah menyerahkan KTP dan foto usaha kepada Bank Mandiri untuk proses BI checking, serta difasilitasi dalam pembukaan rekening baru dan pembuatan akun QRIS.
- Dalam proses pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Bank Mandiri masih mensyaratkan agunan berupa BPKB kendaraan, mengingat wilayah Cilincing dikategorikan sebagai kawasan berisiko tinggi.

2) Rapat Koordinasi Persiapan Pemetaan Tingkat Literasi Keuangan Umkm Kelautan Dan Perikanan. Rapat dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 25 April 2025 yang dipimpin oleh Katimja Pengelolaan Literasi Keuangan dan Akses Pembiayaan dan dihadiri oleh Bapak

Sudari Prawiro NCTA GQSP UNIDO, Bapak Eko Cahyadi expert GQSP UNIDO, Ibu Aniq Fadillah COO GQSP UNIDO, Katimja Kerja Sama dan Humas Setditjen PDSPPK, Katimja Kewirausahaan dan staf lingkup Timja Pengelolaan Literasi Keuangan dan Akses Pembiayaan Direktorat Pemberdayaan Usaha. Tujuan rapat adalah untuk melakukan koordinasi persiapan kegiatan pemetaan tingkat literasi keuangan dengan UNIDO.



Gambar 51. kegiatan Fasilitasi UMKM KP pada Akses Pembiayaan dan Literasi Keuangan

Ditjen PDSPPK telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja UMKM Pengolahan Produk KP Naik Kelas sebesar Rp1.313.442.000,- sampai dengan periode triwulan II tahun 2025 telah direalisasikan sebesar Rp203.866.000,- atau setara dengan 15,52%.

Sasaran Program 2. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen PDSPKP

D. Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PDSPKP

Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi merupakan indikator yang mengukur implementasi reformasi birokrasi general pada Unit Organisasi Eselon I di lingkungan KKP. Nilai diperoleh dari hasil evaluasi seluruh indikator pembentuk yang terdiri dari akuntabilitas kinerja dan keuangan, pembangunan integritas, profesionalitas ASN, pelayanan publik, reformasi hukum, tata laksana, kearsipan, dan pengadaan barang/jasa.

Tabel 8. Ikhtisar Pencapaian Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	Tahun 2025	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	S.d TW II 2025			TW I 2025	TW II 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	-	-	-	86	-	-	-	-	-	-	-	-

Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PDSPKP tahun 2025 ditargetkan mencapai 86. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang bersifat tahunan, dan capaiannya akan diukur pada akhir tahun 2025. Indikator ini juga merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 yang merupakan tahun pertama periode Renstra 2025-2029. Oleh karena itu capaiannya belum dapat dibandingkan baik dengan capaian pada triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maupun dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja implementasi reformasi birokrasi antara lain:

- a. Kegiatan Terkait Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen PDSPKP

Pada triwulan II Tahun 2025 Ditjen PDSPKP telah mengadakan pembahasan guna menindak lanjuti atas laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal pada tanggal 24 Juni 2025. Rapat dihadiri oleh tim Inspektorat Jenderal KKP dan unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP terkait. Pada kegiatan ini dibahas terkait laporan hasil pemeriksaan Itjen beserta dengan tindak lanjut yang sesuai dengan rekomendasi. Hal ini bertujuan agar dokumen tersebut dapat diterima oleh tim Inspektorat Jenderal dan dinyatakan tuntas. Atas tindak lanjut tersebut kemudian di upload ke aplikasi <https://sidak.kkp.go.id>.

- b. Kegiatan Terkait Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Lingkup Ditjen PDPSKP
 - 1) Melaksanakan kegiatan verifikasi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban secara berkala;
 - 2) Kegiatan rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Keuangan dan BMN periode Mei Tahun 2025 Lingkup Ditjen PDSPKP diselenggarakan pada tanggal 4 Juni 2025. *Output* kegiatan ini yaitu rekonsiliasi transaksi *to do list* dan pendetilan transaksi pada aplikasi sakti dan monsakti;
 - 3) Melakukan pemenuhan dokumen pemeriksaan oleh tim BPK RI perihal Pemeriksaan atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2024 serta penyusunan tanggapan atas konsep temuan BPK-RI.
- c. Kegiatan terkait Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkup Ditjen PDPSKP
 - 1) Monitoring dan Evaluasi (Monev) serta Bimbingan Teknis (Bimtek) penggunaan Modul Bantuan Pemerintah dalam Portal Data KKP dilaksanakan tanggal 16 April 2025.



Gambar 46. Monitoring dan Evaluasi (Monev) serta Bimbingan Teknis (Bimtek) penggunaan Modul Bantuan Pemerintah

- 2) Rapat Update data pemanfaatan Bantuan Pemerintah Lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2024 dilaksanakan tanggal 8 Mei 2025.



Gambar 47. Rapat Update data pemanfaatan Bantuan Pemerintah Lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2024

- 3) Update DATA Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2024 pada Dashboard Bantuan Pemerintah KKP dilaksanakan tanggal 21 Mei 2025.



Gambar 48. Update DATA Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2024

- 4) Pemutakhiran Data Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Lingkup Ditjen PDSPKP dilaksanakan tanggal 27 Mei 2025.



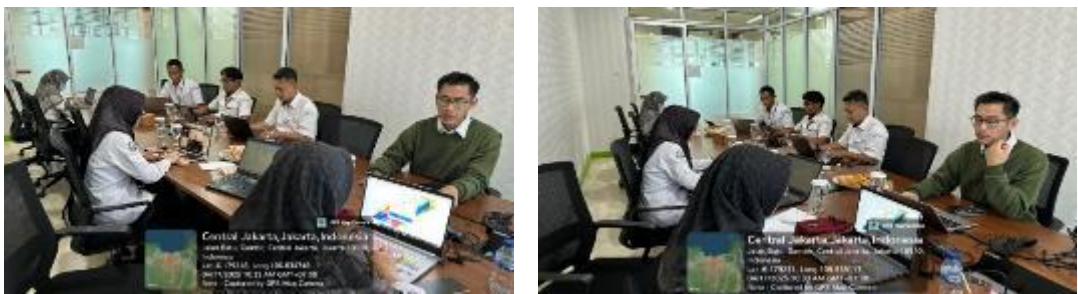
Gambar 49. Rapat Pemutakhiran Data Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Lingkup Ditjen PDSPKP

d. Kegiatan Pembangunan Zona Integritas Lingkup Ditjen PDSPKP

- 1) Pelaksanaan Apel Pagi dan Briefing Reformasi Birokrasi setiap hari senin yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja eselon II lingkup Ditjen PDSPKP;
- 2) Penanganan Pengaduan lingkup Ditjen PDSPKP Bulan April, Mei dan Juni 2025 dan konsultasi/pengaduan yang diterima selain melalui SP4N LAPOR! telah seluruhnya diinput pada aplikasi SP4N LAPOR! dengan status tuntas. Laporan penanganan pengaduan juga telah disampaikan kepada Inspektorat V selaku Tim Penanganan Pengaduan Kementerian secara berjenjang;
- 3) Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Ditjen PDSPKP melalui penetapan Keputusan Dirjen PDSPKP Nomor 45 Tahun 2025;
- 4) Pembentukan Tim Pengelolaan Benturan Kepentingan di Lingkungan Ditjen PDSPKP melalui penerbitan Keputusan Dirjen PDSPKP Nomor 47 Tahun 2025;
- 5) Pelaksanaan evaluasi capaian triwulan I Reformasi Birokrasi Tematik lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 4 – 13 Juni 2025;
- 6) Mengikuti Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KKP bersama Kemen PANRB pada tanggal 21 Mei 2025;
- 7) Mengikuti Pembahasan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2025- 2026 pada Aksi Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa, dan Penguatan Sistem Penanganan Perkara Pidana dan Benturan Kepentingan pada tanggal 15 Mei 2025;
- 8) Mengikuti Sosialisasi Permen PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan 4 Juni 2025;

e. Kegiatan Terkait Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP

- a) Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi Lingkup Ditjen PDSPKP periode triwulan I tahun anggaran 2025 yaitu Penginputan dan Verifikasi Capaian Kinerja pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) dilaksanakan pada tanggal 17 april 2025



Gambar 50. Kegiatan Verifikasi Capaian Kinerja pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK)

- b) Pelaporan Kinerja Lingkup Ditjen PDSPKP periode Triwulan I Tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 21 april 2025.



Gambar 51. Kegiatan Pembahasan Penyusunan Laporan Kinerja Level I dan Laporan Kinerja Level 2 PDSPKP

- c) Rapat Pembahasan Review Laporan Kinerja (LKj) level I Ditjen PDSPKP Periode Triwulan I tahun 2025 dilaksanakan pada 20 Mei 2025.



Gambar 52. Review Laporan Kinerja (LKj) level I Ditjen PDSPKP Periode Triwulan I tahun 2025

- d) Pembahasan Laporan Kinerja Level I PDSPKP Periode Triwulan II Tahun 2024 dilaksanakan pada Rabu tanggal 25 Juni 2025.



Gambar 53. Pembahasan Laporan Kinerja Level I PDSPKP Periode Triwulan II Tahun

- e) Pembahasan Laporan Kinerja Level II PDSPKP Periode Triwulan II Tahun 2025, dilaksanakan pada Kamis tanggal 26 Juni 2025.

- f. Kegiatan Terkait Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Ditjen PDDSPKP
- a) Melaksanakan monitoring capaian IKPA terhadap progres pengisian Capaian Output periode April 2025 dengan seluruh Satker Tugas Pembantuan (TP) lingkup Ditjen PDPSKP pada tanggal 7 Mei 2025, kegiatan monitoring dilakukan secara daring dan diikuti oleh 34 Satker TP.
 - b) Keikutsertaan dalam rapat Monitoring Pelaksanaan IKPA Periode Juni Tahun 2025 di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Biro Keuangan, KKP pada tanggal 4 Juni 2025.



Gambar 54. Rapat Monitoring Pelaksanaan IKPA KKP pada Indikator Halaman III DIPA Periode Mei Tahun 2025

- g. Kegiatan Terkait Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Ditjen PDDSPKP
- 1) Rapat Pembahasan Pembahasan Revisi Kewenangan KPA, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 25 April 2025
 - 2) Rapat Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 28 April 2025
 - a) Revisi Relaksasi Anggaran telah selesai dilaksanakan, relaksasi tersebut diperuntukan untuk kebutuhan dasar yaitu Honorarium PJJLP, Honorarium PPNPN, Honorarium Tenaga Kontrak, Biaya Air, Biaya Listrik, Biaya Telepon dan Biaya Internet senilai Rp7.354.389.000, penetapan hasil revisi tersebut ditandai dengan terbitnya DIPA Nomor SP DIPA- 032.06.1.622131/2025 tanggal 23 April 2025.

- b) Dalam rangka mendukung kegiatan, efektifitas dan percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran Ditjen PDSPKP Tahun 2025, direncanakan akan dilakukan revisi anggaran kewenangan KPA. Berdasarkan hal tersebut diharapkan masing-masing Eselon II dapat mengajukan usulan revisi untuk dibahas terlebih dahulu pada rapat.
- c) Rencana Kegiatan 2026-2029 diundur pembahasan dengan MKP. Masing2 eselon II untuk segera menyiapkan ranwal masing-masing. (Jumlah CS yg dibangun, Pabrik es yang dbangun, Sarana pasca panen, Senkul, pasar ikan, Coolbox, dsb)



Gambar 55. Rapat Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025

- 3) Rapat Pembahasan Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2025, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2025
- 4) Rapat Pembahasan Koordinasi Perencanaan Program dan Anggaran lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2025, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2025.



Gambar 56. Rapat Pembahasan Koordinasi Perencanaan Program dan Anggaran lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2025

- 5) Rapat Rancangan Revisi DJA yang bersumber dari Sentra Kuliner TA 2025 dan Usulan Revisi Kewenangan KPA, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2025.

- h. Kegiatan Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Lingkup Ditjen PDSPKP
- 1) Melaksanakan pembahasan revisi manajemen risiko TA 2025 dan penyusunan Laporan SPIP Triwulan I Tahun 2025 yang diadakan pada tanggal 17 April 2025. Kegiatan dihadiri oleh Inspektorat Jenderal dan perwakilan unit kerja eselon II lingkup Ditjen PDSPKP serta tim kerja lingkup Sekretariat Ditjen PDSPKP terkait. Pada pembahasan ini dilakukan update atas realisasi pengendalian pada form pemantauan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko serta laporan SPIP triwulan I 2025.
 - 2) menyelenggarakan Sosialisasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 61 Tahun 2024 tentang Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 12 Juni 2025 yang diikuti oleh tim satuan tugas SPIP Ditjen PDSPKP. Sosialisasi disampaikan oleh narasumber dari Biro Keuangan dan BMN dengan 2 (dua) agenda yaitu Proses Manajemen Risiko, Penetapan Selera dan Faktor Risiko serta Penerapan Pengendalian Manajemen Risiko Lingkup Ditjen PDSPKP. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman peserta tentang berbagai jenis risiko yang dihadapi organisasi, baik risiko internal maupun eksternal dan memberi pemahaman atas kerangka kerja manajemen risiko yang sistematis, mulai dari proses identifikasi, penilaian, mitigasi, hingga pemantauan risiko yang berkelanjutan
- i. Kegiatan terkait Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDDSPKP
- 1) Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Fungsional APHP dan Pembina Mutu tanggal 16 April 2025;
 - 2) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Disiplin dan Kinerja Pegawai Triwulan I Tahun 2025 tanggal 23 April 2025;
 - 3) Sosialisasi Permen KP No. 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja, 10 Juni 2025;



Gambar 57. Sosialisasi Permen KP No. 10 Tahun 2025

- 4) Pemanggilan dan Orientasi Pelaksanaan Tugas CPNS Ditjen PDSPKP Tahun 2024 tanggal 2 Juni s.d 5 Juni 2025;
- 5) *Training of Trainer* Pemutakhiran Data Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal PDSPKP tanggal 21 Mei 2025;
- 6) Pelantikan Jabatan Fungsional Arsiparis tanggal 26 Juni 2025.

j. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan lingkup Ditjen PDSPKP

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor 2103/SJ.4/TU.210/VII/2025 tanggal 9 Juli 2025 hal Penyampaian Capaian IKU Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester I Tahun 2025, Ditjen PDSPKP belum terdapat realisasi. Hal ini karena target penyelesaian Rancangan Peraturan Menteri tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sektor Kelautan dan Perikanan di bulan Agustus, dan Rancangan Peraturan Menteri tentang Indikasi Geografis Hasil Kelautan dan Perikanan di bulan Juli. Sehingga belum terdapat realisasi penyelesaian.

Sehubungan dengan penyelesaian kedua rancangan peraturan menteri dimaksud, Ditjen PDSPKP telah beberapa kali melakukan rapat pembahasan rancangan peraturan menteri dimaksud, dan setelah disepakati di lingkup Ditjen PDSPKP, Dirjen PDSPKP telah mengirimkan 2 (dua) Nota Dinas ke Sekretaris Jenderal, yaitu:

- a. Nota Dinas Nomor 1056/DJPDSPKP/HK.160/V/2025 tanggal 27 Mei 2025 hal Penyampaian Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengembangan Indikasi Geografis Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
- b. Nota Dinas Nomor 1268/DJPDSPKP/HK.160/VI/2025 tanggal 30 Juni 2025 hal Penyampaian Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Sektor Kelautan dan Perikanan.

Selain penyusunan peraturan menteri, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2025, KKP melalui Ditjen PDSPKP juga melakukan penyusunan peraturan presiden yaitu Rancangan Peraturan Presiden tentang Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan. Pada triwulan II telah dilakukan beberapa kali

pembahasan baik lingkup internal Ditjen PDSPKP maupun antar eselon I lingkup KKP sebagai berikut:

- a. Pembahasan sinkronisasi rencana aksi Gemarikan, tanggal 15 April 2025 berdasarkan undangan Nomor B.3802/DJPDSPKP.1/TU.330/IV/2025.
 - b. penyusunan rancangan Peraturan Presiden tentang Gemarikan, tanggal 28 April 2025 berdasarkan undangan Nomor B.4137/DJPDSPKP.1/TU.330/IV/2025.
 - c. Bersinergi dengan Biro Hukum dalam melaksanakan Rapat Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian berdasarkan undangan Nomor B.347/SJ.4/TU.330/V/2025.
- k. Kegiatan Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PDSPKP
- Beberapa kegiatan dalam rangka mendukung implementasi reformasi birokrasi yaitu:
- 1) Pelaksanaan Apel Pagi dan Briefing Reformasi Birokrasi setiap hari senin yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja eselon II lingkup Ditjen PDSPKP;
 - 2) Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Ditjen PDSPKP melalui penerbitan Keputusan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 7 Tahun 2025;
 - 3) Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Ditjen PDSPKP melalui penerbitan Keputusan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 8 Tahun 2025;
- l. Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan lingkup Ditjen PDSPKP
- dalam rangka mendukung implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi, beberapa kegiatan persuratan, tata usaha, dan kearsipan yang telah dilaksanakan diantaranya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Workshop Instrumen Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI) Pengawasan Kearsipan di Ruang Rapat Akses Pasar tanggal 29 April 2025.



Gambar 58. Sosialisasi dan Workshop Instrumen Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI) Pengawasan Kearsipan

2. Pengumpulan Data Dukung Penilaian Pengawasan Kearsipan Tahun 2025 pada tanggal 19 Mei 2025 di Ruang Rapat Akses Pasar, GMB III,lt.15.
 3. Finalisasi Pengumpulan Data Dukung Penilaian Pengawasan Kearsipan Tahun 2025 pada tanggal 2 Juni 2025 RR. Branding lt.15
 4. Pelaksanaan kegiatan Rapat Persiapan Aksi Perubahan Digitalisasi Arsip pada tanggal 23 Juni 2025, , Ruang Rapat Branding GMB III lt 15.
 5. Pelaksanaan Penataan Arsip Inaktif pada tanggal 24-25 Juni 2025 di RR. Record Center Raiser Ikan Hias Cibinong.
- m. Kegiatan Terkait Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Ditjen PDSPKP
- 1) Pelaksanaan rapat monitoring Rencana Umum Pengadaan (RUP) dalam rangka persiapan penilaian IKU triwulan 2 tahun 2025 tanggal 26 Mei 2025. Kegiatan bertujuan untuk melakukan Monitoring Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2025 pada Aplikasi SiRUP;
 - 2) Pelaksanaan rapat Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) melalui E-Katalog Versi 6 dalam rangka Persiapan Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) pada hari Kamis, 19 Juni 2025. Rapat bertujuan untuk mempersiapkan penggunaan E-Katalog Versi 6 mendukung pengadaan barang dan jasa pada Pembangunan KNMP;
 - 3) Pelaksanaan rapat Persiapan Sounding Market Pengadaan Sarana melalui E-Katalog Versi 6 dalam rangka Persiapan Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) pada hari Rabu, 25 Juni 2025. Rapat bertujuan untuk mempersiapkan Sounding Market Pengadaan Sarana melalui Ekatalog Versi 6 mendukung pengadaan barang dan jasa pada Pembangunan KNMP;
 - 4) Pelaksanaan Sosialisasi Kebutuhan Sarana PDS dalam Mendukung Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) secara hybrid via Luring di RR. Branding, GMB 3- Lt 15 dan Daring melalui Zoom Meeting pada hari Rabu, 2 Juli 2025. Tujuan Rapat adalah untuk memberikan informasi dan penjelasan teknis terkait kebutuhan sarana PDS dalam mendukung KNMP kepada calon penyedia potensial.
 - 5) Pelaksanaan rapat revisi Rencana Umum Pengadaan (RUP) dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal PDSPKP Triwulan 2 Tahun 2025 pada

hari Selasa tanggal 8 Juli 2025. Kegiatan bertujuan untuk melakukan Updating Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2025 pada Aplikasi SiRUP;



Gambar 59. Rapat Updating RUP Triwulan 2 Tahun Anggaran 2025 lingkup Ditjen PDSPKP

n. Kegiatan terkait Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP

- 1) Pembahasan Proposal Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2025 yang dilaksanakan beberapa kali pada tanggal 24 April 2025, 30 April 2025, dan 6-8 Mei 2025.
- 2) Penilaian Proposal Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2025.
- 3) Rapat Pleno Proposal Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2025.



Gambar 60. Rapat Pleno Proposal Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2025 Tanggal 19 Mei 2025

Kegiatan terkait Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Ditjen PDSPKP:

- 1) Persiapan Valnas Bidang PDSPKP Semester II Tahun 2024 pada tanggal 10 April 2025;
Validasi Nasional Satudata Bidang PDSPKP Tahun 2024 pada tanggal 15-17 April 2025;
- 2) Pembahasan Analisa Data Distribusi Hasil Perikanan pada tanggal 15 Mei 2025;
- 3) Pembahasan Data Perdagangan Produk Kelautan dan Perikanan pada tanggal 20 Mei 2025;

- 4) Rapat Persiapan Workshop Satu Data bidang PDSPKP Tahun 2025 pada tanggal 2 Juni 2025;
 - 5) Rapat Pembahasan Portaldata Modul Produksi Bidang PDSPKP Tahun 2025 pada tanggal 3 Juni 2025;
 - 6) Rapat Pembahasan Pendataan Satu Data Bidang PDSPKP pada tanggal 12 Juni 2025; dan
 - 7) Rapat Portaldata Modul Produksi Bidang PDSPKP pada tanggal 16 Juni 2025.
 - 8) Rapat pembahasan data Geospasial bantuan pemerintah lingkup Ditjen PDSPKP tanggal 23 Juni 2025
- o. Kegiatan Terkait Penyelesaian Permasalahan Hukum Lingkup Ditjen PDSPKP
- Pelayanan bantuan hukum yang ditangani oleh Ditjen PDSPKP pada Triwulan II berupa pendampingan Tim Teknis Ditjen PDSPKP dalam memenuhi undangan wawancara dan permintaan dokumen oleh Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya, di antaranya:
- 1) tanggal 14 April 2025, atas Surat Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Nomor B/ 2070 /IV/RES.3.3./2025/Ditreskrimsus tanggal 10 April 2025;
 - 2) tanggal 15 April 2025, atas Surat Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Nomor B/ 2071 /IV/RES.3.3./2025/Ditreskrimsus tanggal 10 April 2025;
 - 3) tanggal 5 Mei 2025, atas Surat Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Nomor B/ 1728 /IV/RES.3.3./2025/Ditreskrimsus tanggal 28 April 2025;
 - 4) tanggal 6 Mei 2025, atas Surat Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Nomor B/ 1729 /IV/RES.3.3./2025/Ditreskrimsus tanggal 28 April 2025;
 - 5) tanggal 3 Juni 2025 atas Surat Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Nomor B/ 3210 /V/RES.3.3./2025/Ditreskrimsus tanggal 28 Mei 2025;
 - 6) tanggal 10 Juni 2025 atas Surat Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Nomor B/ 3441 /VI/RES.3.3./2025/Ditreskrimsus tanggal 5 Juni 2025.
- p. Kegiatan Terkait Kerjasama yang disusun/ditindaklanjuti Oleh Ditjen PDSPKP
- 1) Kesepakatan Kerjasama Internasional Lingkup Ditjen PDSPKP;
 - a) Pembahasan Persiapan Penyusunan Instrument Hukum Dalam Rangka Protokol Perubahan IJEPA tanggal 24 April 2025;
 - b) Rapat Pembahasan Penyusunan Instrument Hukum Dalam Rangka Protokol Perubahan IJEPA tanggal 29 April 2025;

- c) Rapat Pembahasan Usulan Penjajakan Pembentukan WG on Animal, Fish, and Plant Health Issues RI-UE tanggal 29 April 2025;
 - d) Rapat Pembahasan Counterdraft MoU RI-Brunei tanggal 7 Mei 2025;
 - e) Rapat Evaluasi Kerja Sama BPPSDM KP dengan JICA tanggal 8 Mei 2025;
 - f) Rapat Pembahasan Penyusunan Instrument Hukum Dalam Rangka Protokol Perubahan IJEPA tanggal 14 Mei 2025;
 - g) Rapat Pembahasan Counter-draft MoU on Fisheries and Aquaculture Cooperation RI-Hongaria tanggal 22 Mei 2025;
 - h) Rapat Pembahasan Penyusunan Instrument Hukum Dalam Rangka Protokol Perubahan IJEPA tanggal 21 Mei 2025;
 - i) Rapat Persiapan Pertemuan ke-2 SWG FDA JETCO RI-UK tanggal 27 Mei 2025;
 - j) Rapat Pembahasan Verifikasi Dokumen SHTI dan Rencana Tindak Lanjut tanggal 28 Mei 2025;
 - k) Rapat Audiensi Penyelenggaraan Shrimp Summit di Bali tanggal 11 Juni 2025;
 - l) Rapat Pembahasan Dokumen “Accord” Kemitraan Strategis RI-Inggris tanggal 19 Juni 2025;
 - m) Rapat Persiapan Monev MSP antara KKP dan SFPF tanggal 19 Juni 2025;
 - n) Rapat Pembahasan Implementasi Protokol Perubahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Jepang Mengenai Kemitraan Ekonomi tanggal 23 Juni 2025;
 - o) Rapat Dalam Rangka Pertemuan KKP dan Perwakilan Kedubes AS tanggal 24 Juni 2025;
 - p) Rapat Pembahasan Counterdraft Second Protocol to Amend the MoU on Marine and Fisheries Cooperation RI-Persatuan Emirat Arab tanggal 26 Juni 2025.
- 2) Kesepakatan Kerjasama Antarlembaga Lingkup Ditjen PDSPKP;
- a) Pembahasan rencana implementasi SRG dan rencana perpanjangan kerja sama;
 - b) Pembahasan rencana implementasi SRG dalam rangkaantisipasi dampak pemberlakuan tarif Impor USA, 8 April 2025;
 - c) FGD I : "Menguak Peluang Bisnis Olahan Rumput Laut non Hidrokoloid" tanggal 23 April 2025;
 - d) Rapat Tindak Lanjut Penyusunan PKS BPPMHKP dengan PT. Jatim GRHA Utama (Puspa Argo) tanggal 25 April 2025;

- e) data Realisasi kredit UMi dr PT.PNM;
- f) Focus Group Discussion (FGD) realisasi penyaluran kredit program tahun 2025 tanggal 5 Mei 2025;



Gambar 61. Focus Group Discussion (FGD) realisasi penyaluran kredit program

- g) Rapat Penyusunan Perjanjian Kerja Sama antara POLRI dan KKP tanggal 5 Mei 2025;
- h) Training of Training (ToT) identifikasi dan Pendaftaran Indikasi Geografis Sektor Kelautan dan Perikanan tanggal 8 Mei 2025;
- i) Penandatngan Perjanjian Kerja Sama antara Asprindo dan GQSP (UNIDO) tentang Peningkatan Produktivitas Budidaya Udang Windu secara Tradisional Plus dan Bandeng daam rangka Mendukung Program Kampung Industri tanggal 22 Mei 2025;



Gambar 62. Penandatngan Perjanjian Kerja Sama antara Asprindo dan GQSP (UNIDO)

- j) Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Kerja Sama antara Eselon I KKP dan PT. BNI (Persero) Tbk. tanggal 27 Mei 2025;
- k) Rapat Dukungan dan Partisipasi pada Indo Fisheries 2025 Expo & Forum 2025 tanggal 10 Juni 2025;

- l) Rapat Koordinasi Pemantauan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Perikanan tanggal 10 Juni 2025;
- m) Rapat Pembahasan Sinkronisasi Ruang Lingkup PKS dengan BPOM tanggal 12 Juni 2025;
- n) Rapat Pemantauan Implementasi Kesepakatan Bersama antara KKP dan YKAN tanggal 12 Juni 2025;
- o) Rapat Pembahasan Draft Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja Sama antara KKP dan Pempov Jabar tanggal 12 Juni 2025;
- p) Penandatanganan PKS antara Ditjen PDSPKP dengan AP2HI pada kick off STELINA yang dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Shrimp Summit di Bali tanggal 22 Juni 2025



Gambar 63. Penandatanganan PKS antara Ditjen PDSPKP dengan AP2HI

- q) Pembahasan rencana kerja sama antara Ditjen PDSPKP dan PT. BNI (Persero) Tbk. tanggal 25 Juni 202
- q. Kegiatan terkait Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Terhadap Total Pemberitaan Bidang PDSPKP
 - 1) Membuat siaran pers setiap event Ditjen PDSPKP sehingga media massa tidak ada kesalahpahaman dalam menyusun berita;
 - 2) Menjalin media *relationship* yang baik dengan media massa melalui pelayanan informasi dan publikasi yang informatif untuk kegiatan prioritas Ditjen PDSPKP;

- 3) Menayangkan berbagai konten informasi dan edukasi tentang Ditjen PDSPKP melalui akun resmi media sosial dan website Ditjen PDSPKP;
 - 4) Menayangkan berita tentang kegiatan Ditjen PDSPKP secara rutin dengan memperhatikan ketepatan dan kecepatan penyampaian berita baik pada media sosial maupun website Ditjen PDSPKP;
 - 5) Memelihara *engagement* dengan *follower* pada media sosial Ditjen PDSPKP dengan tetap memperhatikan materi konten yang tepat;
 - 6) Menyelenggarakan kegiatan pertemuan pembahasan kegiatan/event.
- r. Kegiatan Terkait Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Ditjen PDSPKP
- 1) Pada tanggal 15 April 2025, diselenggarakan rapat pengelolaan BMN terkait dengan Penyusunan Dokumen Permohonan Persetujuan Sewa Lantai 2 Gedung Perkantoran PIM Muara Baru dan Pembuatan Tiket Permohonan Sewa pada SIMAN V2. Tujuan rapat adalah tersusunya dokumen usulan sewa Lantai 1 s.d 4 Gedung Perkantoran PIM Muara Baru dan penyampaian Tiket Pemohonan Sewa telah tersampaikan kepada KPKNL Jakarta 2 melalui SIMAN V2. Rapat dihadiri oleh perwakilan dari Biro Keuangan dan BMN—Setjen KKP dan Direktorat Pemasaran.
 - 2) Pada tanggal 08 Mei 2025, Sekretaris Ditjen PDSPKP menyampaikan Surat Nomor B.4654/DJPDSPKP.1/PL.720/V/2025 kepada DJ Seafood dan Surat Nomor B.4653/DJPDSPKP.1/PL.720/V/2025 kepada Direktur Utama CV Solutee Semangat Internasional terkait dengan Penertiban Pemanfaatan BMN PIM Muara Baru. Tujuan surat adalah agar DJ Seafood dan CV Solutee Semangat Internasional untuk melakukan pembongkaran dan pemindahan kios dan perlengkapannya paling lambat tanggal 11 Mei dan segera melakukan pembayaran atas pemanfaatan area fasilitas umum periode 1 September 2024 s.d. 28 Februari 2025;
 - 3) Pada tanggal 9 Mei 2025, diselenggarakan rapat Sosialisasi Surat Edaran Sekretaris Jenderal KKP tentang Tata Kelola Penggunaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas. Tujuan rapat adalah terlaksananya tertib pengelolaan Penggunaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas pada setiap Unit Eselon II Direktorat Jenderal PDSPKP. Rapat dihadiri oleh Timja Hukum Setditjen PDSPKP, Timja Dukman dan Operator Aset Tetap setiap unit Eselon II Lingkup Ditjen PDSPKP ;

- 4) Pada tanggal 22 Mei 2025, penandatanganan Perjanjian dan BAST Hibah Kendaraan Berpendingin dari Direktorat Jenderal PDSPKP kepada Pemda Kabupaten Kebumen. Tujuan kegiatan ini adalah terlaksananya tertib administrasi, tertib hukum dan tertib pengelolaan BMN berupa Hibah Kendaraan Berpendingin dan sekaligus penyerahan BMN Kendaraan Berpendingin kepada Pemda Kabupaten Kebumen;
- 5) Pada tanggal 22 Mei 2025, Uji Petik Pengelolaan BMN Tahun 2024-2025 Lingkup Ditjen PDSPKP di Pasar Ikan Modern (PIM) dan Cold Storage Muara Baru. Tujuan Uji Petik Pengelolaan BMN adalah untuk melakukan kunjungan lapangan dan sekaligus melakukan pengecekan fisik terhadap BMN yang menjadi objek sampling. dihadiri oleh Inspektur IV - Inspektorat Jenderal KKP beserta dengan Tim Reviu, Sekretariat Direktorat Jenderal PDSPKP, Direktorat Pemasaran, BBP3KP;
- 6) Pada tanggal 12 Juni 2025, Direktorat Jenderal PDSPKP menyampaikan Nota Dinas Nomor 2157/DJPDSPKP.1/PL.720/VI/2025 kepada Kepala Biro Keuangan dan BMN – Setjen KKP perihal Permohonan Penetapan Pelaksanaan Sewa BMN PIM Muara Baru;
- 7) Pada tanggal 18 Juni 2025, rapat terkait terkait tindak lanjut hasil temuan sementara kegiatan pengawasan pengelolaan BMN Direktorat Jenderal PDSPKP Tahun 2024-2025 oleh Tim Insektorat IV – Itjen KKP. Rapat dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Logistik, Direktorat Pengolahan, Direktorat Pemasaran, Direktorat Pemberdayaan Usaha, BBP3KP;
- 8) Pada tanggal 19 Juni 2025, Sekretaris Ditjen PDSPKP menyampaikan Surat Nomor B.5570/DJPDSPKP.1/PL.710/VI/2025 kepada Kepala Balai Besar Kekearifan Kesehatan Tanjung Priok perihal Penggunaan Sementara BMN. Tujuan surat tersebut adalah agar permohonan ditandatangani oleh Pengguna Barang Kementerian Kesehatan dan ditujukan kepada Pengguna Barang Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta menambahkan tujuan dan jangka waktu penggunaan sementara
- 9) Pada tanggal 23 Juni 2025, Direktorat Jenderal PDSPKP menyampaikan Surat Nomor 5663/DJPDSPKP.1/PL.750/VI/2025 kepada Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta perihal Permintaan Tanggapan Terhadap Hibah Pasar Ikan Higienis (PIH) Penjompongan. Tujuan surat adalah terlaksananya tertib administrasi berupa dokumen resmi dari Pemda DKI Jakarta atas pelaksanaan Hibah PIH Pejompongan yang Gagal;



Gambar 64. Penandatanganan BAST dan Perjanjian Hibah Kendaraan Berpendingin Dari Direktorat Jenderal PDSPKP kepada Pemda Kabupaten Kebumen

Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja implementasi birokrasi sebesar Rp100.057.724.000,- sampai dengan periode triwulan II tahun 2025 telah direalisasikan sebesar Rp37.316.613.000,- atau setara dengan 37,30%.

3. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan adalah sebesar Rp255.259.620.000,- (*dua ratus lima puluh lima miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*) yang seluruhnya merupakan APBN rupiah murni dan PNBPN. Dari pagu anggaran tersebut, terdapat blokir dan efisiensi anggaran sebesar Rp134.622.418.000,- (*seratus tiga puluh empat miliar enam ratus dua puluh dua juta empat ratus delapan belas ribu rupiah*) sehingga pagu anggaran efektif menjadi sebesar Rp120.637.202.000,- (*seratus dua puluh miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus dua ribu rupiah*). Penyerapan anggaran Ditjen PDSPKP sampai dengan periode triwulan II tahun 2025 adalah sebesar Rp51.155.442.000,- (*lima puluh satu miliar seratus lima puluh lima juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah*) atau setara dengan 20,04% terhadap total pagu anggaran awal atau 42,40% terhadap pagu anggaran pagu efektif.

Tabel 9. Realisasi Penyerapan Anggaran Ditjen PDSPKP Menurut Kewenangan Tahun 2024
(Dalam Rp.000)

Satker	Pagu Awal	AA/Blokir	Pagu Efektif	Realisasi	% Realisasi Thd Pagu Awal	% Realisasi Thd Pagu Efektif
Pusat	208.367.416	121.018.327	87.349.089	38.157.046	39,67	50,38
UPT	42.103.397	8.815.284	33.288.113	12.998.396	30,87	39,05
Tugas Pembantuan	4.788.807	4.788.807	-	-	-	-
Jumlah	255.259.620	134.622.418	120.637.202	51.155.442	20,04	42,40

Sumber: Aplikasi Omspan Kemenkeu 30 Juni 2025

Tabel 10. Realisasi Penyerapan Anggaran Ditjen PDSPKP Menurut Jenis Kegiatan Tahun 2024
(Dalam Rp.000)

Satker	Pagu Awal	AA/Blokir	Pagu Efektif	Realisasi	% Realisasi Thd Pagu Awal	% Realisasi Thd Pagu Efektif
Dit. Pemberdayaan Usaha	12.619.000	10.920.212	1.698.788	290.238	2,30	17,09
Dit Logistik	5.856.950	5.174.337	682.613	472.698	8,07	69,25
Dit Pengolahan	16.829.050	15.262.197	1.566.853	400.066	2,38	25,53
Dit Pemasaran	83.469.450	70.604.540	12.864.910	1.455.425	1,74	11,31
Sekretariat Ditjen PDSPKP	89.592.966	19.057.041	70.535.925	35.538.619	39,67	50,38
BBP3KP	42.103.397	8.815.284	33.288.113	12.998.396	30,87	39,05
Tugas Pembantuan	4.788.807	4.788.807	0	0	0,00	0,00
Jumlah	255.259.620	134.622.418	120.637.202	51.155.442	20,04	42,40

Sumber: Aplikasi Omspan Kemenkeu 30 Juni 2025

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKj) Ditjen PDSPKP Triwulan II Tahun 2025 menyajikan capaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja. Capaian dimaksud selanjutnya dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian periode sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja Ditjen PDSPKP berbagai upaya telah dilakukan seperti koordinasi pelaksanaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana aksi dalam rangka mencapai indikator kinerja. Secara umum, indikator kinerja Ditjen PDSPKP yang dapat dihitung pada triwulan II tahun 2025 telah tercapai dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NKO) yang terukur pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) mencapai 93,62 (Kategori Baik)

2. Permasalahan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil pengukuran atas kinerja Ditjen PDSPKP periode triwulan II tahun 2025, terdapat satu indikator kinerja yang tidak mencapai target yakni Nilai Ekspor Rumput Laut. Adapun permasalahan dan rencana tindak lanjut ke depan antara lain:

Tabel 11. Permasalahan dan Rekomendasi atas Indikator kinerja yang tidak mencapai target pada triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
Nilai Ekspor Rumput Laut	Penurunan nilai ekspor rumput laut yang dapat disebabkan penurunan permintaan industri yang menggunakan produk turunan rumput laut serta adanya perlambatan ekonomi global yang mengakibatkan penurunan aktivitas industri hilir di luar negeri	<ul style="list-style-type: none">• upaya promosi/sosialisasi terkait potensi produk turunan rumput laut, seperti <i>biostimulant</i> dan produk non-konsumsi, dalam rangka memperluas basis pemanfaatan dan pasar rumput laut.

3. Tindak Lanjut Rekomendasi pada Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Tindak lanjut yang telah dilakukan pada triwulan II tahun 2025 atas rekomendasi pada Laporan Kinerja triwulan I tahun 2025 antara lain :

Tabel 12. Tindak Lanjut Rekomendasi pada Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut pada Triwulan I Tahun 2025	Tindak Lanjut pada Triwulan II Tahun 2025
1	Nilai Ekspor Rumput Laut	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan upaya promosi/kampanye terkait amannya produk olahan berbasis rumput laut terutama yang ditujukan untuk produk konsumsi. 	<ul style="list-style-type: none"> rapat persiapan <i>virtual business matching</i> dalam kerangka kerja sama <i>Indonesia-Singapore Agribusiness Working Group (ISAWG)</i> <i>Focus Group Discussion</i> tanggal 23 April 2025 yang membahas isu-isu strategis pengembangan rumput laut dari hulu hingga hilir, sekaligus menjaring masukan untuk penyusunan <i>Roadmap Rumput Laut Nasional</i> rapat persiapan pameran rumput laut skala internasional <i>Food Ingredients Europe 2025</i> pada tanggal 18 Juni 2025

LAMPIRAN



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Budi Sulistiyo**

Jabatan : Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Januari 2025

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Kesatu
Direktur Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Budi Sulistiyo

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
1.	Meningkatnya Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing	1.	Nilai Ekspor Rumput Laut (USD Miliar)	0,574
		2.	Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya (USD Miliar)	5,676
		3.	Nilai Pemasaran Produk Perikanan Dalam Negeri (Rp Triliun)	310,51
		4.	Persentase UMKM Pengolahan Produk KP Naik Kelas (%)	5
2.	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen PDSPKP	5.	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PDSPKP (nilai)	86

Data Anggaran :

PROGRAM/KEGIATAN		Anggaran (Rp.)
PROGRAM : Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		
1	Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	86.845.450.000
2	Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	16.829.050.000
3	Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	12.619.000.000
4	Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	5.856.950.000
5	Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan	5.300.076.000
PROGRAM : Dukungan Manajemen		
1	Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen PDSPKP	127.809.094.000
Total Anggaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2025		255.259.620.000

Jakarta, 17 Januari 2025

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Kesatu
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing
Produk Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Budi Sulistiyo

